



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT
JL. K.S.Tubun 26 Telp.(0561) 732229-732242 Fax.(0561) 762624
Email pp.kumhamkalbar@gmail.com
PONTIANAK, 78121

Nomor : W.16.PR.01.01- 385
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LkjIP) Tahun 2023 Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kalimantan Barat

15 Januari 2024

Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal
c.q. Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Di -
Tempat

Menindaklanjuti Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang "Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah" serta Kepmenkumham Nomor M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 Tentang "Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI" serta perubahan atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.06.OT.01.01 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 - 2024, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Kantor Wilayah,

Muhammad Tito Andrianto
NIP. 197801141997031001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi RI;
3. Direktur Jenderal Pemasyrakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
5. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
6. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
7. Direktur Jenderal Peraturan Perundang- undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
8. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
9. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
10. Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM.



LAPORAN KINERJA SEMESTER II TAHUN 2023

*KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN BARAT*

KEMENKUMHAM KALBAR

kalbar.kemenkumham.go.id

HUBUNGI KAMI



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat

Jl. Karet Satsuit Tubun No. 26, Akcaya,
Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat 78121

Telp. (0561) 732242-732229
Fax (0561) 762624



Muhammad Tito Andrianto

Kakanwil Kemenkumham Kalbar

Email : pp.kumhamkalbar@gmail.com

Website : <https://kalbar.kemenkumham.go.id/>

Facebook : [@kemenkumhamkalbar](https://www.facebook.com/@kemenkumhamkalbar)

Instagram : [@kemenkumham_kalbar](https://www.instagram.com/@kemenkumham_kalbar)

Twitter : [@kumham_kalbar](https://www.twitter.com/@kumham_kalbar)

Youtube : [@Kemenkumham_Kalbar](https://www.youtube.com/@Kemenkumham_Kalbar)

DAFTAR ISI

2	DAFTAR ISI
4	KATA PENGANTAR
5	EXECUTIVE SUMARY
7	BAB I PENDAHULUAN
25	BAB II PERENCANAAN KINERJA
39	BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
156	BAB IV PENUTUP
160	LAMPIRAN



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemudahan dan petunjuk-Nya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Tahun 2023. Sebagai perwujudan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.



Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran akuntabilitas kinerja yang menyeluruh mengenai tiga aspek pembahasan yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memberi gambaran capaian kinerja pada periode tertentu.

Disamping itu Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat pada masa mendatang.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, serta pemangku kepentingan khususnya pihak-pihak yang membutuhkan.

Pontianak, 05 Januari 2024
Kepala Kantor Wilayah



Muhammad Tito Andrianto
NIP. 197801141997031001

EXECUTIVE SUMMARY **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Sasaran SAKIP adalah menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif serta responsif terhadap kebutuhan dan isu strategis yang terjadi dalam masyarakat dan lingkungan. Terwujudnya transparansi dalam penggunaan APBN merupakan tonggak utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, untuk itulah LKIP disusun secara tepat, jelas, dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban tugas pemerintah. Dengan dilaksanakannya SAKIP secara tepat dan bersinergis maka diharapkan terdapat peningkatan kinerja dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pemerintah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat sebagai salah satu satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di wilayah, memiliki 22 Sasaran Kegiatan dan 60 Indikator Kinerja Kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis dari 9 Program Unit Utama Kementerian Hukum dan HAM. Capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat di Tahun 2023 telah tercapai seluruhnya dan bahkan beberapa indikator melebihi dari target yang telah ditentukan. Namun masih terdapat area-area yang perlu ditingkatkan dan masih menjadi bahan evaluasi bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat agar pencapaian Perjanjian Kinerja pada Tahun 2024 dapat lebih optimal.

Sementara itu capaian kinerja dari aspek keuangan, penyerapan anggaran untuk satuan kerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Tahun 2023 mencapai 99,45% atau sebesar Rp. 34.072.969.121,- dari total anggaran sebesar Rp. 34.260.544.000,- . Penyerapan tersebut sudah optimal mengingat target penyerapan yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal pada Triwulan IV atau Semester II sebesar 100% sehingga deviasi penyerapan hanya sebesar 0,55%. Berdasarkan nilai tersebut dapat dikatakan pelaksanaan program kegiatan berbasis anggaran pada Kantor Wilayah Kalimantan Barat berjalan dengan efektif dan maksimal.

5

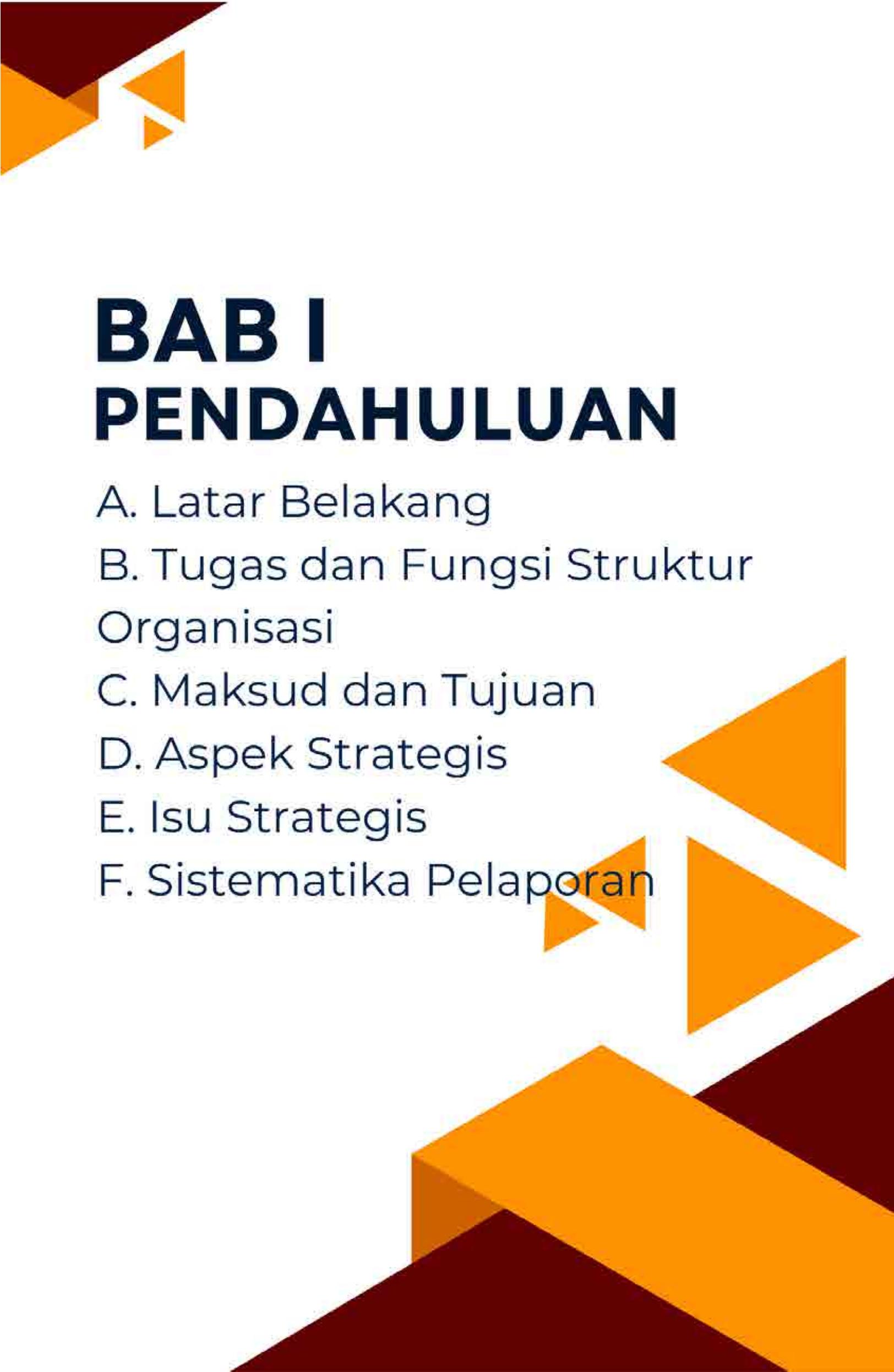
PESAN MENKUMHAM

1. Utamakan akuntabilitas, kedepankan integritas
2. Bangun sinergitas serta manajemen organisasi yang sehat & cerdas
3. Jabatan adalah amanah, terima dengan tanggung jawab & tinggalkan jejak yang baik
4. Kuasai pengelolaan & penggunaan anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas & transparansi
5. Perkuat sinergi & kolaborasi internal serta bangun kerja sama tim yang baik



YASONA H. LAOLY

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI



BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis
- E. Isu Strategis
- F. Sistematika Pelaporan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum serta pemajuan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan melaksanakan pembangunan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Apabila dikaitkan dengan pentahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan keempat (terakhir), sehingga mempunyai peranan yang penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik. Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045.

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Sebagai bentuk implementasi Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kantor wilayah kementerian hukum dan ham kalimantan barat atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor wilayah kementerian Hukum dan Ham kalimantan barat merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi kantor wilayah kementerian hukum dan HAM Kalimantan Barat dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Laporan ini juga merupakan suatu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “good Governance”.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
6. Pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
9. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
10. Pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah; dan
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat merupakan unit/ satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di wilayah provinsi Kalimantan Barat, oleh karena itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat memiliki fungsi sebagai pengordinasi pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. Dengan kata lain Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat berperan dalam memberikan pembinaan dan dukungan administrasi UPT di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat juga memiliki peran penting dalam perencanaan program, pengendalian

program, pelaporan, pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, fasilitasi perancangan produk hukum, pelayanan dan penegakan hak asasi manusia serta pelaksanaan urusan administrasi umum. Peran penting ini harus bersinergi untuk mendukung dalam pencapaian tujuan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di provinsi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM. Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas : **“Melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan”**

- Fungsi** :
- 1. Pengorganisasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;**
 - 2. Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, dan pemberian informasi hukum;**
 - 3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;**
 - 4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dibidang Keimigrasian dan bidang Masyarakat;**
 - 5. Penguatan dan pelayanan HAM untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM;**
 - 6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.**

Susunan organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat terdiri atas 4 Divisi, dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Divisi Administrasi	
Tugas	Fungsi
Melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah dibidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengorganisasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah. 2. Pengorganisasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan. 3. Pengorganisasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi. 4. Pengorganisasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan

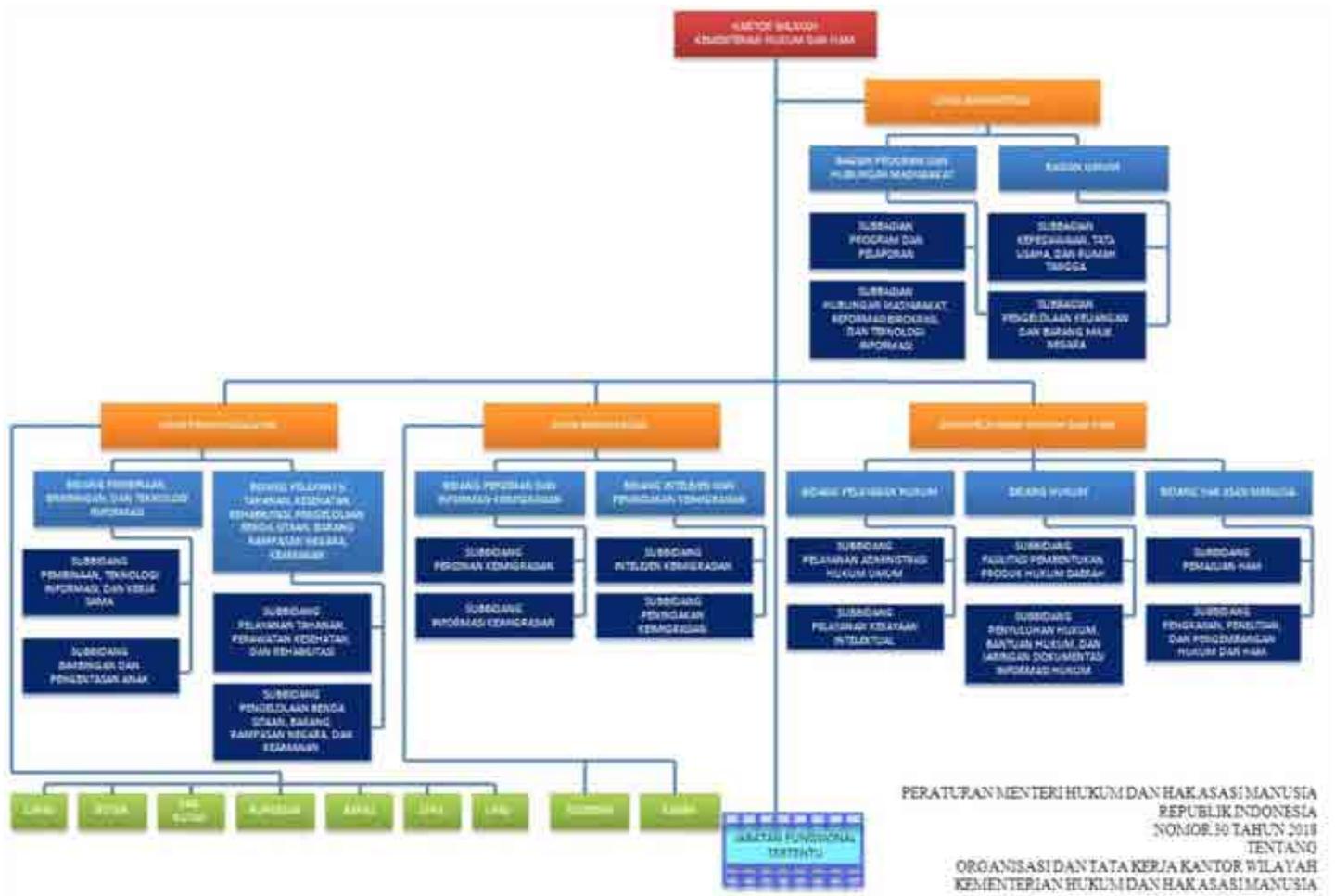
	<p>barang milik negara.</p> <p>5. Pengorganisasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi.</p> <p>6. Pengorganisasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah.</p> <p>7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.</p>
2. Divisi Pemasyarakatan	
Tugas	Fungsi
Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah.	<p>1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis dibidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.</p> <p>2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.</p> <p>3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan.</p> <p>4. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksanan Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.</p>
3. Divisi Keimigrasian	
Tugas	Fungsi
Melaksanakan sebagian tugas	1. Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan

<p>Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah.</p>	<p>pelaksanaan tugas teknis dibidang perijinan, pemberian persetujuan perijinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.</p> <p>2. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang perijinan, pemberian persetujuan perijinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.</p> <p>3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian.</p> <p>4. Pengoorganisasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.</p>
<p>4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM</p>	
<p>Tugas</p>	<p>Fungsi</p>
<p>Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah.</p>	<p>1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis dibidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengorganisasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengorganisasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan dibidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya.</p> <p>2. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pelayanan administrasi hukum umum dan</p>

	<p>kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengorganisasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengorganisasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan dibidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya.</p> <p>3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>4. Pengoorganisasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.</p>
--	---

Tabel 1.1. Tugas dan Fungsi Divisi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dapat dilihat seperti gambar dibawah ini:



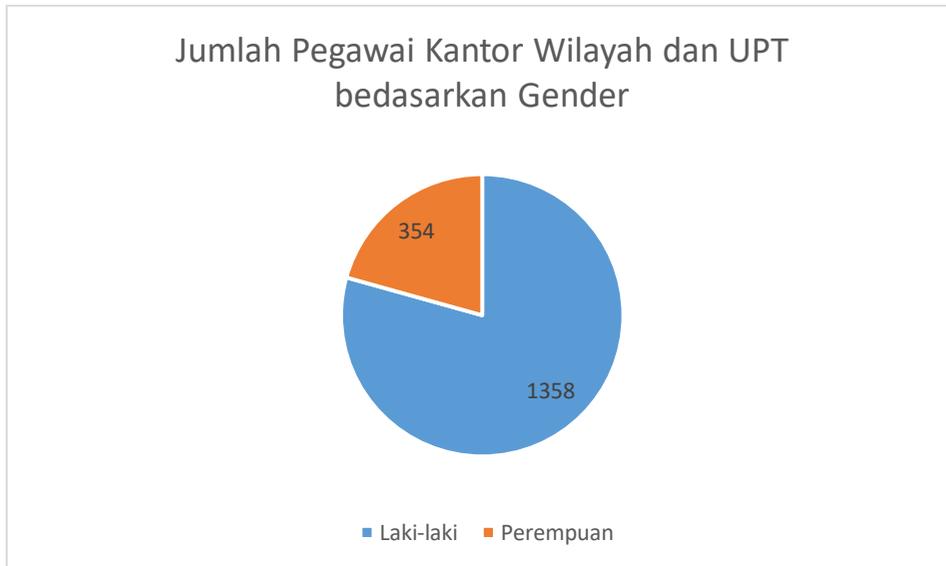
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi. Data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat per tanggal 31 Desember 2023 menunjukkan terdapat 1.712 pegawai yang tersebar di 27 Satuan Kerja termasuk Kantor Wilayah, dan Kantor Wilayah sendiri memiliki 185 pegawai yang tersebar di empat divisi. Berdasarkan data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) tersebut, persebaran jumlah pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, berdasarkan gender, divisi/satuan kerja, golongan, dan jabatan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

Jumlah Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah dan UPT Berdasarkan Gender

Jumlah Pegawai Kantor dan UPT berdasarkan Gender	
Laki-laki	1.358
Perempuan	354
TOTAL	1.712

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender

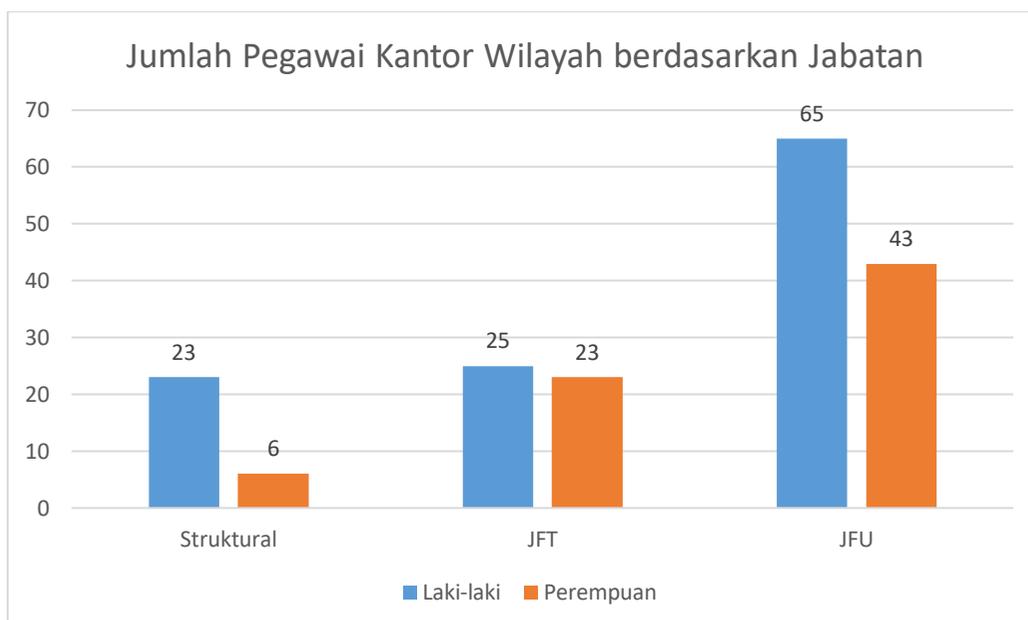


Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender

Jumlah Pegawai Kantor Wilayah berdasarkan Jabatan

Jabatan	Laki-Laki	Perempuan
Struktural	23	6
JFT	25	23
JFU	65	43
Jumlah	113	72

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Kantor Wilayah Berdasarkan Jabatan

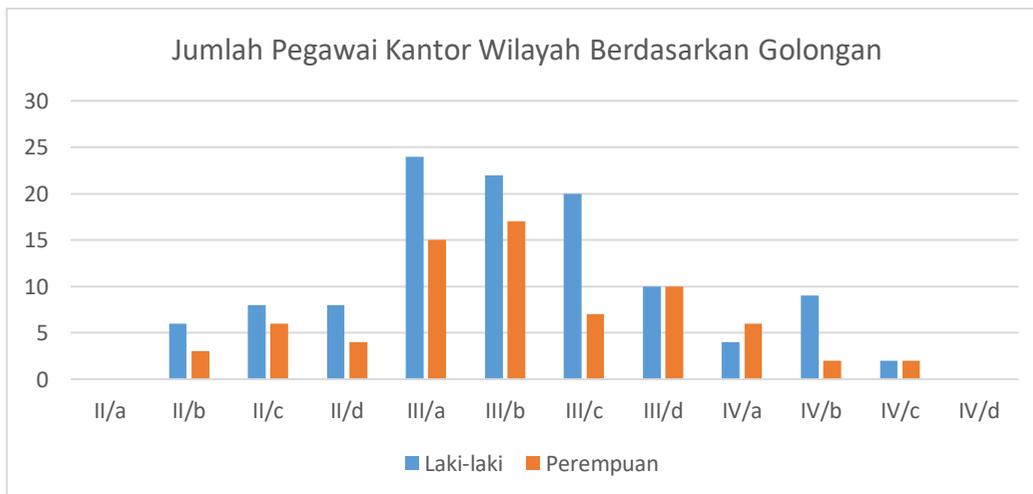


Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Kantor Wilayah Berdasarkan Jabatan

Jumlah Pegawai Kantor Wilayah Berdasarkan Golongan

Golongan	Laki-Laki	Perempuan
II/a	-	-
II/b	6	3
II/c	8	6
II/d	8	4
III/a	24	15
III/b	22	17
III/c	20	7
III/d	10	10
IV/a	4	6
IV/b	9	2
IV/c	2	2
IV/d	-	-
Total	113	72

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Kantor Wilayah Berdasarkan Golongan

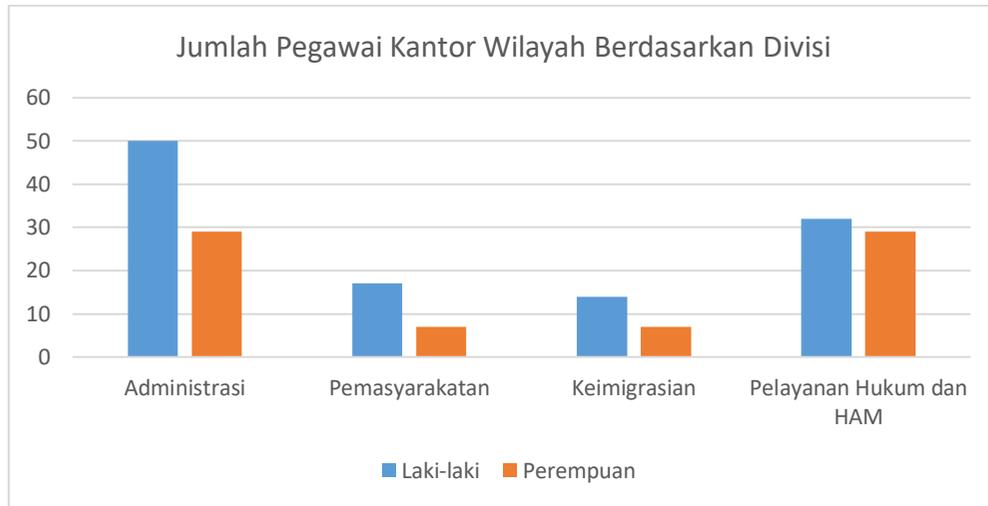


Gambar 1.4 Jumlah Pegawai Kantor Wilayah Berdasarkan Golongan

Jumlah Pegawai Kantor Wilayah Berdasarkan Divisi

Divisi	Laki-Laki	Perempuan
Administrasi	50	29
Pemasyarakatan	17	7
Keimigrasian	14	7
Pelayanan Hukum dan HAM	32	29
Jumlah	113	72

Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Kantor Wilayah Berdasarkan Divisi



Gambar 1.5 Jumlah Pegawai Kantor Wilayah Berdasarkan Divisi

Jumlah Pegawai Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah

No	Satuan Kerja	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Kantor Wilayah Kalimantan Barat	113	72	185
2	Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pontianak	88	10	98
3	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB Sei.Raya Pontianak	60	14	74
4	Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak	19	55	74
5	Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singkawang	65	13	78
6	Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sintang	70	3	73
7	Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Ketapang	44	9	53
8	Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak	96	10	106
9	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mempawah	50	11	61
10	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sanggau	39	7	46
11	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Putussibau	39	1	40
12	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas	33	7	40
13	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang	37	4	41
14	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Landak	44	4	48

No	Satuan Kerja	Laki-laki	Perempuan	Total
15	Balai Pemasyarakatan Klas I Pontianak	37	16	53
16	Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas	18	6	24
17	Balai Pemasyarakatan Kelas II Sintang	24	10	34
18	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak	65	24	89
19	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang	70	13	83
20	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sanggau	41	11	52
21	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas	59	5	64
22	Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau	37	1	38
23	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Ketapang	38	1	39
24	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong	63	17	80
25	Kantor Rupbasan Kelas I Pontianak	21	6	27
26	Kantor Rupbasan Kelas II Singkawang	20	4	24
27	Kantor Rupbasan Kelas II Sanggau	10	3	13
28	Kantor Rumah Detensi Imigrasi Pontianak	54	16	70
Jumlah		1.358	354	1.712

Tabel 1.6 Jumlah Pegawai Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah

Sebagai Kantor Wilayah yang membawahi Unit Pelaksana Teknis (Satuan Kerja) Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan Administrasi Hukum Umum di wilayah Kalimantan Barat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat berkewajiban untuk membina dan memberikan fasilitasi dibidang teknis dan administrasi. Terdapat 27 Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, sebagai berikut:

No	Satuan Kerja
1	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak
2	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB Sei.Raya Pontianak
3	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak

No	Satuan Kerja
4	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang
5	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang
6	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ketapang
7	Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak
8	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mempawah
9	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sanggau
10	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Putussibau
11	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas
12	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang
13	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Landak
14	Balai Pemasyarakatan Kelas I Pontianak
15	Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas
16	Balai Pemasyarakatan Kelas II Sintang
17	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak
18	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang
19	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sanggau
20	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas
21	Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau
22	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Ketapang
23	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong
24	Kantor Rupbasan Kelas I Pontianak
25	Kantor Rupbasan Kelas II Singkawang
26	Kantor Rupbasan Kelas II Sanggau
27	Rumah Detensi Imigrasi Pontianak

Tabel 1.7 Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat

C. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah T.A 2023 ini dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang

baik dan bersih (*good governance and clean government*). Disamping itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan Informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.
2. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi penilaian kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.
3. Sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat secara berkelanjutan.

D. Aspek Strategis

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan rincian tugas dan fungsi sesuai dengan poin huruf B, sehingga dapat disimpulkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai aspek strategis sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam hal perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia serta pelaksana pembinaan hukum nasional dengan kewenangan mengelola organisasi secara mandiri berdasarkan dasar aturan yang telah ditetapkan baik pada level nasional maupun daerah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat sebagai salah satu satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di wilayah, mempunyai aspek strategis yang sama pada level pemerintahan daerah di Provinsi Kalimantan Barat.

E. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat selama periode Tahun 2023 , terdapat beberapa isu strategis organisasi, antara lain :

No	Isu Strategis
Divisi Administrasi	
1	Tumbuhnya budaya untuk mengisikan survei pada aplikasi 3AS Survey Management sehingga data yang diperoleh semakin reliable (handal dan dapat dipertanggungjawabkan). Hal tersebut dapat dicapai dengan partisipasi pimpinan yang semakin aktif dalam monitoring terhadap pengisian survei.
Divisi Keimigrasian	
1	Pada layanan paspor, untuk pendaftarannya telah menggunakan aplikasi m-Paspor sehingga masyarakat pengguna layanan dapat langsung datang ke kantor imigrasi untuk pengurusan paspor sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada aplikasi m-Paspor dan masyarakat pengguna layanan tidak memerlukan waktu lama pada saat mengurus paspor di kantor imigrasi. Namun pada kenyataannya masyarakat masih kesulitan untuk mengakses layanan tersebut disebabkan lamanya waktu tunggu untuk mendapatkan

No	Isu Strategis
	<p>jadwal antrian pengurusan paspor. Hal tersebut diperparah dengan tidak meratanya pembangunan infrastruktur internet terutama di daerah Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki luas area yang sangat luas, sehingga masyarakat yang berada pada daerah-daerah terpencil dan tidak termasuk dalam kriteria kelompok yang mendapatkan layanan khusus kesulitan untuk mengakses layanan pembuatan paspor melalui aplikasi m-Paspor.</p>
2	<p>Kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah sekitar perbatasan Malaysia sangat tergantung pada layanan perlintasan antara Indonesia – Malaysia. Sebelum Covid-19, pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat dengan perlintasan tradisional yang diperuntukkan bagi warga kedua negara yang berada di wilayah sekitar perbatasan dengan menggunakan Pas Lintas Batas (PLB). Namun, semenjak Covid-19 sampai dengan sekarang pemerintah Malaysia menutup perlintasan tradisional di PLBN Entikong. Hal tersebut sangat mempengaruhi kehidupan Masyarakat sekitar perbatasan entikong, karena masyarakat di perbatasan tersebut secara ekonomi banyak yang memiliki pekerjaan ataupun yang berdagang di Malaysia dan secara social banyak yang memiliki keluarga di wilayah Malaysia, hal ini menimbulkan potensi perlintasan illegal melalui “jalan tikus” di sekitar wilayah Entikong.</p>
Divisi Pemasarakatan	
1	<p>Kondisi <i>overcrowded</i> pada Lapas dan Rutan dengan mayoritas Tahanan dan Narapidana Narkotika sehingga upaya pembinaan yang dilakukan tidak maksimal. Kondisi Overcrowded yang terjadi mencapai hampir 500% menyebabkan kondisi UPT Pemasarakatan tidak ideal untuk kegiatan pembinaan bahkan beresiko terdapat kondisi keamanan dan ketertiban (Kamtib). Dari seluruh Tahanan dan Narapidana yang tersangkut kasus narkotika jumlahnya mencapai 80% dari seluruh jumlah Tahanan dan Narapidana (Divisi Pemasarakatan agar mempersiapkan data jumlah Tahanan dan Narapidana)</p>
2	<p>Pengguna Layanan Penyimpanan Barang di Rupbasan adalah Aparat Penegak Hukum dimana ekspektasi dari pengguna layanan adalah mudahnya koordinasi pada saat proses penyimpanan barang sitaan serta monitoring status barang sitaan. Namun yang saat ini terjadi adalah menumpuknya barang sitaan akibat kurangnya koordinasi antara APH dengan pihak Rupbasan. Selain itu monitoring yang dilakukan secara manual juga memperburuk kondisi tersebut.</p>
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	
1	<p>Layanan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi, Harapan masyarakat dari layanan tersebut adalah akses pelayanan hukum serta bantuan hukum yang dapat menjangkau masyarakat miskin yang tersangkut masalah hukum dan memerlukan bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Namun minimnya jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) kepada masyarakat (baru terdapat 5 OBH untuk 14 Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat). Dengan jumlah OBH yang sedikit tentu saja</p>

No	Isu Strategis
	menimbulkan masalah pemerataan Layanan Bantuan Hukum Litigasi maupun Non Litigasi bagi masyarakat umum di salah satu provinsi terluas di Indonesia. Hal tersebut juga menimbulkan polemik pada UPT Pemasarakatan yang membutuhkan OBH untuk tahanan yang tergolong masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan hukum dalam menghadapi proses peradilan.
2	Salah satu kendala yang menjadi hambatan dari OBH untuk mendaftar adalah masalah minimnya anggaran, terutama untuk menangani kasus yang berada diluar domisilinya
3	Layanan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Aksi HAM Daerah, Sebagian besar Pemerintah Daerah selaku objek dalam pembentukan Kabupaten/Kota Peduli HAM belum memahami bahwa dengan predikat kabupaten/kota peduli HAM Daerah dapat meningkatkan citra positif bagi daerahnya. Ketidapkahaman tersebut menjadi kendala karena kabupaten/kota yang tidak memahami urgensi dari pengumpulan data dukung Kabupaten/Kota peduli HAM Daerah menjadi lambat
4	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat berhasil meraih predikat unit kerja dengan Pelayanan publik berbasis HAM
5	Satker AHU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat berhasil meraih peringkat satu sebagai satuan kerja dengan Nilai IKPA terbaik kategori Pagu 500 juta s/d 2.5 Milyar pada semester I tahun 2023

Tabel 1.8 Isu Strategis di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat

F. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sub Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sub Bab ini menyajikan tugas, fungsi dan struktur organisasi secara lengkap

C. Maksud dan Tujuan

Sub Bab ini menyajikan maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja

D. Aspek Strategis

Sub Bab ini menguraikan aspek yang menjadikan pentingnya keberadaan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

E. Isu Strategis

Sub Bab ini menguraikan isu strategis organisasi yang dapat menghambat pencapaian kinerja

F. Sistematika Laporan

Sub Bab ini menyajikan urutan dalam penyusunan laporan kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sub Bab ini menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan atau sasaran strategi dalam upaya pencapaian kinerja

B. Perjanjian Kinerja

Sub Bab ini menyajikan perjanjian kinerja yaitu lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub Bab ini menguraikan capaian kinerja Organisasi setiap indikator yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai dengan penjelasan dan analisa capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja serta perbandingan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

C. Capaian Kinerja Anggaran

Sub Bab ini menguraikan tentang capaian kinerja anggaran yang dihasilkan oleh dua variabel yaitu nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

D. Capaian Kinerja Lainnya

Sub Bab ini menguraikan capaian kinerja yang dihasilkan dari aplikasi E-Performance Kementerian Hukum dan HAM, Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM, E- Monev Bappenas serta Kegiatan Prioritas Nasional.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Sub Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi

B. Saran

Sub Bab ini menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

“Tetap optimis dan tetaplah semangat dalam mewujudkan Kemenkumham yang semakin “PASTI” Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif menuju Indonesia Maju”



Komjen Pol. (Purn.) Andap Budhi Revianto

Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

A. Rencana Strategis

B. Perjanjian Kinerja



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 di bawah kepemimpinan Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) misi pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan Misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

- 1) Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
- 2) Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- 3) Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
- 4) Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang menyederhanakan eselonisasi; dan
- 5) Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah: "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam

Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

2. Misi

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

- 1) Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
- 2) Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
- 3) Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum, dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 4) Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
- 5) Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- 6) Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan; dan
- 7) Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik

Dan sebagai salah satu Satuan Kerja dibawah Kementerian Hukum dan HAM RI, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat melaksanakan Visi dan Misi tersebut diatas.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi dan misi maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah serta terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2) Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang prima;
- 3) Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, memenuhi hak-hak warga binaan masyarakatan serta membentuk Warga Binaan Masyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh

lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;

- 4) Terlindunginya hak asasi manusia;
- 5) Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
- 6) Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara; dan
- 7) Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. Tata Nilai

1) Tata Nilai PASTI

Dalam mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan, setiap ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengacu pada kode etik dan kode perilaku dalam tata nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) yang meliputi:

- a) Profesional berarti mampu menyelesaikan tugas dengan terpuji, tuntas sesuai dengan kompetensi atau keahlian dan berintegritas untuk mencapai hasil prima melalui kerja sama;
- b) Akuntabel berarti mampu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan perilaku, dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil;
- c) Sinergi berarti mampu bekerja sama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas;
- d) Transparan berarti mampu menyajikan data dan informasi terkait kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasilnya serta menjamin aksesibilitas publik terhadap data dan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e) Inovatif berarti mampu menciptakan dan mengembangkan inovasi melalui inisiatif dan kreativitas untuk melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

2) Tata Nilai *Core Values* ASN BerAKHLAK

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya core values ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN:

- a) Berorientasi Pelayanan yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti.
- b) Akuntabel yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- c) Kompeten yakni meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- d) Harmonis yakni menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- e) Loyal yakni memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
- f) Adaptif yakni cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif.
- g) Kolaboratif yakni memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

5. Sasaran Strategis

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan secara tepat, terukur dan akuntabel, maka disusun sasaran strategis yang memiliki indikator kinerja utama dengan target yang harus dicapai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024, terdapat 8 (delapan) Sasaran Strategis dengan 21 Indikator Kinerja Utama Kementerian Hukum dan HAM yakni:

- 1) Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan;
- 2) Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM;
- 3) Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- 4) Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
- 5) Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
- 6) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
- 7) Meningkatkan kompetensi strategis sumber daya manusia di Bidang Hukum dan HAM;
- 8) Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien

6. Upaya Pencapaian Kinerja

Dalam rangka upaya pemenuhan target capaian kinerja, Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat melaksanakan beberapa upaya/ strategi untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi selama tahun 2023 sebagai berikut :

No	Upaya Pencapaian Kinerja
Divisi Administrasi	
1	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat beserta jajaran melaksanakan kegiatan peningkatan Capacity Building dan monitoring evaluasi secara berkala untuk menjaga target pencapaian kinerja setiap bulannya.
Divisi keimigrasian	
1	Melakukan upaya penambahan quota pelayanan paspor dengan menambah jumlah unit layanan keimigrasian pada Mal Pelayanan Publik serta Unit Kerja Keimigrasian untuk mengurangi waktu tunggu jadwal antrian paspor. Selain itu sedang diupayakan untuk menambah jumlah UPT Imigrasi pada Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat
2	Melakukan koordinasi kepada pihak Keimigrasian Malaysia untuk membuka kembali akses Perlintasan Tradisional di wilayah Entikong melalui forum SOSEK MALINDO (Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia). Namun belum ada kejelasan dari pihak Keimigrasian Malaysia dengan mengatakan bahwa pada saat ini izin tersebut masih menunggu keputusan dari Diraja Malaysia.
Divisi Pemasarakatan	
1	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat mengusulkan pembangunan Lembaga Pemasarakatan Khusus Narkotika di Kalimantan Barat agar dapat melakukan program pembinaan bagi Tahanan dan Narkotika
2	Langkah-langkah antisipasi yang saat ini dilakukan adalah mendorong Unit Eselon I untuk membuat mekanisme dengan aturan tertulis terkait dengan tindak lanjut barang sitaan yang terlalu lama disimpan pada Rupbasan serta mendorong diciptakannya sistem monitoring yang dapat mempermudah pemantauan terhadap status barang sitaan
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	
1	Pada saat ini Divisi Pelayanan Hukum dan HAM berupaya untuk mendorong OBH yang belum terdaftar secara resmi agar mendaftar pada Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat dapat menambah jumlah OBH yang ada saat ini. Selain itu Divisi Pelayanan Hukum dan HAM berupaya melakukan koordinasi yang intens dengan Divisi Pemasarakatan untuk mendorong tahanan dan narapidana mendapatkan akses Layanan Bantuan Hukum secara memadai
2	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat saat ini sedang mencari formulasi bagaimana program Bantuan Hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi dapat diminati oleh OBH yang ada di Kalimantan

No	Upaya Pencapaian Kinerja
	Barat
3	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM berupaya untuk memperkuat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal pemahaman dan pengumpulan data dukung agar OPD setempat bisa memperoleh predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM. Selain itu diharapkan koordinasi yang intens dilakukan dapat mendorong Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Aksi HAM Daerah

Tabel 2.1 Upaya Pencapaian Kinerja per Divisi

B. Perjanjian Kinerja

Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja pada tahun 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat memperoleh anggaran sebesar Rp.25.463.692.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) yang dituangkan dalam perjanjian kinerja namun dengan adanya Tambahan Anggaran Tahun 2023 terdapat perubahan pada total anggaran menjadi Rp.34.084.446.000,- (Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan pengalokasian pada setiap sasaran kinerja sebagai berikut:

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (dalam ribuan)
1. Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3.1 Indeks	Dukungan Manajemen	Rp. 18.497.770
2. Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3.25 Indeks	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.701.679
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3.13 Indeks		
3. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah	82 Indeks	Program pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 674.252
4. Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang over staying	90%		
	Persentase tahanan yang memperoleh	90%		

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (dalam ribuan)
	layanan Penyuluhan Hukum			
	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%		
5. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang aman dan tertib	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	70%		
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%		
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%		
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85%		
	Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	17%		
	Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%		
	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%		
6. Meningkatnya Pelayanan pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%		
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	80%		
7. Meningkatnya Pelayanan	Persentase klien usia produktif yang	80%		

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (dalam ribuan)
pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	memperoleh atau melanjutkan pekerjaan diluar lembaga			
	Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%		
	Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%		
8. Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%		
	Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%		
	Persentase anak yang memperoleh hak Pengasuhan sesuai standar	90%		
	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%		
9. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan masyarakatan dibidang keamanan dan ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%		
	Persentase pencegahan gangguan Kamtib	80%		
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan Kamtib	85%		
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan Kamtib secara tuntas	80%		
10. Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban diwilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%		
	Persentase gangguan Kamtib yang dapat dicegah	80%		
	Persentase kepatuhan	80%		

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (dalam ribuan)
	dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan Kamtib			
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan Kamtib secara tuntas	80%		
11. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%		
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%		
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%		
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%		
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%		
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%		
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif	80%		

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (dalam ribuan)
	(berhasil sembuh) Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna /korban penyalahgunaan narkotika	27%		
12. Terwujudnya Layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 5.389.991
13. Meningkatnya efektifitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah	86%		
14. Terselenggaranya pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi Kantor wilayah	133 Layanan	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 Lokus		
15. Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	Persentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan pencegahan pelanggaran KI yang dilakukan oleh kantor wilayah	2 Lokus		
	Kegiatan Pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah	1 Laporan		
16. Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian pengembangan hukum dan hak	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum	80%	Program Dukungan Manajemen	

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (dalam ribuan)
asasi manusia	dan hak asasi manusia			
	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku		
17. Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah	80%	Program Pembentukan Regulasi	
18. Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	6 Orang		
19. Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/ analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan		
20. Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%		
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 Indeks		
	Persentase desa/ kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%		
	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/ sistem integrasi JDIHN	20%		

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (dalam ribuan)
21. Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	
	Jumlah Kab/ Kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah		
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah		
22. Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah	3 Rekomendasi		
22 Sasaran Kinerja	60 Indikator Kinerja	61 Target	4 Program	Rp. 25.463.692

Tabel 2.2 Alokasi Anggaran Sasaran Kinerja



10 PESAN

INSPEKTUR JENDERAL KEMENKUMHAM KE-16



Ir. Razilu, M.Si., CGCAE.

Inspektor Jenderal Kemenkumham Ke-16

- 1** Libatkan Allah Yang Maha Kuasa pada setiap karya, kerja, bahkan dalam setiap urusanmu.
- 2** Laksanakan pengabdian dengan ikhlas, jujur, dan berintegritas serta tidak menyalahgunakan kewenangan.
- 3** Pastikan setiap karya dan kerjamu selalu bermanfaat seraya terus torehkan berbagai prestasi demi kebanggaan organisasi.
- 4** Patri rasa bangga, rendah hati, dan empati dalam memberikan pelayanan.
- 5** Terus berinovasi dan kembangkan kreativitas, sehingga mampu beradaptasi menghadapi setiap perubahan.
- 6** Hargai setiap orang dan ciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk mewujudkan kedamaian serta keharmonisan dalam berorganisasi.
- 7** Tingkatkan kapasitas dan kompetensi sehingga mampu melakukan perbaikan tiada henti dalam pelayanan publik yang berkualitas
- 8** Bersyukur dengan apa yang ada serta jalani hidup sederhana secara halal untuk mengundang ketenangan dan kebahagiaan.
- 9** Sikapi setiap keberhasilan yang sedang tertunda dengan sangka baik dan rasa optimis untuk kesuksesan selanjutnya.
- 10** Lakukan pengorbanan sejati dengan menaati setiap peraturan dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela demi keagungan organisasi.



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Capaian Kinerja Anggaran
- D. Capaian Kinerja Lainnya

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi instansi secara terukur sejalan dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Dalam mengukur keberhasilan/kegagalan atas pelaksanaan suatu program/kegiatan perlu dilakukan pengukuran kinerja. Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja harus didasarkan pada indikator kinerja, sehingga dapat menunjukkan *impact/outcome* dari setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan pada masing-masing Sasaran Kegiatan. Dari hasil pengukuran capaian setiap Indikator Kinerja Kegiatan menghasilkan nilai pencapaian Sasaran Kegiatan.

Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat ditampilkan sesuai dengan pedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01-PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi
Divisi Administrasi							
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	1 Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	3,1 Indeks	3,78 Indeks	121,93%	Rp 25.523.494.000	Rp 25.389.298.089
Divisi Pemasyarakatan							
1	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah	1 Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	82 Indeks	84,7 Indeks	103%	Rp 336.310.000	Rp 332.768.191
2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai standar	1 Persentase menurunnya Tahanan yang overstaying	90%	84,5%	94%	Rp 109.352.000	Rp 107.148.507
		2 Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%	111%	Rp 109.352.000	Rp 107.148.507
		3 Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	90%	100%	111%	Rp 109.352.000	Rp 107.148.507

3	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan, dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	100%	142%	Rp 109.352.000	Rp 107.148.507
		2	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%	100%	Rp 109.352.000	Rp 107.148.507
		3	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	100%	117%	Rp 109.352.000	Rp 107.148.507
		4	Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85%	100%	117%	Rp 109.352.000	Rp 107.148.507
		5	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh, dan disiplin	17%	100%	588%	Rp 109.352.000	Rp 107.148.507
		6	Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	55%	177%	Rp 109.352.000	Rp 107.148.507
		7	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	100%	138%	Rp 109.352.000	Rp 107.148.507
4	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	96%	120%	Rp 336.310.000	Rp 332.768.191
		2	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%	84%	105%	Rp 336.310.000	Rp 332.768.191
5	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien Pemasyarakatan dan pemenuhan Hak Pendidikan klien Anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%	68%	113%	Rp 109.352.000	Rp 107.148.507
		2	Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	26%	153%	Rp 109.352.000	Rp 107.148.507
		3	Persentase klien Anak yang terpenuhi Hak Pendidikannya	35%	51%	142%	Rp 109.352.000	Rp 107.148.507
6	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%	100%	123%	Rp 109.352.000	Rp 107.148.507
		2	Persentase Anak yang memperoleh Hak Integrasi	100%	100%	100%	Rp 109.352.000	Rp 107.148.507
		3	Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%	100%	111%	Rp 109.352.000	Rp 107.148.507
		4	Persentase Anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%	100%	111%	Rp 109.352.000	Rp 107.148.507
7	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1	Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%	100%	111%	Rp 336.310.000	Rp 332.768.191
		2	Persentase pencegahan gangguan Kamtib	80%	100%	125%	Rp 228.590.000	Rp 204.437.801

		3	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	117%	Rp 228.590.000	Rp 204.437.801
		4	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	125%	Rp 228.590.000	Rp 204.437.801
8	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	1	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	111%	Rp 336.310.000	Rp 332.768.191
		2	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	125%	Rp 228.590.000	Rp 204.437.801
		3	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	117%	Rp 228.590.000	Rp 204.437.801
		4	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	125%	Rp 228.590.000	Rp 204.437.801
9	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	80%	100%	125%	Rp 109.352.000	Rp 107.148.507
		2	Persentase Tahanan /Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106%	Rp 109.352.000	Rp 107.148.507
		3	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%	103%	Rp 109.352.000	Rp 107.148.507
		4	Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	125%	Rp 109.352.000	Rp 107.148.507
		5	Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%	Rp 109.352.000	Rp 107.148.507
		6	Persentase tahanan/ narapidana/ Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%	Rp 109.352.000	Rp 107.148.507
		7	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%	125%	Rp 109.352.000	Rp 107.148.507

		8	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika	27%	36%	133%	Rp 109.352.000	Rp 107.148.507
Divisi Keimigrasian								
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 Indeks	3,94 Indeks	121%	Rp 2.067.115.000	Rp 2.064.374.206
		2	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 Indeks	3,55 Indeks	113%	Rp 634.544.000	Rp 605.354.250
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM								
1	Terwujudnya Layanan Adminitrasi Hukum Umum di Wilayah yang Berkepastian Hukum	1	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	7,27%	145,4%	Rp 1.502.932.000	Rp 1.502.651.955
2	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas MKNW, MPW dan MPD	1	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%	100%	116%	Rp 923.750.000	Rp 922.958.776
3	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual Yang Berkualitas Di Kantor Wilayah	1	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	170 Orang	280	164%	Rp 649.375.000	Rp 649.258.447
		2	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual Oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	4 Lokus	200%	Rp 488.721.000	Rp 488.592.578
4	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%	100%	Rp 97.948.000	Rp 97.927.300
		2	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	5 Lokus	250%	Rp 48.719.000	Rp 48.218.921
		3	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan	3 Laporan	150%	Rp 97.948.000	Rp 97.927.300
5	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	1	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%	100%	125%	Rp 136.785.000	Rp 133.443.411
		2	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	100%	Rp 6.828.000	Rp 6.828.000
6	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	1	Persentase Rancangan Perda Yang Difasilitasi Oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	100%	125%	Rp 299.500.000	Rp 299.404.950
7	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	1	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	20 Orang	50 Orang	250%	Rp 75.500.000	Rp 75.447.540

8	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	1	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	Rp 147.311.000	Rp 147.014.867
9	Meningkatnya Kesadaran Hukum Serta Terpenuhinya Akses Keadilan Dan Informasi Hukum Masyarakat Di Wilayah	1	Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi Yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan	80%	92%	115%	Rp 325.000.000	Rp 323.000.000
		2	Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi Yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan	80%	87%	109%	Rp 594.800.000	Rp 568.700.000
		3	Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum	76,75 Indeks	85,1 Indeks	111%	Rp 139.900.000	Rp 139.845.018
		4	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	100%	143%	Rp 117.426.000	Rp 116.964.816
		5	Persentase Website Anggota JDHNN Aktif Yang Terintegrasi Dengan Portal/Sistem Integrasi JDHNN	20%	20%	100%	Rp 99.564.000	Rp 99.546.598
10	Meningkatnya Pemerintah Daerah Yang Melaksanakan Program Aksi HAM	1	Jumlah Pemerintah Daerah Yang Melaksanakan Program Aksi HAM	3 Instansi	13 Instansi	650%	Rp 136.419.000	Rp 136.082.900
		2	Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	2 Instansi	4 instansi	200%	Rp 55.887.000	Rp 55.871.000
		3	Jumlah Instansi Pemerintah Yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi Dan Penguatan HAM Melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM	1 Instansi			Rp 14.078.000	Rp 13.628.000
11	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	1	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	2 Rekomendasi	67%	Rp 36.498.000	Rp 36.498.000

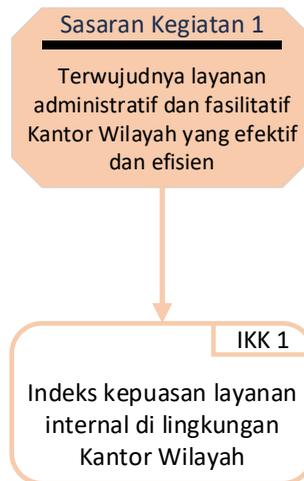
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2023

1. Divisi Administrasi

Capaian kinerja pada Divisi Administrasi diukur oleh satu Sasaran Kegiatan yaitu Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien dengan satu Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah.

Sasaran Kegiatan I
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah” dengan target 3,1 Indeks.



Gambar 3.1 Sasaran Kegiatan 1 dan Indikator Kinerja Kegiatan Divisi Administrasi

• **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks	3,78 Indeks	121,93% ----- $\frac{3,78}{3,1} \times 100\%$

Tabel 3.2 Capaian Target dan Realisasi SK 1 dan IKK 1 Tahun 2023 Div. Administrasi

Nilai indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah merupakan nilai rata-rata dari penjumlahan indeks kualitas layanan setiap bulan yang datanya diperoleh dari Aplikasi Survei 3AS.

$$\begin{aligned} &\text{Indeks Kepuasan Layanan Internal} \\ &= \frac{3,79 + 3,76 + 3,76 + 3,77 + 3,79 + 3,77 + 3,77 + 3,78 + 3,84 + 3,76 + 3,81 + 3,79}{12} \\ &= 3,78 \end{aligned}$$

Realisasi indeks kepuasan layanan internal melebihi target yang telah ditentukan maka dapat diartikan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah dapat dilaksanakan dengan baik dan memuaskan.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan layanan internal	3,1 Indeks	3,77 Indeks	121,61%	3,1 Indeks	3,78 Indeks	121,93%

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
di lingkungan Kantor Wilayah						

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 1 dan IKK 1 Div. Administrasi Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2023 dan 2022, realisasi “Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah” mengalami peningkatan sebesar 0,01 indeks.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
3,1	3,1	3,1	3,1

Tabel 3.4 Rencana Strategis SK 1 dan IKK 1 Div. Administrasi

Berdasarkan hasil perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra, realisasi “Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah” selalu melebihi target yang ditetapkan pada Renstra.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tidak ada standar nasional yang secara resmi mengatur “Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah”. Standar tersebut dapat bervariasi antar instansi.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan Capaian Kinerja ini, merupakan hasil upaya Kantor Wilayah dalam peningkatan pelayanannya, baik dalam sistem anti korupsi, pengembangan SDM, perencanaan anggaran, dan penegakan aturan/norma.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan capaian IKK “Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah” adalah:

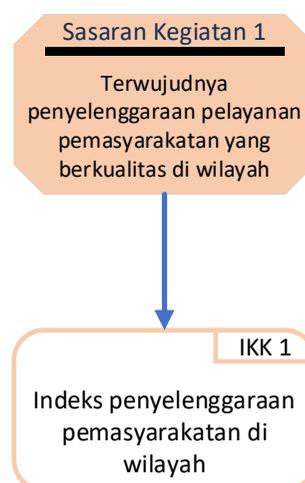
- a. Penguatan Internal melalui Capacity Building yang bertujuan meningkatkan kompetensi mengenai reformasi birokrasi agar mampu menunjang kebutuhan tugas dan fungsi dalam berkinerja;
- b. Membuat 38 Nota Kesepahaman (MoU) dan 135 Perjanjian Kerja Sama terhadap *stakeholder* terkait yang bertujuan untuk mendukung dan memudahkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal;
- c. Melaksanakan Penyerapan Anggaran yang efektif dan efisien sesuai dengan Rencana Penyerapan Dana sehingga program-program yang telah disusun pada tahun sebelumnya dapat terlaksana dengan baik;
- d. Memperkuat sistem anti korupsi (Zona Integritas) dengan cara menganjurkan seluruh pegawai melaksanakan tugasnya dalam memberikan layanan harus sesuai aturan, tanpa pungutan liar, ataupun membedakan kesukuan. Selain itu terkait dengan proses penerimaan pegawai, promosi, dan kenaikan jabatan telah bersih dari KKN.

2. Divisi Pemasyarakatan

Capaian kinerja pada Divisi Pemasyarakatan diukur oleh 9 Sasaran Kegiatan dengan **37 Indikator** Kinerja Kegiatan. Indikator Kinerja Divisi Pemasyarakatan telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan dasar aturan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-01.PR.01.01 TAHUN 2022 Tentang Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Sasaran Kegiatan I
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah” memenuhi target dengan target 82 Indeks.



Gambar 3.2 Sasaran Kegiatan 1 dan Indikator Kinerja Kegiatan Divisi PAS

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	82 Indeks	84,7 Indeks	103% ----- $\frac{84,7\%}{82\%} \times 100\%$

Tabel 3.5 Capaian Target dan Realisasi SK 1 dan IKK 1 Tahun 2023 Div. PAS

Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah adalah indikator untuk mengukur kinerja (outcome) Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah dalam kerangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta

keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara.

Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah merupakan nilai rata-rata dari penjumlahan Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan, Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan, Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan, Indeks Pelayanan Tahanan, Indeks Pengelolaan Basan Baran, Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana, Indeks Pemenuhan Hak Narapidana, Indeks Pembinaan Khusus Anak, Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan.

$$IPPW = \frac{A + B + C + D + E + F + G + H + I}{9} \times 100\%$$

Keterangan :

IPPW = Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

A = Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan

B = Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan

C = Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan

D = Indeks Pelayanan Tahanan

E = Indeks Pengelolaan Basan Baran

F = Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana

G = Indeks Pemenuhan Hak Narapidana

H = Indeks Pembinaan Khusus Anak

I = Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan

$$IPPW = \frac{94 + 81 + 82,35 + 82 + 87 + 89 + 81 + 85 + 81}{9} \times 100\% = 84,7\%$$

Semua unsur terkait pelayanan pada masyarakat yang dinilai dengan indeks pada masing-masing indikator di Divisi Pemasarakatan dapat mencapai target sehingga dapat diartikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dan memuaskan. Sumber data perhitungan Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah adalah dari hasil survei Balitbangkumham, Laporan Bulanan satuan kerja, dan SDP dengan perhitungan melalui matriks indeks indikator.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks penyelenggaraan pemsarakatan di wilayah)	81 Indeks	82,35 Indeks	101%	82 Indeks	84,7 Indeks	103%

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 1 dan IKK 1 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2023 dan 2022, realisasi “Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah” mengalami peningkatan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
70%	80%	90%	100%

Tabel 3.7 Rencana Strategis SK 1 dan IKK 1 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra, realisasi “Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah” mengalami peningkatan sejalan dengan target Renstra yang semakin meningkat pada Tahun 2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran “Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Semua unsur terkait pelayanan pada masyarakat yang dinilai dengan indeks pada masing-masing indikator di Divisi Pemasyarakatan dapat mencapai target sehingga dapat diartikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dan memuaskan.

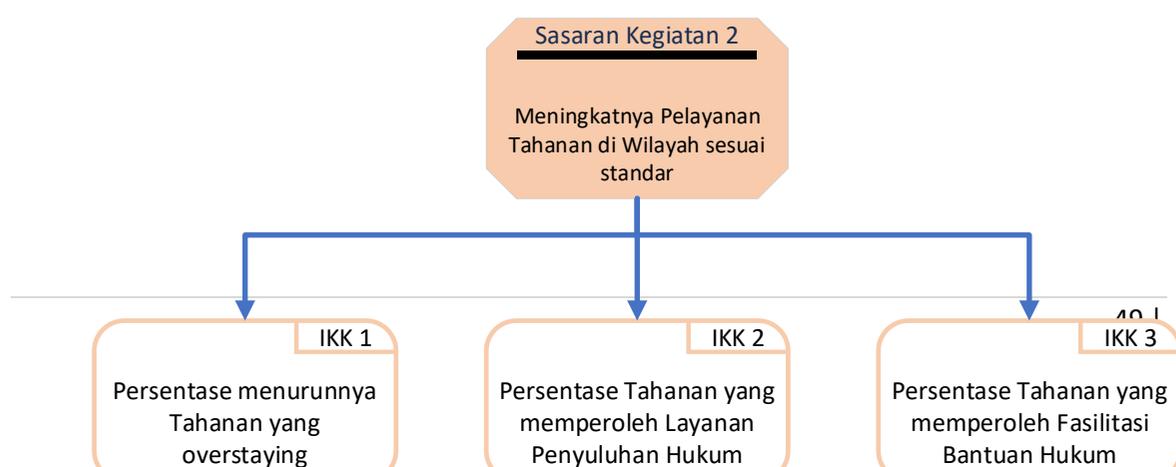
6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Diperlukan peningkatan terhadap setiap pelayanan kepada masyarakat.

Sasaran Kegiatan 2
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai standar

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

- “Persentase menurunnya Tahanan yang overstaying” memenuhi target dengan target 90%;
- “Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum” memenuhi target dengan target 90%; dan
- “Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum” memenuhi target dengan target 90%.



Gambar 3.3 Sasaran Kegiatan 2 dan Indikator Kinerja Kegiatan Divisi PAS

• **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase menurunnya Tahanan yang overstaying”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase menurunnya Tahanan yang overstaying	90%	90%	100% ----- $\frac{90\%}{90\%} \times 100\%$

Tabel 3.8 Capaian Target dan Realisasi SK 2 dan IKK 1 Tahun 2023 Div. PAS

Jumlah Tahanan *Overstaying* dibagi dengan Jumlah Tahanan dikali 100%.

$$\% \text{ Menurunnya Tahanan yang Overstaying} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Tahanan – Jumlah Tahanan *Overstaying*

B = Jumlah Tahanan

Perhitungan indikator berdasarkan data dari tabel berikut:

Nama UPT	Jumlah Tahanan <i>Overstaying</i>	Jumlah Tahanan
Rutan Kelas IIA Pontianak	32	1305
Rutan Kelas IIB Mempawah	62	
Rutan Kelas IIB Sambas	4	
Rutan Kelas IIB Bengkayang	0	
Rutan Kelas IIB Landak	1	
Rutan Kelas IIB Sanggau	30	
Rutan Kelas IIB Putussibau	32	
Total	130	

*Berdasarkan Rekap tanggal 12 Januari 2024

Tabel 3.9 Data Tahanan *Overstaying*

$$\% \text{ Menurunnya Tahanan yang Overstaying} = \frac{1305 - 130}{1305} \times 100\% = 90\%$$

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase menurunnya	80%	12%	15%	90%	90%	100%

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tahanan yang overstaying						

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 2 dan IKK 1 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2022 dan 2023, realisasi “Persentase capaian menurunnya Tahanan yang Overstaying” mengalami peningkatan yang signifikan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
70%	80%	90%	100%

Tabel 3.11 Rencana Strategis SK 2 dan IKK 1 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra, realisasi “Persentase capaian menurunnya Tahanan yang Overstaying” mengalami peningkatan sejalan dengan target Renstra yang semakin meningkat pada Tahun 2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran “Persentase menurunnya Tahanan yang overstaying” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan realisasi ini dikarenakan terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan APH dari instansi lain seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan Negeri. Selain itu administrasi yang baik oleh Pegawai Masyarakat dalam melaksanakan proses mutasi golongan register pada Sistem Database Masyarakat (SDP) di masing-masing Rutan sehingga data tahanan dapat diperbaharui secara cepat dan tepat.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Melaksanakan kerja sama sebaik mungkin dengan APH terkait, untuk mempercepat keluarnya putusan pengadilan (BA17), dan Perpanjangan dari instansi yang menahan, serta melakukan mutasi golongan register tahan secara cepat.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%	111% ----- $\frac{100\%}{90\%} \times 100\%$

Tabel 3.12 Capaian Target dan Realisasi SK 2 dan IKK 2 Tahun 2023 Div. PAS

Menghitung persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum. Hasil pengurangan dibagi dengan Jumlah Tahanan dikali 100%.

$$\% \text{ Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

B = Jumlah Tahanan

Jumlah tahanan berdasarkan data tanggal 10 Desember 2023 yaitu sejumlah 1388.

$$\begin{aligned} \% \text{ Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum} &= \frac{1388}{1388} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

- 2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%	100%	125%	90%	100%	111%

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 2 dan IKK 2 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2022 dan 2023, realisasi “Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum” konsisten berada di angka 100%.

- 3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
70%	80%	90%	100%

Tabel 3.14 Rencana Strategis SK 2 dan IKK 2 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra, realisasi capaian “Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum” konsisten selalu berada di angka 100% dan dimungkinkan sudah sesuai pula dengan target capaian di Tahun 2024.

- 4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran “Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan pencapaian target IKK ini yaitu atas kerja keras Penyuluhan Hukum kepada WBP yang dilaksanakan oleh JFT Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat dan dibantu oleh petugas Lapas/Rutan dalam melakukan penyuluhan sehingga dapat tercapai 100%.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Melakukan penyuluhan hukum kepada WBP di Lapas, Rutan dan LPKA secara rutin.

• **Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	100%	111% ----- $\frac{100\%}{90\%} \times 100\%$

Tabel 3.15 Capaian Target dan Realisasi SK 2 dan IKK 3 Tahun 2023 Div. PAS

Menghitung Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum. Hasil Pengurangan dibagi dengan Jumlah Tahanan dikali 100%.

$$\% \text{ Tahanan yang memperoleh Layanan Bantuan Hukum} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Tahanan yang memperoleh Layanan Bantuan Hukum

B = Jumlah Tahanan yang mengajukan Bantuan Hukum

$$\begin{aligned} \% \text{ Tahanan yang memperoleh Layanan Bantuan Hukum} &= \frac{122}{122} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%	15%	20%	90%	100%	111%

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 2 dan IKK 3 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2022 dan 2023, realisasi “Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum” mengalami lonjakan yang cukup signifikan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
70%	80%	90%	100%

Tabel 3.17 Rencana Strategis SK 2 dan IKK 3 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra, realisasi capaian “Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum” berada di angka 100% dan di mungkinkan sudah sesuai pula dengan target capaian di Tahun 2024.

- 4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional
 Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran “Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- 5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
 Keberhasilan pencapaian target IKK ini yaitu atas kerja keras Penyuluhan Hukum kepada WBP yang dilaksanakan oleh JFT Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat dan dibantu oleh petugas Lapas/Rutan dalam melakukan penyuluhan sehingga dapat tercapai 100%.
- 6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
 Memberikan bantuan hukum kepada WBP di Lapas, Rutan dan LPKA secara professional dengan semua tahanan yang mengajukan bantuan hukum.

Sasaran Kegiatan 3
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan, dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu:

- “Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian” memenuhi target dengan target 70%;
- “Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi” memenuhi target dengan target 99%;
- “Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi” memenuhi target dengan target 85%;
- “Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan” memenuhi target dengan target 85%;
- “Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh, dan disiplin” memenuhi target dengan target 17%;
- “Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi” memenuhi target dengan target 31%; dan
- “Persentase narapidana yang bekerja dan produktif” memenuhi target dengan target 72%.



Gambar 3.4 Sasaran Kegiatan 3 dan Indikator Kinerja Kegiatan Divisi PAS

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	100%	142% ----- $\frac{100\%}{70\%} \times 100\%$

Tabel 3.18 Capaian Target dan Realisasi SK 3 dan IKK 1 Tahun 2023 Div. PAS

Jumlah Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian dibagi jumlah Narapidana resiko tinggi yang mendapatkan program pembinaan dikali 100%.

$$\% \text{ Predikat Memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Narapidana yang memperoleh Nilai Baik dengan predikat Memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian

B = Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan

Jenis Kejahatan Resiko Tinggi	Jumlah
Bandar Narkoba	850
Terpidana Sumur hidup	29
terpidana Hukuman Mati	10
Jumlah	889

Tabel 3.19 Data Kejahatan Resiko Tinggi

$$\begin{aligned} \% \text{ Predikat Memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian} &= \frac{889}{889} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR	2022	2023
-----------	------	------

KINERJA KEGIATAN	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	95%	140%	70%	100%	142%

Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 3 dan IKK 1 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2022 dan 2023, realisasi “Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian” mengalami peningkatan 5%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
60%	65%	70%	75%

Tabel 3.21 Rencana Strategis SK 3 dan IKK 1 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra, realisasi capaian “Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian” berada di angka 100% dan di mungkinkan sudah sesuai pula dengan target capaian di Tahun 2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran “Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Kenaikan persentase narapidana yang memperoleh predikat memuaskan disebabkan karena Wali Pemasyarakatan pada Lapas/Rutan melaksanakan pembinaan dan penilaian kepada WBP sebagai hal yang rutin dan sudah termasuk dalam SOP.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Menambah jumlah Wali PAS dan koordinasi dengan petugas penjagaan untuk dapat membantu memonitor kegiatan Narapidana.

• **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%	$\frac{100\%}{99\%} \times 100\%$

Tabel 3.22 Capaian Target dan Realisasi SK 3 dan IKK 2 Tahun 2023 Div. PAS

Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi dibagi Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi Dikali 100%.

$$\% \text{ Predikat Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi

B = Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk Diusulkan Mendapatkan Hak Remisi

Remisi	Jumlah
Remisi Khusus Imlek	8
Remisi Khusus Waisak	157
Remisi Khusus Nyepi	1
Remisi Khusus Idul Fitri	2490
Remisi Khusus Natal	726
Remisi Anak	23
Remisi di atas 70 Tahun	2
Remisi Umum	3528
Jumlah	6935

Tabel 3.23 Data Jumlah Remisi Narapidana

$$\begin{aligned} \% \text{ Predikat Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi} &= \frac{6935}{6935} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	100%	100%	99%	100%	100%

Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 3 dan IKK 2 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2022 dan 2023, realisasi “Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi” konsisten berada di angka 100%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
------	------	------	------

97%	98%	99%	100%
-----	-----	-----	------

Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 3 dan IKK 2 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra, realisasi capaian “Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi” berada di angka 100% dan di mungkinkan sudah sesuai pula dengan target capaian di Tahun 2024.

- 4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional
 Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran “Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- 5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
 Petugas Registrasi pada Lapas dan Petugas Pelayanan pada Rutan memastikan setiap Narapidana yang memenuhi persyaratan administratif dan substantif untuk diusulkan remisinya baik Remisi Khusus dan Remisi Umum. Hal tersebut merupakan tupoksi sehingga dapat dipastikan tercapainya target Pencapaian Kinerja.
- 6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
 Melaksanakan konsolidasi secara rutin dan memastikan jaringan aman agar tidak terjadi gagal konsolidasi.

• **Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	100%	117% ----- $\frac{100\%}{85\%} \times 100\%$

Tabel 3.26 Capaian Target dan Realisasi SK 3 dan IKK 3 Tahun 2023 Div. PAS

Jumlah Narapidana yang mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dibagi Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dikali 100%.

$$\% \text{ Predikat Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial

B = Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk Diusulkan Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial

Integrasi	Jumlah
CB	528
PB	1174
CMB	5
Jumlah	1707

Tabel 3.27 Data Jumlah Integrasi Narapidana

$$\begin{aligned} \text{\% Predikat Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi} &= \frac{1707}{1707} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	100%	125%	85%	100%	117%

Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 3 dan IKK 3 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2022 dan 2023, realisasi “Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi” konsisten berada di angka 100%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
75%	80%	85%	90%

Tabel 3.29 Rencana Strategis SK 3 dan IKK 3 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra, realisasi capaian “Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi” berada di angka 100 dan di mungkinkan sudah sesuai pula dengan target capaian di Tahun 2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran “Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Petugas Registrasi pada Lapas dan Petugas Pelayanan pada Rutan memastikan setiap Narapidana yang memenuhi persyaratan administratif dan substantif untuk diusulkan integrasinya, sehingga tidak ada yang terlewat. Hal tersebut merupakan tupoksi sehingga dapat dipastikan tercapainya target Pencapaian Kinerja.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Melaksanakan konsolidasi secara rutin dan memastikan jaringan aman agar tidak terjadi gagal konsolidasi.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 4 “Persentase Narapidana yang mendapatkan hak pendidikan”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase Narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85%	100%	117% ----- $\frac{100\%}{85\%} \times 100\%$

Tabel 3.30 Capaian Target dan Realisasi SK 3 dan IKK 4 Tahun 2023 Div. PAS

Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan dibagi dengan Jumlah Narapidana yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal dikali 100%.

$$\% \text{ Predikat Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan

B = Jumlah Narapidana yang Tidak Memiliki Latar Belakang Pendidikan Formal

Berdasarkan rekap dari Unit Pelaksana Teknis ditemukan 138 narapidana yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal alias tidak sekolah dan seluruh Narapidana tersebut telah mendapat pendidikan dalam beberapa jenis pendidikan baik itu keterampilan maupun kepribadian.

$$\begin{aligned} \% \text{ Predikat Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan} &= \frac{138}{138} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	80%	19,4%	25%	85%	100%	117%

Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 3 dan IKK 4 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2022 dan 2023, realisasi “Persentase Narapidana yang mendapatkan hak pendidikan” konsisten berada di angka 100%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
75%	80%	85%	90%

Tabel 3.32 Rencana Strategis SK 3 dan IKK 4 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra, realisasi capaian “Persentase Narapidana yang mendapatkan hak pendidikan” mengalami peningkatan yang signifikan dan cukup optimis

menghadapi Tahun 2024 dikarenakan capaian tahun ini juga sudah di atas target Tahun 2024.

- 4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional
 Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran “Persentase Narapidana yang mendapatkan hak pendidikan” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- 5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
 Keberhasilan didukung oleh petugas di Lapas maupun Rutan yang telah memberikan pendidikan kepada seluruh Narapidana yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal.
- 6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
 Melaksanakan tuisi terkait pembinaan dalam bentuk pendidikan keterampilan maupun kepribadian dengan lebih baik lagi.

• **Indikator Kinerja Kegiatan 5 “Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh, dan disiplin”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh, dan disiplin	17%	100%	588% ----- $\frac{100\%}{17\%} \times 100\%$

Tabel 3.33 Capaian Target dan Realisasi SK 3 dan IKK 5 Tahun 2023 Div. PAS

Jumlah Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh, dan disiplin dibagi jumlah Narapidana resiko tinggi yang mendapatkan Program Pembinaan dikali 100%.

$$\% \text{ Perubahan Perilaku Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh, dan Disiplin

B = Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan

Jenis Kejahatan Resiko Tinggi	Jumlah
Bandar Narkoba	850
Terpidana Seumur Hidup	29
Terpidana Hukuman Mati	10
Jumlah	889

Tabel 3.34 Data Jumlah Kejahatan Resiko Tinggi Berdasarkan Jenis Kejahatan

$$\begin{aligned} \% \text{ Perubahan Perilaku Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin} &= \frac{889}{889} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh, dan disiplin	15%	100%	666%	17%	100%	588%

Tabel 3.35 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 3 dan IKK 5 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2022 dan 2023, realisasi “Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh, dan disiplin” konsisten pada persentase 100%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
13%	15%	17%	19%

Tabel 3.36 Rencana Strategis SK 3 dan IKK 5 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra, realisasi capaian “Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh, dan disiplin” konsisten di angka 100% dan cukup optimis menghadapi Tahun 2024 dikarenakan capaian tahun ini juga sudah di atas target Tahun 2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran “Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh, dan disiplin” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Target tercapai karena semua Narapidana yang berisiko tinggi (bandar narkoba, terpidana hukuman seumur hidup, dan terpidana hukuman mati) telah mendapatkan program pembinaan dan dapat dinilai sadar, patuh, dan disiplin oleh Wali Pemasarakatan dengan menggunakan metode Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN).

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Meningkatkan pembinaan dan meningkatkan peran Wali Pemasarakatan.

• **Indikator Kinerja Kegiatan 6 “Persentase Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	55%	177% ----- $\frac{55\%}{31\%} \times 100\%$

Tabel 3.37 Capaian Target dan Realisasi SK 3 dan IKK 6 Tahun 2023 Div. PAS
 Jumlah Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dibagi jumlah Narapidana dikali 100%.

$$\% \text{ Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Narapidana yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

B = Jumlah Narapidana yang memperoleh jatah paket pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

KAWIL	UPP	MANGKUP	RELAJIN	BERSERTIFIKAT	STATISTIK PELATIHAN KETERAMPILAN BERSERTIFIKAT										ANGGARAN REALISASI	SISA		
					MITRA KELOMPOK SAMA	MITRA KELOMPOK SAMA	MITRA KELOMPOK SAMA	MITRA KELOMPOK SAMA	MITRA KELOMPOK SAMA	MITRA KELOMPOK SAMA	MITRA KELOMPOK SAMA	MITRA KELOMPOK SAMA	MITRA KELOMPOK SAMA	MITRA KELOMPOK SAMA				
KALIMANTAN BARAT	Lapas Kelas IA Pontianak	Pelatihan Sakompa Bangun	30	30	LPK.Mula	Pelatih an Berat Shop	20	20	LPE	Mala						70.600.000	70.600.000	0
	Lapas Perempuan Kelas IA Pontianak															70.600.000	0	0
	Lapas Kelas HI Sintang	Pelatihan (konstruksi) Pengolahan Serbuk sari Kayu	30	30	CV. ANNA											70.600.000	70.600.000	0
	Lapas Kelas HI Singkawang	Lap. Lathin	20	20	Lap. Lathin Kerja Singkawang											88.924.000	88.924.750	330

Tabel 3.38 Data Statistik Pelatihan Keterampilan Bersertifikat

$$\% \text{ Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi} = \frac{110}{200} \times 100\% = 55\%$$

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	8,5%	30%	31%	55%	177%

Tabel 3.39 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 3 dan IKK 6 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2022 dan 2023, realisasi “Persentase Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi” mengalami peningkatan yang signifikan karena kecepatan petugas untuk melakukan pelatihan berdasarkan paket yang diterima oleh Lapas untuk menjalankan pelatihan secara terjadwal dan terperinci.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
25%	28%	31%	34%

Tabel 3.40 Rencana Strategis SK 3 dan IKK 6 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra, realisasi capaian “Persentase Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi” meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan Tahun 2022 dikarenakan tidak adanya *automatic adjustment* anggaran dan cukup optimis mennghadapi Tahun 2024 dikarenakan capaian tahun ini sudah di atas target Tahun 2024.

- 4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional
 Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran “Persentase Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- 5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
 Tercapainya target pendidikan dan pelatihan bersertifikasi dikarenakan kecepatan petugas untuk melakukan pelatihan berdasarkan paket yang di terima oleh Lapas untuk menjalankan pelatihan secara terjadwal dan terperinci serta tidak adanya *automatic adjustment* terkait pos anggaran pada indikator tersebut seperti pada Tahun 2022.
- 6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
 Melakukan pelatihan secara terperinci dan terjadwal dengan baik.

• **Indikator Kinerja Kegiatan 7 “Persentase narapidana yang bekerja dan produktif”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif	72%	100%	138% ----- $\frac{100\%}{72\%} \times 100\%$

Tabel 3.41 Capaian Target dan Realisasi SK 3 dan IKK 7 Tahun 2023 Div. PAS

Jumlah Narapidana yang bekerja dan produktif dibagi Jumlah Narapidana yang menjalankan program asimilasi dikali 100%.

$$\% \text{ Narapidana yang bekerja dan produktif} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Narapidana yang bekerja dan produktif

B = Jumlah Narapidana yang menjalankan program asimilasi

Bulan	WBP Pria	WBP Wanita	Jumlah
Desember	48	14	62
November	48	16	64
Oktober	46	13	59
September	70	20	90
Agustus	30	15	45

Juli	32	17	49
Juni	24	18	42
Mei	60	14	74
April	75	20	95
maret	45	15	60
Februari	84	15	99
Januari	51	20	71
Jumlah	613	197	810

Tabel 3.42 Data Jumlah Narapidana yang Bekerja dan Produktif

$$\begin{aligned} \text{\% Narapidana yang bekerja dan produktif} &= \frac{810}{810} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif	67%	100%	149%	72%	100%	138%

Tabel 3.43 Perbandingan Realisasi dan Capaian KinerjaSK 3 dan IKK 7 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2022 dan 2023, realisasi “Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif” konsisten pada persentase 100%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
62%	67%	72%	77%

Tabel 3.44 Rencana Strategis SK 3 dan IKK 7 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra, realisasi capaian “Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif” konsisten di angka 100% dan cukup optimis menghadapi Tahun 2024 dikarenakan capaian tahun ini juga sudah di atas target Tahun 2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran “Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk pelaksanaan kegiatan kerja produksi pada Lapas dan Rutan, sebagian besar Narapidana antusias dalam melaksanakan. Dikarenakan kegiatan kerja pada bidang perkebunan, pertanian, perikanan, kerajinan tangan, dan pengolahan limbah yang tersebar pada Lapas/Rutan di wilayah Kalimantan Barat sangat bermanfaat bagi Narapidana untuk mengisi waktu luang menjalani masa pidana.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Meningkatkan pelaksanaan kegiatan kerja produksi dan menambah jenis pekerjaan produksi untuk dilakukan Narapidana.

Sasaran Kegiatan 4
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu “Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya” memenuhi target dengan target 80% dan “Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap” memenuhi target dengan target 80%;



Gambar 3.5 Sasaran Kegiatan 4 dan Indikator Kinerja Kegiatan Divisi PAS

• **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	96%	120% ----- $\frac{96\%}{60\%} \times 100\%$

Tabel 3.45 Capaian Target dan Realisasi SK 4 dan IKK 1 Tahun 2023 Div. PAS

Menghitung Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas Dan Kualitasnya (Nilainya) adalah dengan Membagi Jumlah Rekomendasi Lelang Basan Baran dibagi dengan jumlah Penilaian Depresiasi Basan Baran X 100%

$$\% \text{ Pengelolaan Basan Baran} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Rekomendasi Lelang Basan Baran

B = Jumlah Penilaian Depresiasi Basan Baran

UPT	Jumlah Rekomendasi Lelang Basan Baran	Jumlah Penilaian Depresiasi Basan Baran
Rupbasan Pontianak	24	24
Rupbasan Singkawang	0	1

Rupbasan Sanggau	0	0
Jumlah	24	25

Tabel 3.46 Data Jumlah Rekomendasi Lelang Basan Baran

$$\begin{aligned} \% \text{ Pengelolaan Basan Baran} &= \frac{24}{25} \times 100\% \\ &= 24\% \end{aligned}$$

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%	75%	107%	80%	96%	120%

Tabel 3.47 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 4 dan IKK 1 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2022 dan 2023, realisasi “Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya” mengalami peningkatan dari 75% menjadi 96% di tahun 2023.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
60%	70%	80%	90%

Tabel 3.48 Rencana Strategis SK 4 dan IKK 1 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra, realisasi capaian “Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya” mengalami peningkatan sebanyak 21% dan cukup optimis menghadapi Tahun 2024 dikarenakan capaian tahun ini juga sudah di atas target Tahun 2024.

- 4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional
 Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran “Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- 5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
 Dilakukan perawatan secara berkala oleh petugas pada tiap barang rampasan dan sitaan yang berada di Rupbasan pada wilayah Kalimantan Barat. Hal tersebut merupakan tupoksi sehingga target Perjanjian Kinerja dapat dipastikan tercapai.
- 6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
 Meningkatkan perawatan barang rampasan dan sitaan secara maksimal agar tidak terjadi penurunan kualitas pada barang rampasan dan sitaan.

• **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	80%	84%	105% ----- $\frac{84\%}{80\%} \times 100\%$

Tabel 3.49 Capaian Target dan Realisasi SK 4 dan IKK 2 Tahun 2023 Div. PAS

Jumlah Benda Sitaan yang telah Eksekusi dibagi dengan Jumlah Benda Sitaan yang telah Inkrah (berkekuatan hukum tetap) dikali 100%.

$$\% \text{ Basan baran yang dikeluarkan dan Berkekuatan Hukum Tetap} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Benda Sitaan yang telah Eksekusi

B = Jumlah Benda Sitaan yang telah Inkrah (berkekuatan hukum tetap)

UPT	Jumlah Benda Sitaan yang telah Eksekusi	Jumlah Benda Sitaan yang telah Inkrah (berkekuatan hukum tetap)
Rupbasan Pontianak	14	17
Rupbasan Singkawang	3	4
Rupbasan Sanggau	5	5
Jumlah	22	26

Tabel 3.50 Data Jumlah Benda Sitaan yang Telah Eksekusi

$$\% \text{ Basan baran yang dikeluarkan dan Berkekuatan Hukum Tetap} = \frac{22}{26} \times 100\% = 84\%$$

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	60%	81%	135%	80%	84%	105%

Tabel 3.51 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 4 dan IKK 2 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2022 dan 2023, realisasi “Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap” mengalami peningkatan yang signifikan dari 1% menjadi 84% di Tahun 2023.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
40%	60%	80%	100%

Tabel 3.52 Rencana Strategis SK 4 dan IKK 2 Div. PAS

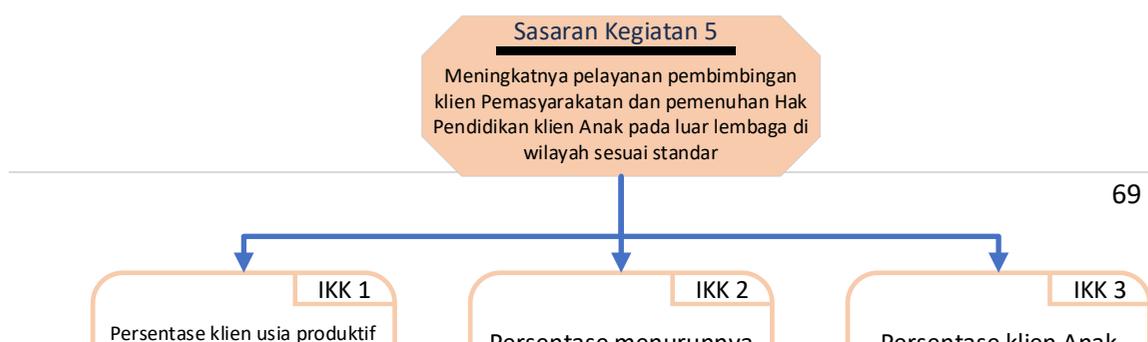
Berdasarkan hasil perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra, realisasi capaian “Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap” melebihi target sebanyak 4% dan perlu usaha lebih dari pegawai Rupbasan karena masih jauh dari target Renstra pada Tahun 2024.

- 4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional
 Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran “Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- 5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
 Pihak Rupbasan bekerja sama dengan APH terkait dengan pelaksanaan pengeluaran semua Basan Baran yang telah *inkracht*. Namun ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan Basan Baran tidak dapat dikeluarkan seperti rusaknya Basan Baran sehingga tidak laku ketika dilelang atau tidak diambil oleh pemiliknya yang menyebabkan persentase capaian PK tidak mencapai 100%.
- 6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
 Tetap melaksanakan kerja sama dan koordinasi yang intensif dengan APH terkait pengeluaran basan baran.

Sasaran Kegiatan 5
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien Pemasarakatan dan pemenuhan Hak Pendidikan klien Anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

- “Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga” memenuhi target dengan target 60%;
- “Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara” memenuhi target dengan target 55%;
- “Persentase klien Anak yang terpenuhi Hak Pendidikannya” memenuhi target dengan target 35%;



Gambar 3.6 Sasaran Kegiatan 5 dan Indikator Kinerja Kegiatan Divisi PAS

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%	68%	113% ----- $\frac{68\%}{60\%} \times 100\%$

Tabel 3.53 Capaian Target dan Realisasi SK 5 dan IKK 1 Tahun 2023 Div. PAS

Jumlah Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga dibagi Jumlah Klien Usia Produktif dikali 100%.

$$\% \text{ Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga

B = Jumlah Klien Usia Produktif

UPT	Jumlah Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga	Jumlah Klien Usia Produktif
Bapas Pontianak	273	455
Bapas Sambas	63	131
Bapas Sintang	199	199
Jumlah	535	785

Tabel 3.54 Data Jumlah Klien Usia Produktif

Berdasarkan data rekap laporan kinerja Balai Pemasarakatan di Kalimantan barat terdapat 535 klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga dari jumlah total 785 klien usia produktif.

$$\begin{aligned} \% \text{ Predikat Memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian} &= \frac{535}{785} \times 100\% \\ &= 68\% \end{aligned}$$

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR	2022	2023
-----------	------	------

KINERJA KEGIATAN	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%	57%	114%	60%	68%	113%

Tabel 3.55 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 5 dan IKK 1 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2022 dan 2023, realisasi “Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga” mengalami peningkatan sebesar 11% dari 57% menjadi 68%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
40%	50%	60%	70%

Tabel 3.56 Rencana Strategis SK 5 dan IKK 1 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra, realisasi “Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga” mengalami peningkatan sebanyak 11% dan perlu usaha lebih dari pegawai Balai Pemasarakatan untuk mencapai target Tahun 2024.

- 4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional
 Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran “Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- 5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
 Meningkatnya kinerja Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang membimbing klien hingga masa pengakhiran dan kerja sama yang dilakukan PK dengan ULKI dan POKMAS LIPAS yang menyebabkan target tercapai.
- 6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
 Meningkatkan kinerja PK dalam masa pembimbingan dan meningkatkan kerja sama dengan ULKI dan POKMAS LIPAS.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara”**

- 1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	26%	$\frac{55\% - (26\% - 55\%)}{55\%} \times 100\%$

Tabel 3.57 Capaian Target dan Realisasi SK 5 dan IKK 2 Tahun 2023 Div. PAS

Jumlah Anak yang mendapatkan Putusan Pidana Penjara dibagi Jumlah Pendampingan Anak dikali 100%.

$$\% \text{ Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Anak yang mendapatkan Putusan Pidana Penjara

B = Jumlah Pendampingan Anak

Berdasarkan rekap laporan ditemukan jumlah Anak yang mendapatkan Putusan Pidana Penjara sebanyak 38 dari 142 jumlah pendampingan anak dan sudah memenuhi target di tahun 2023 yakni 55% (semakin kecil persentase semakin baik).

$$\begin{aligned} \% \text{ Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara} &= \frac{38}{142} \times 100\% \\ &= 26\% \end{aligned}$$

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%	60%	100%	55%	26%	153%

Tabel 3.58 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 5 dan IKK 2 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2022 dan 2023, realisasi “Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara” mengalami peningkatan yang signifikan dari 60% menjadi 26% di Tahun 2023. (Semakin kecil persentase semakin baik)

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
65%	60%	55%	50%

Tabel 3.59 Rencana Strategis SK 5 dan IKK 2 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra, realisasi capaian “Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara” mengalami peningkatan sebanyak 34% dan sudah berada di atas target pada Tahun 2024.

- 4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional
 Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran “Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- 5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
 Pendampingan dilakukan pada semua anak yang berkonflik dengan hukum. Namun beberapa kasus pada anak yang dianggap berat seperti Pembunuhan dan Pencabulan Berat.
- 6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
 Melaksanakan pendampingan kepada setiap Anak yang berkonflik dengan hukum.

• **Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Persentase klien Anak yang terpenuhi Hak Pendidikannya”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase klien Anak yang terpenuhi Hak Pendidikannya	35%	51%	142% ----- $\frac{50\%}{35\%} \times 100\%$

Tabel 3.60 Capaian Target dan Realisasi SK 5 dan IKK 3 Tahun 2023 Div. PAS

Jumlah Klien Anak yang Melanjutkan Pendidikan di dibagi Jumlah Klien Anak dikali 100%.

$$\% \text{ Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Klien Anak yang Melanjutkan Pendidikan

B = Jumlah Klien Anak

Semua anak yang melanjutkan pendidikan yang putus selama proses peradilan dan ditempatkan di LPKA pasti terpenuhi hak pendidikannya. Namun anak pidana yang mendapatkan pendidikan pada LPKA disesuaikan dengan keterbatasan jumlah anggaran yang tersedia sehingga terdapat sistem antrian bagi anak pidana yang baru. Untuk anak pidana yang ditempatkan di luar LPKA belum dapat memperoleh pendidikan karena tidak tersedia dalam pagu anggaran Lapas/Rutan. Berdasarkan data rekap laporan bulanan dan SDP terdapat 27 klien anak yang melanjutkan pendidikan dari total 53 jumlah klien anak.

$$\begin{aligned} \% \text{ Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya} &= \frac{27}{53} \times 100\% \\ &= 51\% \end{aligned}$$

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR	2022	2023
-----------	------	------

KINERJA KEGIATAN	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase klien Anak yang terpenuhi Hak Pendidikannya	30%	32%	105%	35%	51%	142%

Tabel 3.61 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 5 dan IKK 3 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2022 dan 2023, realisasi “Persentase klien Anak yang terpenuhi Hak Pendidikannya” mengalami kenaikan sebesar 19%.

- 3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
25%	30%	35%	40%

Tabel 3.62 Rencana Strategis SK 5 dan IKK 3 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra, realisasi “Persentase klien Anak yang terpenuhi Hak Pendidikannya” mengalami peningkatan sebanyak 19% menjadi 51% dan sudah berada di atas target Tahun 2024.

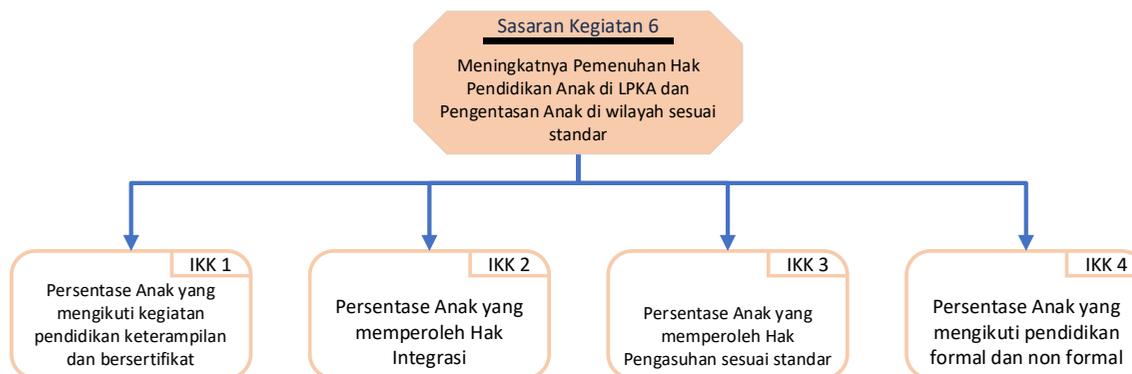
- 4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional
 Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran “Persentase klien Anak yang terpenuhi Hak Pendidikannya” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- 5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
 Semua anak yang melanjutkan pendidikan yang putus selama proses peradilan dan ditempatkan di LPKA pasti terpenuhi hak pendidikannya. Namun anak pidana yang mendapatkan pendidikan pada LPKA disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia sehingga terdapat sistem antrian bagi anak pidana yang baru. Untuk anak pidana yang ditempatkan di luar LPKA belum dapat memperoleh pendidikan karena tidak tersedia dalam pagu anggaran Lapas/Rutan.
- 6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
 Melakukan pendampingan secara intensif pada anak yang berkonflik dengan hukum.

Sasaran Kegiatan 6
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 4 (empat) indikator kinerja yaitu:

- “Persentase Anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat” memenuhi target dengan target 80%;
- “Persentase Anak yang memperoleh Hak Integrasi” memenuhi target dengan target 100%;

- “Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar” memenuhi target dengan target 90%; dan
- “Persentase Anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal” memenuhi target dengan target 90%.



Gambar 3.7 Sasaran Kegiatan 6 dan Indikator Kinerja Kegiatan Divisi PAS

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase Anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%	100%	123% ----- $\frac{100\%}{80\%} \times 100\%$

Tabel 3.63 Capaian Target dan Realisasi SK 6 dan IKK 1 Tahun 2023 Div. PAS

Jumlah Anak yang Terampil dibagi Jumlah Anak yang Mengikuti Pendidikan Keterampilan dikali 100%.

$$\% \text{ Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Anak yang Terampil

B = Jumlah Anak yang Mengikuti Pendidikan Keterampilan

Pelaksanaan pendidikan keterampilan di LPKA diikuti oleh anak yang bersedia mengikuti pendidikan keterampilan. Namun jumlah anak yang mengikuti pendidikan keterampilan dan bersertifikat disesuaikan dengan anggaran LPKA. Berdasarkan data LKjIP LPKA terdapat 40 anak terampil dari 40 jumlah total anak yang mengikuti Pendidikan keterampilan.

$$\begin{aligned} \% \text{ Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat} &= \frac{40}{40} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR	2022	2023
-----------	------	------

KINERJA KEGIATAN	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%	87%	116%	80%	100%	125%

Tabel 3.64 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 6 dan IKK 1 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2022 dan 2023, realisasi “Persentase Anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat” mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2022.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
70%	75%	80%	85%

Tabel 3.65 Rencana Strategis SK 6 dan IKK 1 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra, realisasi “Persentase Anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat” mengalami peningkatan sebanyak 13% menjadi 100% dan sudah berada di atas target Tahun 2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran “Persentase Anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Pelaksanaan pendidikan keterampilan di LPKA diikuti oleh anak yang bersedia mengikuti pendidikan keterampilan. Namun jumlah anak yang mengikuti pendidikan keterampilan dan bersertifikat disesuaikan dengan anggaran LPKA.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Menempatkan seluruh Anak Binaan pada LPKA Kelas II Sungai Raya.

• **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase Anak yang memperoleh Hak Integrasi”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi	100%	100%	$\frac{100\%}{100\%} \times 100\%$

Tabel 3.66 Capaian Target dan Realisasi SK 6 dan IKK 2 Tahun 2023 Div. PAS

Jumlah Anak yang memperoleh Hak Integrasi dibagi Jumlah Anak yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan memperoleh Hak Integrasi dikali 100%.

$$\% \text{ Anak yang memperoleh Hak Integrasi} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Anak yang memperoleh Hak Integrasi

B = Jumlah Anak yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan memperoleh Hak Integrasi

Setiap Anak yang memenuhi persyaratan administratif dan substantif diusulkan untuk mendapatkan hak integrasi. Berdasarkan data rekap laporan bulanan dan SDP seluruh 38 anak yang memenuhi syarat substantif dan administrative untuk diusulkan memperoleh hak integrasi telah memperoleh hak integrasi.

$$\begin{aligned} \% \text{ Anak yang memperoleh Hak Integrasi} &= \frac{38}{38} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Anak yang memperoleh Hak Integrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.67 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 6 dan IKK 2 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2022 dan 2023, realisasi “Persentase Anak yang memperoleh Hak Integrasi” konsisten berada di angka 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
100%	100%	100%	100%

Tabel 3.68 Rencana Strategis SK 6 dan IKK 2 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra, realisasi “Persentase Anak yang memperoleh Hak Integrasi” konsisten berada di angka 100%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran “Persentase Anak yang memperoleh Hak Integrasi” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Setiap Anak yang memenuhi persyaratan administratif dan substantif diusulkan mendapatkan integrasi. Hal tersebut merupakan tupoksi sehingga dapat dipastikan tercapainya target Pencapaian Kinerja.

- 6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
 Memastikan setiap dokumen usulan Integrasi tidak salah agar tidak dikembalikan.

• **Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%	100%	111% ----- $\frac{96\%}{90\%} \times 100\%$

Tabel 3.69 Capaian Target dan Realisasi SK 6 dan IKK 3 Tahun 2023 Div. PAS

Jumlah Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan dibagi jumlah Anak dikali 100%.

$$\% \text{ Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Anak yang Memperoleh hak Pengasuhan

B = Jumlah Anak

Sebagian besar anak mendapatkan Hak Pengasuhan berupa pengasuhan dari petugas di Lapas dengan berpedoman pada Instrumen Penilaian Pengasuhan Anak. Berdasarkan data rekap laporan bulanan dan SDP terdapat 31 anak yang memperoleh hak pengasuhan dari total 31 anak.

$$\begin{aligned} \% \text{ Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan} &= \frac{31}{31} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80%	87%	108%	90%	100%	111%

Tabel 3.70 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 6 dan IKK 3 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2022 dan 2023, realisasi “Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar” mengalami kenaikan sebesar 13%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
70%	80%	90%	100%

Tabel 3.71 Rencana Strategis SK 6 dan IKK 3 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra, realisasi “Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar” mengalami peningkatan sebanyak 13 persen di bandingkan Tahun 2023 dan sudah memenuhi standar untuk menghadapi Tahun 2024.

- 4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional
 Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran “Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- 5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
 Sebagian besar anak mendapatkan Hak Pengasuhan berupa pengasuhan dari petugas di Lapas dengan berpedoman pada Instrumen Penilaian Pengasuhan Anak.
- 6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
 Menempatkan seluruh Anak Binaan pada LPKA Kelas II Sungai Raya.

• **Indikator Kinerja Kegiatan 4 “Persentase Anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal”**

- 1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase Anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%	100%	$\frac{100\%}{90\%} \times 100\% = 111\%$

Tabel 3.72 Capaian Target dan Realisasi SK 6 dan IKK 4 Tahun 2023 Div. PAS

Jumlah Anak yang memperoleh Hak Pendidikan formal dan non formal dibagi jumlah Anak dikali 100%.

$$\% \text{ Pendidikan Formal Dan Non Formal} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Anak yang memperoleh Hak Pendidikan formal dan non formal

B = Jumlah Anak

Berdasarkan data rekap laporan bulanan dan SDP terdapat 31 anak yang memperoleh Hak Pendidikan formal dan non formal dari total 31 jumlah anak.

$$\begin{aligned} \% \text{ Pendidikan Formal Dan Non Formal} &= \frac{31}{31} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

- 2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%	87%	108%	90%	100%	111%

Tabel 3.73 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 6 dan IKK 4 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2022 dan 2023, realisasi “Persentase Anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal” mengalami kenaikan sebesar 13%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
70%	80%	90%	100%

Tabel 3.74 Rencana Strategis SK 6 dan IKK 4 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra, realisasi “Persentase Anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal” mengalami peningkatan sebanyak 13 persen di dibandingkan Tahun 2023 dan sudah memenuhi standar untuk menghadapi Tahun 2024.

- 4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional
 Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran “Persentase Anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- 5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
 Pendidikan formal dan non formal dilaksanakan dengan melakukan kerja sama dengan pihak terkait. Namun jumlah Anak Pidana yang mendapatkan pendidikan formal dan non formal disesuaikan dengan anggaran LPKA.
- 6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
 Melakukan kerja sama dan sinergitas dengan Dinas Pendidikan setempat.

Sasaran Kegiatan 7
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 4 (empat) indikator kinerja yaitu:

- “Persentase pengaduan yang diselesaikan” memenuhi target dengan target 85%;
- “Persentase pencegahan gangguan Kamtib” memenuhi target dengan target 80%;
- “Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan Kamtib” memenuhi target dengan target 85%; dan

- “Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan Kamtib secara tuntas” memenuhi target dengan target 80%.



Gambar 3.8 Sasaran Kegiatan 7 dan Indikator Kinerja Kegiatan Divisi PAS

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase pengaduan yang diselesaikan”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%	100%	111% ----- $\frac{100\%}{85\%} \times 100\%$

Tabel 3.75 Capaian Target dan Realisasi SK 7 dan IKK 1 Tahun 2023 Div. PAS

Jumlah Pengaduan yang diselesaikan dibagi Jumlah Pengaduan yang masuk dikali 100%.

$$\% \text{ Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Pengaduan yang diselesaikan

B = Jumlah Pengaduan yang masuk

UPT	Jumlah Pengaduan	Pengaduan Diselesaikan
Rutan Kelas IIA Pontianak	0	0
Rutan Kelas IIB Mempawah	1	1
Rutan Kelas IIB Sambas	1	1
Rutan Kelas IIB Bengkayang	0	0
Rutan Kelas IIB Landak	0	0
Rutan Kelas IIB Sanggau	1	1
Rutan Kelas IIB Putussibau	1	1
Bapas Kelas II Pontianak	1	1
Bapas Kelas II Sambas	0	0
Bapas Kelas II Sintang	0	0
Rupbasan Pontianak	1	1
Rupbasan Singkawang	1	1
Rupbasan Sanggau	0	0
Lapas Kelas IIA Pontianak	2	2
Lapas Kelas IIB Ketapang	3	3
LPKA Kelas II Sungai Raya	0	0
LPP Kelas IIA Pontianak	2	2

Lapas Kelas IIB Sintang	2	2
Lapas Kelas IIB Singkawang	2	2
Jumlah	18	18

Tabel 3.76 Data Jumlah Pengaduan

$$\begin{aligned} \% \text{Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib} &= \frac{18}{18} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%	100%	125%	85%	100%	117%

Tabel 3.77 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 7 dan IKK 1 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2022 dan 2023, “Persentase pengaduan yang diselesaikan” konsisten berada di angka 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
70%	80%	85%	90%

Tabel 3.78 Rencana Strategis SK 7 dan IKK 1 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra, realisasi “Persentase pengaduan yang diselesaikan” konsisten berada di angka 100% dan sudah memenuhi standar untuk menghadapi Tahun 2024.

- 4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional
 Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran “Persentase pengaduan yang diselesaikan” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- 5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
 Tiap laporan pengaduan langsung ditindaklanjuti dan ditanggapi sehingga target capaian Perjanjian Kinerja dapat tercapai.
- 6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
 Tindak lanjut segera setiap pengaduan yang masuk.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase pencegahan gangguan Kamtib”**

- 1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase pencegahan gangguan Kamtib	80%	100%	125% ----- $\frac{100\%}{80\%} \times 100\%$

Tabel 3.79 Capaian Target dan Realisasi SK 7 dan IKK 2 Tahun 2023 Div. PAS

Jumlah gangguan Kamtib yang dapat dicegah dibagi Jumlah seluruh gangguan Kamtib yang terjadi Dikali 100%.

$$\% \text{ Gangguan Kamtib yang dapat dicegah} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah gangguan Kamtib yang dapat dicegah

B = Jumlah seluruh gangguan Kamtib yang terjadi

Berdasarkan data rekap laporan bulanan sebanyak 5 gangguan Kamtib yang dapat dicegah dan 5 gangguan Kamtib yang terjadi.

$$\begin{aligned} \% \text{ Gangguan Kamtib yang dapat dicegah} &= \frac{5}{5} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pencegahan gangguan Kamtib	70%	100%	142%	80%	100%	125%

Tabel 3.80 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 7 dan IKK 2 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2022 dan 2023, "Persentase pencegahan gangguan Kamtib" konsisten berada di angka 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
60%	70%	80%	90%

Tabel 3.81 Rencana Strategis SK 7 dan IKK 2 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra, realisasi "Persentase pencegahan gangguan Kamtib" yang konsisten berada di angka 100% dan sudah memenuhi standar untuk menghadapi Tahun 2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran “Persentase pencegahan gangguan Kamtib” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dilakukan penindakan dan pencegahan gangguan Kamtib dengan melakukan pengeledahan secara berkala maupun inspeksi mendadak pada Lapas dan Rutan. Selain itu dengan memperkuat keamanan pada pintu jaga sehingga meminimalisir gangguan Kamtib yang terjadi di dalam Lapas dan Rutan.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Selain dilakukan oleh Tim SATOPS PATNAL Kantor Wilayah, kegiatan razia pengeledahan juga dilakukan secara internal oleh Lapas, Rutan, dan LPKA.

• **Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan Kamtib”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan Kamtib	85%	100%	117% ----- $\frac{100\%}{85\%} \times 100\%$

Tabel 3.82 Capaian Target dan Realisasi SK 7 dan IKK 3 Tahun 2023 Div. PAS

Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya dibagi jumlah pelaku gangguan Kamtib dikali 100%.

$$\% \text{Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya

B = Jumlah Pelaku gangguan Kamtib

Berdasarkan data rekap laporan bulanan terdapat 5 tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya dari 5 jumlah pelaku gangguan Kamtib.

$$\% \text{Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib} = \frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$$

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh	80%	83%	104%	85%	100%	117%

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan Kamtib						

Tabel 3.83 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 7 dan IKK 3 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2022 dan 2023, “Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan Kamtib” mengalami peningkatan sebanyak 17% dibandingkan Tahun 2022.

- 3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
75%	80%	85%	90%

Tabel 3.84 Rencana Strategis SK 7 dan IKK 3 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra, realisasi “Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan Kamtib” mengalami peningkatan dan sudah memenuhi standar untuk menghadapi Tahun 2024.

- 4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional
 Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran “Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan Kamtib” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- 5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
 Penegakan peraturan dilakukan oleh SATOPS PATNAL Pemasarakatan melalui deteksi dini, razia secara berkala, dan intens melakukan koordinasi dan kerja sama dengan APH. Hal tersebut merupakan tupoksi sehingga dapat dipastikan tercapainya target Pencapaian Kinerja.
- 6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
 Meningkatkan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi SATOPS PATNAL Pemasarakatan.

• **Indikator Kinerja Kegiatan 4 “Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan Kamtib secara tuntas”**

- 1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan Kamtib secara tuntas	80%	100%	125% ----- $\frac{100\%}{80\%} \times 100\%$

Tabel 3.85 Capaian Target dan Realisasi SK 7 dan IKK 4 Tahun 2023 Div. PAS

Jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan Kamtib secara tuntas dibagi jumlah gangguan Kamtib dikali 100%.

$$\% \text{ Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

B = Jumlah Pelaku gangguan Kamtib

Berdasarkan data rekap laporan bulanan terdapat 5 gangguan kamtib dan seluruhnya dapat dipulihkan secara tuntas kondisi keamanan pasca gangguan tersebut.

$$\begin{aligned} \% \text{ Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib} &= \frac{5}{5} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan Kamtib secara tuntas	70%	100%	142%	80%	100%	125%

Tabel 3.86 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 7 dan IKK 4 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2022 dan 2023, realisasi “Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas” konsisten berada pada persentase 100%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
60%	70%	80%	90%

Tabel 3.87 Rencana Strategis SK 7 dan IKK 4 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra, realisasi “Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas” konsisten berada pada persentase 100% dan sudah memenuhi standar untuk menghadapi Tahun 2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran “Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

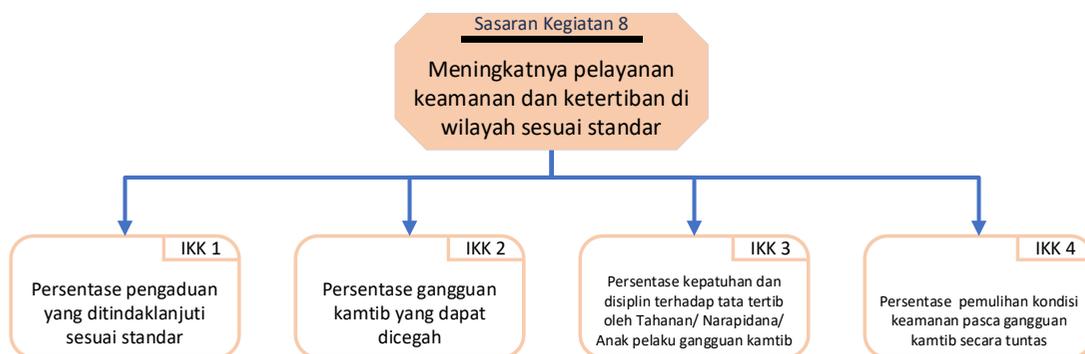
Penanggulangan setiap kejadian paska gangguan kamtib ditangani Tim SATOPS PATNAL secara cepat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tidak berkelanjutan.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
 Peningkatan pelaksana tugas dan fungsi SATOPS PATNAL Kantor Wilayah.

Sasaran Kegiatan 8
Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 4 (empat) indikator kinerja yaitu:

- “Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar” memenuhi target dengan target 85%;
- “Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah” memenuhi target dengan target 80%;
- “Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib” memenuhi target dengan target 85%; dan
- “Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas” memenuhi target dengan target 80%.



Gambar 3.9 Sasaran Kegiatan 8 dan Indikator Kinerja Kegiatan Divisi PAS

• **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	111% ----- $\frac{100\%}{85\%} \times 100\%$

Tabel 3.88 Capaian Target dan Realisasi SK 8 dan IKK 1 Tahun 2023 Div. PAS

Jumlah Pengaduan yang diselesaikan dibagi Jumlah Pengaduan yang masuk dikali 100%.

$$\% \text{ Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Pengaduan yang diselesaikan

B = Jumlah Pengaduan yang masuk

UPT	Jumlah Pengaduan	Pengaduan Diselesaikan
Rutan Kelas IIA Pontianak	0	0
Rutan Kelas IIB Mempawah	1	1
Rutan Kelas IIB Sambas	1	1
Rutan Kelas IIB Bengkayang	0	0
Rutan Kelas IIB Landak	0	0
Rutan Kelas IIB Sanggau	1	1
Rutan Kelas IIB Putussibau	1	1
Bapas Kelas II Pontianak	1	1
Bapas Kelas II Sambas	0	0
Bapas Kelas II Sintang	0	0
Rupbasan Pontianak	1	1
Rupbasan Singkawang	1	1
Rupbasan Sanggau	0	0
Lapas Kelas IIA Pontianak	2	2
Lapas Kelas IIB Ketapang	3	3
LPKA Kelas II Sungai Raya	0	0
LPP Kelas IIA Pontianak	2	2
Lapas Kelas IIB Sintang	2	2
Lapas Kelas IIB Singkawang	2	2
Jumlah	18	18

Tabel 3.89 Data Jumlah Pengaduan

$$\begin{aligned} \% \text{Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib} &= \frac{18}{18} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	100%	125%	85%	100%	117%

Tabel 3.90 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 8 dan IKK 1 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2022 dan 2023, “Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar” konsisten berada di angka 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
75%	80%	85%	90%

Tabel 3.91 Rencana Strategis SK 8 dan IKK 1 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra, realisasi “Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar” konsisten berada di angka 100% dan sudah memenuhi standar untuk menghadapi Tahun 2024.

- 4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional
 Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran “Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- 5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
 Tiap laporan pengaduan langsung ditindaklanjuti dan ditanggapi sehingga target capaian Perjanjian Kinerja dapat tercapai.
- 6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
 Tindak lanjut segera setiap pengaduan yang masuk.

• **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase gangguan Kamtib yang dapat dicegah”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase gangguan Kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	$\frac{100\%}{80\%} \times 100\%$

Tabel 3.92 Capaian Target dan Realisasi SK 8 dan IKK 2 Tahun 2023 Div. PAS

Jumlah gangguan Kamtib yang dapat dicegah dibagi Jumlah seluruh gangguan Kamtib yang terjadi Dikali 100%.

$$\% \text{Gangguan Kamtib yang dapat dicegah} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah gangguan Kamtib yang dapat dicegah

B = Jumlah seluruh gangguan Kamtib yang terjadi

Berdasarkan data rekap laporan bulanan sebanyak 5 gangguan Kamtib yang dapat dicegah dan 5 gangguan Kamtib yang terjadi.

$$\begin{aligned} \% \text{Gangguan Kamtib yang dapat dicegah} &= \frac{5}{5} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase gangguan Kamtib yang dapat dicegah	70%	100%	142%	80%	100%	125%

Tabel 3.93 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 8 dan IKK 2 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2022 dan 2023, “Persentase gangguan Kamtib yang dapat dicegah” konsisten berada di angka 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
60%	70%	80%	90%

Tabel 3.94 Rencana Strategis SK 8 dan IKK 2 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra, realisasi “Persentase gangguan Kamtib yang dapat dicegah” yang konsisten berada di angka 100% dan sudah memenuhi standar untuk menghadapi Tahun 2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional
 Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran “Persentase gangguan Kamtib yang dapat dicegah” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
 Dilakukan penindakan dan pencegahan gangguan Kamtib dengan melakukan penggeledahan secara berkala maupun inspeksi mendadak pada Lapas dan Rutan. Selain itu dengan memperkuat keamanan pada pintu jaga sehingga meminimalisir gangguan Kamtib yang terjadi di dalam Lapas dan Rutan.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
 Selain dilakukan oleh Tim SATOPS PATNAL Kantor Wilayah, kegiatan razia penggeledahan juga dilakukan secara internal oleh Lapas, Rutan, dan LPKA.

• **Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan Kamtib”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan Kamtib	85%	100%	117% ----- $\frac{100\%}{85\%} \times 100\%$

Tabel 3.95 Capaian Target dan Realisasi SK 8 dan IKK 3 Tahun 2023 Div. PAS

Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya dibagi jumlah pelaku gangguan Kamtib dikali 100%.

$$\% \text{ Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya

B = Jumlah Pelaku gangguan Kamtib

Berdasarkan data rekap laporan bulanan terdapat 5 tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya dari 5 jumlah pelaku gangguan Kamtib.

$$\begin{aligned} \% \text{ Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib} &= \frac{5}{5} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan Kamtib	80%	83%	104%	85%	100%	117%

Tabel 3.96 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 8 dan IKK 3 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2022 dan 2023, “Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan Kamtib” mengalami peningkatan sebanyak 17% dibandingkan Tahun 2022.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
75%	80%	85%	90%

Tabel 3.97 Rencana Strategis SK 8 dan IKK 3 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra, realisasi “Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan Kamtib” mengalami peningkatan dan sudah memenuhi standar untuk menghadapi Tahun 2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran “Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan Kamtib” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Penegakan peraturan dilakukan oleh SATOPS PATNAL Pemasarakatan melalui deteksi dini, razia secara berkala, dan intens melakukan koordinasi dan kerja sama dengan APH. Hal tersebut merupakan tupoksi sehingga dapat dipastikan tercapainya target Pencapaian Kinerja.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Meningkatkan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi SATOPS PATNAL Pemasarakatan.

• **Indikator Kinerja Kegiatan 4 “Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan Kamtib secara tuntas”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan Kamtib secara tuntas	80%	100%	125% ----- $\frac{100\%}{80\%} \times 100\%$

Tabel 3.98 Capaian Target dan Realisasi SK 8 dan IKK 4 Tahun 2023 Div. PAS

Jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan Kamtib secara tuntas dibagi jumlah gangguan Kamtib dikali 100%.

$$\% \text{ Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

B = Jumlah Pelaku gangguan Kamtib

Berdasarkan data rekap laporan bulanan terdapat 5 gangguan kamtib dan seluruhnya dapat dipulihkan secara tuntas kondisi keamanan pasca gangguan tersebut.

$$\begin{aligned} \% \text{ Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib} &= \frac{5}{5} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan Kamtib secara tuntas	70%	100%	142%	80%	100%	125%

Tabel 3.99 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 8 dan IKK 4 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2022 dan 2023, realisasi “Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas” konsisten berada pada persentase 100%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
60%	70%	80%	90%

Tabel 3.100 Rencana Strategis SK 8 dan IKK 4 Tahun 2023 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra, realisasi “Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib

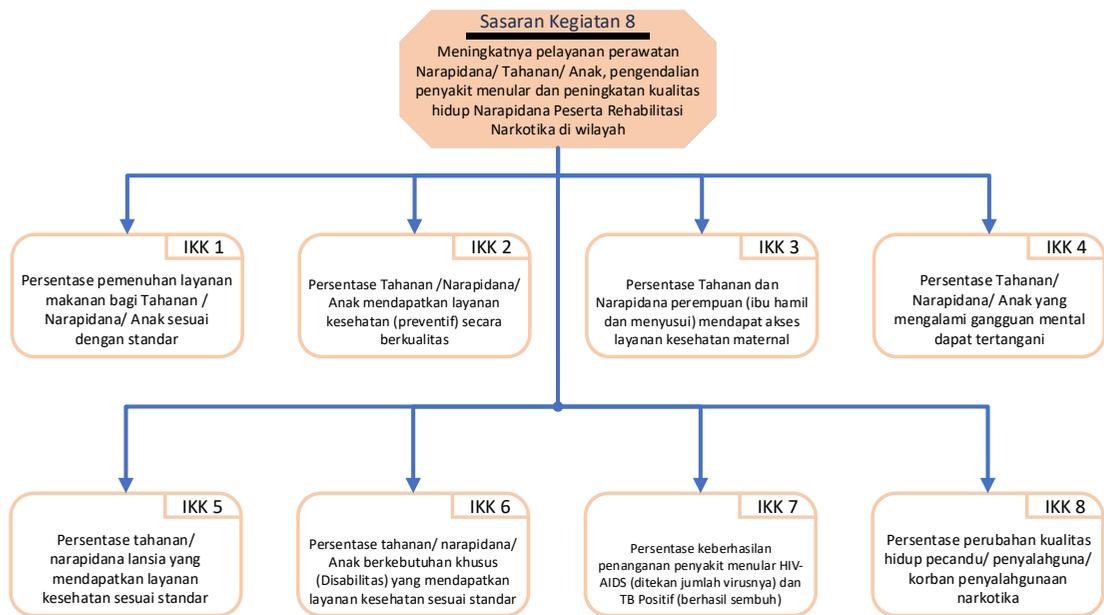
secara tuntas” konsisten berada pada persentase 100% dan sudah memenuhi standar untuk menghadapi Tahun 2024.

- 4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional
Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran “Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- 5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Penanggulangan setiap kejadian paska gangguan kamtib ditangani Tim SATOPS PATNAL secara cepat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tidak berkelanjutan.
- 6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
Peningkatan pelaksana tugas dan fungsi SATOPS PATNAL Kantor Wilayah.

Sasaran Kegiatan 9
Meningkatnya pelayanan perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 8 (delapan) indikator kinerja yaitu:

- “Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/ Anak sesuai dengan standar” memenuhi target dengan target 80%;
- “Persentase Tahanan /Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas” memenuhi target dengan target 94%;
- “Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal” memenuhi target dengan target 97%;
- “Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani” memenuhi target dengan target 80%;
- “Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar” memenuhi target dengan target 85%;
- “Persentase tahanan/ narapidana/ Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar” memenuhi target dengan target 85%;
- “Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)” memenuhi target dengan target 80%; dan
- “Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika” memenuhi target dengan target 27%;



Gambar 3.10 Sasaran Kegiatan 9 dan Indikator Kinerja Kegiatan Divisi PAS

• **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak sesuai dengan standar”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	80%	100%	125% ----- $\frac{100\%}{80\%} \times 100\%$

Tabel 3.101 Capaian Target dan Realisasi SK 9 dan IKK 1 Tahun 2023 Div. PAS

Jumlah pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak dibagi Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak dikali 100%.

$$\% \text{ Pemenuhan Layanan Makanan} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak

B = Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak

Dalam satu semester di Tahun 2023 UPT masyarakatan memenuhi layanan secara penuh dengan 6765 Warga Binaan Masyarakatan menerima pemenuhan Layanan Makanan.

$$\begin{aligned} \% \text{ Pemenuhan Layanan Makanan} &= \frac{6765}{6765} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	-	-	-	80%	100%	125%

Tabel 3.102 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 9 dan IKK 1 Div. PAS

“Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak sesuai dengan standar” tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022 sehingga tidak bisa dibandingkan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
71%	75%	80%	85%

Tabel 3.103 Rencana Strategis SK 9 dan IKK 1 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra, realisasi “Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak sesuai dengan standar” berada di angka 100% dan sudah memenuhi standar untuk menghadapi Tahun 2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran “Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak sesuai dengan standar” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Pemenuhan layanan makanan dapat dilaksanakan karena perencanaan anggaran yang tepat dan sesuai dengan kondisi pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pemenuhan layanan makanan harus menyesuaikan dengan gizi yang di terima oleh WBP berdasarkan BAMA yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis Masyarakat.

• **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106% ----- $\frac{100\%}{94\%} \times 100\%$

Tabel 3.103 Capaian Target dan Realisasi SK 9 dan IKK 2 Tahun 2023 Div. PAS

Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dibagi Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak dikali 100%.

$$\% \text{ Layanan Kesehatan (preventif)} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

B = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak

Sebanyak 100% yang berjumlah 6765 mendapatkan pelayanan kesehatan (preventif) yang berkualitas walaupun dengan terbatasnya tenaga kesehatan yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.

$$\begin{aligned} \% \text{ Layanan Kesehatan (preventif)} &= \frac{6765}{6765} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	-	-	-	94%	100%	106%

Tabel 3.104 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 9 dan IKK 2 Div. PAS

“Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas” tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022 sehingga tidak dapat dibandingkan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
92%	93%	94%	95%

Tabel 3.105 Rencana Strategis SK 9 dan IKK 2 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra, realisasi “Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas” yang berada di angka 100% dan sudah memenuhi standar untuk menghadapi Tahun 2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional
 Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran “Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
 Kecekan Unit Pelaksana Teknis dalam memanfaatkan Fasilitas Kesehatan sehingga semua WBP mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
 Kurangnya tenaga kesehatan yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan, mengharuskan UPT untuk meningkatkan kerja sama dengan Rumah Sakit dan Klinik agar WBP tetap menerima pelayanan kesehatan secara maksimal.

• **Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%	103% ----- $\frac{100\%}{97\%} \times 100\%$

Tabel 3.106 Capaian Target dan Realisasi SK 9 dan IKK 3 Tahun 2023 Div. PAS

Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal dibagi Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) dikali 100%.

$$\% \text{ Layanan Kesehatan Maternal} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

B = Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)

Di tahun 2023 UPT Pemasarakatan di Kalimantan Barat mempunyai WBP ibu hamil dan menyusui sebanyak 1 WBP dari Lapas Ketapang.

$$\begin{aligned} \% \text{ Layanan Kesehatan Maternal} &= \frac{1}{1} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	-	-	-	97%	100%	106%

Tabel 3.107 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 9 dan IKK 3 Div. PAS

“Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal” tidak termasuk dalam indikator kinerja kegiatan Tahun 2022 sehingga tidak dapat dibandingkan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
95%	96%	97%	98%

Tabel 3.108 Rencana Strategis SK 9 dan IKK 3 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra, realisasi “Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal” berada di angka 100% dan sudah memenuhi standar untuk menghadapi Tahun 2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran “Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Ibu hamil dan menyusui mendapat akses layanan kesehatan maternal dikarenakan pada semua UPT terdapat tenaga kesehatan dan juga melakukan kerja sama dengan instansi kesehatan di sekitar seperti Puskesmas.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Perlu penambahan Tenaga Kesehatan khususnya Bidan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan maternal terhadap WBP Perempuan Khususnya Ibu Hamil dan Menyusui.

• **Indikator Kinerja Kegiatan 4 “Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	125% ----- $\frac{100\%}{80\%} \times 100\%$

Tabel 3.110 Capaian Target dan Realisasi SK 9 dan IKK 4 Tahun 2023 Div. PAS

Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dibagi Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dikali 100%.

$$\% \text{ Penanganan Gangguan Mental} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

B = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental

Di Tahun 2023 UPT Pemasarakatan di Kalimantan Barat memiliki 12 WPB dengan gangguan mental.

$$\begin{aligned} \% \text{ Penanganan Gangguan Mental} &= \frac{12}{12} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	-	-	-	80%	100%	125%

Tabel 3.111 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 9 dan IKK 4 Div. PAS

“Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani” tidak termasuk dalam indikator kinerja kegiatan Tahun 2022 sehingga tidak dapat dibandingkan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
60%	70%	80%	90%

Tabel 3.112 Rencana Strategis SK 9 dan IKK 4 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra, realisasi “Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan

mental dapat tertangani” berada pada persentase 100% dan sudah memenuhi standar untuk menghadapi Tahun 2024.

- 4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional
 Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran “Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- 5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
 Semua WBP yang memiliki gangguan mental mendapatkan pelayanan kesehatan dengan bantuan pihak eksternal yaitu Rumah Sakit yang memiliki layanan kesehatan mental, sehingga WBP dengan gangguan mental dapat ditangani.
- 6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
 Perlu melakukan kerja sama lebih lanjut dengan layanan kesehatan eksternal di luar Lapas, Rutan, dan LPKA.

• **Indikator Kinerja Kegiatan 5 “Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar”**

- 1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117% ----- $\frac{100\%}{85\%} \times 100\%$

Tabel 3.113 Capaian Target dan Realisasi SK 9 dan IKK 5 Tahun 2023 Div. PAS

Jumlah Tahanan/ Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi Jumlah Tahanan/ Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%.

$$\% \text{Layanan Kesehatan Sesuai Standar Bagi Lansia} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan

B = Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang membutuhkan layanan kesehatan

Seluruh Tahanan/ Narapidana Lansia yang berjumlah 252 WBP mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang ditetapkan Ditjen Pemasyarakatan.

$$\begin{aligned} \% \text{Layanan Kesehatan Sesuai Standar Bagi Lansia} &= \frac{6765}{6765} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	-	-	-	85%	100%	117%

Tabel 3.114 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 9 dan IKK 5 Div. PAS

“Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar” tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022 sehingga tidak bisa dibandingkan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
75%	80%	85%	90%

Tabel 3.115 Rencana Strategis SK 9 dan IKK 5 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra, realisasi “Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar” berada di angka 100% dan sudah memenuhi standar untuk menghadapi Tahun 2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran “Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Kecekatan Unit Pelaksana Teknis dalam memanfaatkan Fasilitas Kesehatan sehingga semua WBP lansia mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kurangnya tenaga kesehatan yang dimiliki oleh UPT Pemasarakatan, mengharuskan UPT untuk meningkatkan kerja sama dengan Rumah Sakit dan Klinik agar WBP tetap menerima pelayanan kesehatan secara maksimal.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 6 “Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117% ----- $\frac{100\%}{85\%} \times 100\%$

Tabel 3.116 Capaian Target dan Realisasi SK 9 dan IKK 6 Tahun 2023 Div. PAS

Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%.

$$\% \text{ Layanan Kesehatan Berkebutuhan Khusus (Disabilitas)} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan

B = Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan

Dari total WBP di Kalimantan Barat terdapat 47 WBP dengan keadaan disabilitas, dimana seluruh WBP dengan disabilitas mendapatkan layanan kesehatan yang ditetapkan oleh Ditjen Pemasyarakatan.

$$\begin{aligned} \% \text{ Layanan Kesehatan Berkebutuhan Khusus (Disabilitas)} &= \frac{47}{47} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	-	-	-	85%	100%	117%

Tabel 3.117 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 9 dan IKK 6 Div. PAS

“Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar” tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022 sehingga tidak dapat dibandingkan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
75%	80%	85%	90%

Tabel 3.118 Rencana Strategis SK 9 dan IKK 6 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra, realisasi “Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar” yang berada di angka 100% dan sudah memenuhi standar untuk menghadapi Tahun 2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran “Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Semua UPT di Kalimantan Barat memiliki Unit Layanan Disabilitas sehingga bisa dipastikan semua WBP dengan Disabilitas mendapat pelayanan khusus yang sesuai.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Melakukan penilaian awal yang komprehensif terhadap narapidana dengan disabilitas untuk mengidentifikasi kebutuhan kesehatan mereka secara spesifik. Hal ini meliputi evaluasi medis, psikologis, dan rehabilitasi, serta penilaian terhadap akses fasilitas dan kebutuhan perawatan khusus.

• **Indikator Kinerja Kegiatan 7 “Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%	125% ----- $\frac{100\%}{80\%} \times 100\%$

Tabel 3.119 Capaian Target dan Realisasi SK 9 dan IKK 7 Tahun 2023 Div. PAS

$$\% \text{ Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular} = \frac{A + B}{2} \times 100\%$$

$$A = \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV AIDS ditekan jumlah virusnya}}{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV AIDS}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh}}{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif}} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Keberhasilan Penanganan Narapidana dengan HIV-AIDS

B = Keberhasilan Penanganan Narapidana TB Positif.

Pelaksanaan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) pada Semester I Tahun 2023 telah dilaksanakan dengan baik. Dalam pelaksanaan penanganan penyakit menular HIV-AIDS menggunakan obat Antiretroviral (ARV) yang merupakan bagian dari pengobatan HIV dan AIDS untuk mengurangi risiko penularan HIV, menghambat perburukan infeksi oportunistik, meningkatkan kualitas hidup penderita HIV, dan menurunkan jumlah virus (*viral load*) dalam darah sampai tidak terdeteksi. Sehingga dari target yang ditentukan sebesar 80% didapatkan realisasi sebesar 100%.

$$A = \frac{16}{16} \times 100\% = 100\%$$

$$B = \frac{16}{16} \times 100\% = 100\%$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular} &= \frac{100\% + 100\%}{2} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	-	-	-	80%	100%	125%

Tabel 3.120 Rencana Strategis SK 9 dan IKK 7 Div. PAS

“Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)” tidak termasuk dalam indikator kinerja kegiatan Tahun 2022 sehingga tidak dapat dibandingkan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
60%	70%	80%	90%

Tabel 3.121 Rencana Strategis SK 9 dan IKK 7 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra, realisasi “Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)” berada di angka 100% dan sudah memenuhi standar untuk menghadapi Tahun 2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran “Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-

AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Pemeriksaan rutin dan deteksi dini HIV-AIDS dan TB pada Narapidana. Pemeriksaan ini harus mencakup skrining yang teratur, tes laboratorium, dan pengamatan klinis untuk mengidentifikasi kasus baru dengan segera.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Menetapkan kebijakan untuk melakukan pemeriksaan rutin dan deteksi dini HIV-AIDS dan TB pada Narapidana. Pemeriksaan ini harus mencakup skrining yang teratur, tes laboratorium, dan pengamatan klinis untuk mengidentifikasi kasus baru dengan segera. Narapidana yang positif harus segera diberikan pengobatan yang tepat.

• **Indikator Kinerja Kegiatan 8 “Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika	27%	36%	----- $\frac{36\%}{27\%} \times 100\%$

Tabel 3.122 Capaian Target dan Realisasi SK 9 dan IKK 8 Tahun 2023 Div. PAS

Jumlah perubahan kualitas hidup Narapidana pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika dibagi jumlah Narapidana pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan rehabilitasi dikali 100%.

$$\% \text{ Perubahan Kualitas Hidup Penyalahgunaan Narkoba} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Perubahan kualitas hidup Narapidana pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika

B = Jumlah Narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan Rehabilitasi

Sebanyak 143 Narapidana kualitas hidupnya meningkat setelah mendapatkan layanan rehabilitasi.

$$\begin{aligned} \% \text{ Perubahan Kualitas Hidup Penyalahgunaan Narkoba} &= \frac{143}{388} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika	-	-	-	27%	36%	133%

Tabel 3.123 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 9 dan IKK 8 Div. PAS

“Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika” tidak termasuk dalam indikator kinerja kegiatan Tahun 2022 sehingga tidak dapat dibandingkan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
23%	25%	27%	29%

Tabel 3.124 Rencana Strategis SK 9 dan IKK 8 Div. PAS

Berdasarkan hasil perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra, realisasi “Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika” berada pada persentase 36% dan sudah memenuhi standar untuk menghadapi Tahun 2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran “Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Petugas rehabilitasi yang ditunjuk oleh Unit Pelaksana Teknis melakukan pekerjaan yang baik.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap program rehabilitasi yang dilakukan di UPT Pemasarakatan. Ini membantu dalam mengidentifikasi keberhasilan, kelemahan, dan area yang perlu ditingkatkan. Evaluasi ini juga memungkinkan penyesuaian program agar lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan narapidana yang sedang direhabilitasi.

3. Divisi Keimigrasian

Capaian kinerja pada Divisi Keimigrasian diukur oleh 1 Sasaran Kegiatan yaitu **“Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah”** dengan 2 Indikator Kinerja Kegiatan. Capaian kinerja pada Divisi Keimigrasian telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Surat

Direktur Jenderal Imigrasi tanggal 03 Januari 2024 nomor IMI.1-PW.01.02-001 hal Penyampaian Hasil Pengukuran Indeks Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Sasaran Kegiatan I
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah” memenuhi target dengan target 3,25 Indeks dan “Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah” memenuhi target dengan target 3,13 Indeks.



Gambar 3.11 Sasaran Kegiatan 1 dan Indikator Kinerja Kegiatan Divisi Keimigrasian

• **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 Indeks	3,94 Indeks	121% ----- $\frac{3,94}{3,25} \times 100\%$

Tabel 3.125 Capaian Target dan Realisasi SK 1 dan IKK 1 Tahun 2023 Div. Keimigrasian

Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00 s.d. 4,00.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks	3,92 Indeks	123,5%	3,25 Indeks	3,94 Indeks	121,2%

Tabel 3.126 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 1 dan IKK 1 Div. Keimigrasian

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2022 dan 2023, realisasi “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah” mengalami peningkatan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
70%	80%	90%	100%

Tabel 3.127 Rencana Strategis SK 1 dan IKK 1 Div. Keimigrasian

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target jangka menengah dalam Renstra Indeks Kepuasan Masyarakat Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat pada tahun 2023, telah tercapai, namun jika dibandingkan dengan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022 adalah sebesar 3,92 maka realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat di Tahun 2023 sebesar 3,94 indeks sehingga mengalami kenaikan atau nilai capaian kinerja sebesar 0,51 %.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Perbandingan dengan standar nasional tidak dapat dilakukan karena “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah” hanya dimiliki oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Kegiatan ini hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan capaian target Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dapat melebihi target yang ditetapkan karena jajaran satuan kerja UPT Keimigrasian di Wilayah Kalimantan Barat dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga indeks kepuasan masyarakat meningkat. Dengan menerapkan 3 Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Surat Direktur Jenderal Imigrasi nomor IMI.1-PW.01.02-001 hal Penyampaian Hasil Pengukuhan Indeks Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Dengan menilik nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, dari tabel Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian Per Unsur Layanan Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa dari 8 unsur yang digunakan sebagai variabel penilaian antara lain unsur layanan informasi, persyaratan, prosedur/alur, waktu penyelesaian, tarif/biaya, sarana dan prasarana, respon dan konsultasi/pengaduan dimana memiliki nilai yang mendukung nilai Indeks Kepuasan Masyarakat keseluruhan. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh unsur kepuasan masyarakat secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan layanan publik yang konsisten dan berkualitas.

• **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 Indeks	3,55 Indeks	113% ----- $\frac{3,55}{3,13} \times 100\%$

Tabel 3.128 Capaian Target dan Realisasi SK 1 dan IKK 2 Tahun 2023 Div. Keimigrasian

Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00 s.d. 4,00.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks	3,72 Indeks	119%	3,13 Indeks	3,55 Indeks	113%

Tabel 3.129 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 1 dan IKK 2 Div. Keimigrasian

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2022 dan 2023, realisasi “Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah” mengalami sedikit penurunan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam renstra realisasi nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Tahun 2023 sudah terlampaui. Sebab realisasi nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2022 adalah sebesar 3,72 sementara realisasi nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian di Tahun 2023 sebesar 3,55 indeks sehingga mengalami penurunan atau nilai capaian kinerja sebesar 4,57 %.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Perbandingan dengan standar nasional tidak dapat dilakukan karena “Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah” hanya dimiliki oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Namun untuk Satuan Kerja Imigrasi dapat mengacu nilai capaian indeks pengamanan keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai standar nasional. Kegiatan ini hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan capaian target “Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah” yang diperoleh dapat melebihi target yang ditetapkan karena jajaran Keimigrasian di Wilayah Kalimantan Barat bekerja secara profesional dengan menerapkan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Imigrasi nomor IMI.1-PW.01.02-001 tanggal 2 Januari 2024 hal Penyampaian Hasil Pengukuran Indeks Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023, capaian hasil survey pengamanan

keimigrasian untuk Tahun 2023 sebesar 3.55 Indeks dengan grade A dari target 3.13 Indeks. Maka capaian yang didapat sebesar 113%.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

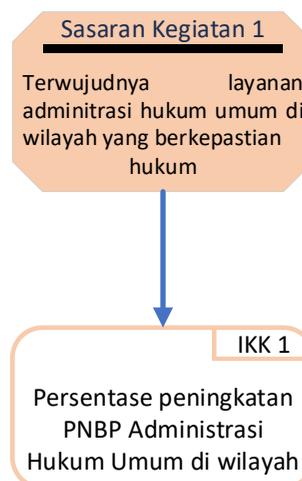
Tahun 2022 capaian nilai indeks yang diperoleh sebesar 3.72 dengan target 3.12 mendapatkan capaian sebesar 19% sedangkan pada Tahun 2023 nilai capaian indeks yang diperoleh sebesar 3.55 dengan target 3.13 mendapatkan capaian sebesar 13%. Dibandingkan Tahun 2022 terdapat penurunan capaian pada Tahun 2023, namun tingkat pengamanan keimigrasian di Wilayah Kalimantan Barat masih dapat dilaksanakan dengan baik melebihi target yang telah ditentukan Direktorat Jenderal Imigrasi.

4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Capaian kinerja pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM diukur oleh 11 Sasaran Kegiatan dengan 22 Indikator Kinerja Kegiatan. Capaian kinerja pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM terbagi menjadi 6 DIPA yang ada pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yaitu Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM.

Sasaran Kegiatan I
Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah” memenuhi target dengan target 5%.



Gambar 3.12 Sasaran Kegiatan 1 dan Indikator Kinerja Kegiatan Divisi YankumHAM

• **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	7,27%	145,4% ----- $\frac{7,27\%}{5\%} \times 100\%$

Tabel 3.130 Capaian Target dan Realisasi SK 1 dan IKK 1 Tahun 2023 Div. YankumHAM

$$\% \text{Peningkatan PNBP AHU di Wilayah} = \frac{A - B}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah PNBP tahun berjalan

B = Jumlah PNBP tahun sebelumnya

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Ditjen AHU memiliki beragam jenis layanan hukum yang menghasilkan PNBP dari masyarakat. Dengan peningkatan kualitas layanan tiap tahunnya, diharapkan masyarakat dapat terlayani dengan baik dan tentunya dapat membantu perekonomian negara Indonesia. Melalui Kantor Wilayah Hukum dan HAM, khususnya Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, menjadi perpanjangan tangan Ditjen AHU di wilayah untuk menyampaikan informasi maupun konsultasi mengenai layanan AHU.

Berkaitan dengan hal ini, ditetapkan indikator kinerja kegiatan pada Kantor Wilayah yaitu persentase peningkatan PNBP administrasi hukum umum di wilayah. Formulasi perhitungan capaian indikator kegiatan, yaitu jumlah PNBP tahun berjalan dikurang jumlah PNBP tahun sebelumnya, dibagi jumlah PNBP tahun sebelumnya, dikali 100%. Target yang hendak dicapai di Tahun 2023 yaitu 5%. Berdasarkan data Direktorat Jenderal AHU capaian PNBP Kanwil Kalbar Tahun 2022 sebesar Rp.7.762.900.000,- dan capaian PNBP Tahun 2023 sebesar Rp.8.327.800.000,-, sehingga menurut perhitungan rumus di atas realisasi peningkatan PNBP Tahun 2023 sebesar 7,27%.

$$\begin{aligned} \% \text{Peningkatan PNBP AHU di Wilayah} &= \frac{\text{Rp. 8.327.800.000} - \text{Rp. 7.762.900.000}}{\text{BRp. 7.762.900.000}} \times 100\% \\ &= 7,27\% \end{aligned}$$

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	3,99%	79,8%	5%	7,27%	145,4%

Tabel 3.131 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 1 dan IKK 1 Div. YankumHAM

Capaian PNBPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Tahun 2023 sebesar Rp.8.327.800.000, capaian PNBPA Tahun 2022 sebesar Rp.7.762.900.000,-. Dalam hal ini ada peningkatan PNBPA administrasi hukum umum di wilayah dibandingkan tahun sebelumnya dengan realisasi peningkatan PNBPA tahun 2023 sebesar 7,27%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
5%	5%	5%	5%

Tabel 3.132 Rencana Strategis SK 1 dan IKK 1 Div. Yankum

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM, Realisasi peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah sebesar 7,27% melebihi target yang ditetapkan sebesar 5%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan Standar Nasional mengingat kegiatan pengukuran “Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan peningkatan PNBPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat dapat dicapai dengan dilakukannya sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan *stakeholder* dalam penggunaan layanan AHU seperti Apostille, Perseroan Perorangan, Pengajuan Permohonan Pewarganegaraan, dan layanan AHU lainnya. Selain itu juga dibangun kerjasama yang baik antara Kantor Wilayah dan Notaris di dalam melaksanakan tugas profesinya. Sehingga di dalam penggunaan layanan AHU Online ketika Notaris mendapat kendala, dapat dikoordinasikan dengan kantor wilayah untuk selanjutnya diteruskan ke tingkat pusat (Ditjen AHU).

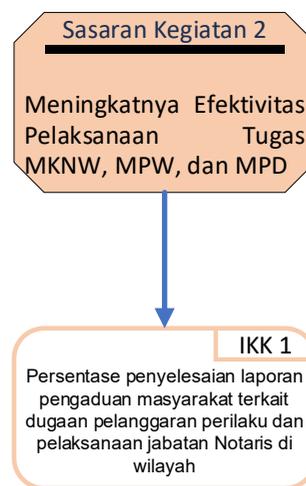
6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Dilaksanakannya Kegiatan Sosialisasi Layanan AHU kepada masyarakat/*stakeholder* terkait. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan untuk menyebarluaskan informasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat/*stakeholder* mengenai Layanan AHU seperti Apostille,

Perseroan Perorangan, Permohonan Pewarganegaraan, Badan Hukum, dan layanan lainnya. Selain itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat juga melakukan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait dan Notaris untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan dan kendala dalam menggunakan Layanan AHU pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Permasalahan/ kendala ini selanjutnya akan diakomodir kantor wilayah untuk dicari solusi penyelesaiannya.

Sasaran Kegiatan 2
Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas MKNW, MPW, dan MPD

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah” memenuhi target dengan target 86%.



Gambar 3.13 Sasaran Kegiatan 2 dan Indikator Kinerja Kegiatan Divisi YankumHAM

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%	100%	$\frac{100\%}{86\%} \times 100\%$

Tabel 3.133 Capaian Target dan Realisasi SK 2 dan IKK 1 Tahun 2023 Div. YankumHAM

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang. Dalam hal pelaksanaan pembinaan Notaris dan juga pemberian persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir

dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Selain berada di pusat, terdapat juga Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW). Sedangkan untuk pembinaan dan pengawasan terhadap notaris menjadi tanggung jawab Majelis Pengawas Notaris. Terdapat Majelis Pengawas Daerah (MPD), Wilayah (MPW), dan Pusat. Adapun untuk pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD, terdapat peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Untuk dapat mengukur kinerja ketiga badan tersebut serta memastikan pengaduan masyarakat mengenai perilaku notaris, ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah”. Formulasi perhitungan capaian Indikator Kinerja Kegiatan tersebut yaitu jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh laporan pengaduan masyarakat yang masuk dikali 100%. Target di Tahun 2023 yaitu 86%. Adapun Jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 11 pengaduan dan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat sebanyak 11 pengaduan diselesaikan. Sehingga Capaian Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah sebesar 116 %.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	84%	100%	119%	86%	100%	116%

Tabel 3.134 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 2 dan IKK 1 Div. YankumHAM

Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah Kalimantan Barat Tahun 2023 sebesar 100% dengan capaian 116%. “Persentase Penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah” Tahun 2022 sebesar 100% dengan capaian 119%. Capaian Tahun 2023 sebesar 116%, Capaian Tahun 2022 sebesar 119%, hal ini dapat terjadi karena target capaian naik dari semula 84% menjadi 86% sehingga angka pembagi dalam perhitungan capaian bertambah, namun dalam realisasi penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan

pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah tahun 2022 dan tahun 2023 tetap sama yaitu 100%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
82%	84%	86%	88%

Tabel 3.135 Rencana Strategis SK 2 dan IKK 1 Div. YankumHAM

Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah sebesar 100% melebihi target yang ditetapkan sebesar 86%.

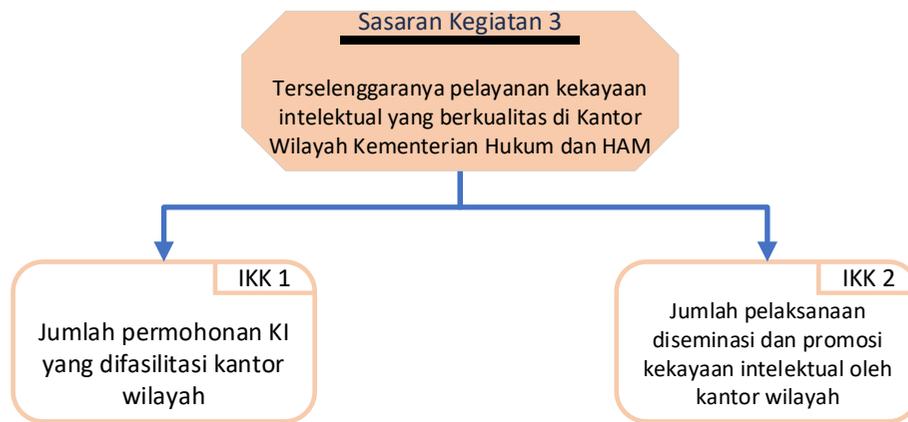
4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional
 Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan Standar Nasional mengingat kegiatan pengukuran “Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
 Keberhasilan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah Kalimantan Barat Tahun 2023 dapat dicapai dengan dilakukannya koordinasi dan kerja sama yang baik antara Kantor Wilayah dengan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW), Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN), dan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) serta Pengwil/Pengda INI. Semua pihak dalam unsur tersebut berkolaborasi dan bersinergitas untuk menciptakan Notaris yang profesional.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
 Program/ Kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat dalam menunjang Keberhasilan adalah dilaksanakannya Rapat MKNW sebagai wujud dari perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris dan perlindungan hukum terhadap masyarakat. MKNW dapat membantu penyidik dalam menentukan ada tidaknya unsur pidana terkait dengan Minuta Akta dan Protokol Notaris. Selain itu juga dilaksanakan Rapat MPWN dan MPDN untuk meningkatkan pengawasan terhadap Notaris agar dapat menjalankan tugas dan jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sasaran Kegiatan 3
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu “Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah” memenuhi target dengan target 133 Layanan dan “Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah” memenuhi target dengan target 1 Lokus.



Gambar 3.14 Sasaran Kegiatan 3 dan Indikator Kinerja Kegiatan Divisi YankumHAM

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah”**

- 1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	170 Pemohon	280 Pemohon	164% ----- $\frac{280}{170} \times 100\%$

Tabel 3.136 Capaian Target dan Realisasi SK 3 dan IKK 1 Tahun 2023 Div. YankumHAM

Meningkatnya Pelayanan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah dengan bertambahnya jumlah pemohon yang melebihi dari target capaian Tahun Anggaran 2023.

- 2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	138 Pemohon	263 Pemohon	190%	170 Pemohon	280 Pemohon	164%

Tabel 3.137 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 3 dan IKK 1 Div. YankumHAM

Realisasi “Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah” pada Tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 17 pemohon dibandingkan dengan Tahun 2022.

- 3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
145	138	170	170

Tabel 3.138 Rencana Strategis SK 3 dan IKK 1 Div. YankumHAM

Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah sebanyak 280 pemohon telah melebihi target yang ditetapkan pada Tahun 2023 sebanyak 170 Pemohon.

- 4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional
 Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan Standar Nasional mengingat kegiatan pengukuran “Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- 5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
 Indikator “Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah” yang melebihi target disebabkan oleh keberhasilan Sub Bidang Pelayanan KI dalam menjalankan kegiatan yang telah dirancang.
- 6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
 Kegiatan yang dilakukan dalam menunjang keberhasilan IKK “Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah” adalah sebagai berikut:
 - a. Mengimplementasikan Mou dan PKS yang telah dilaksanakan dengan Pemerintah Daerah;
 - b. Menambah jumlah peserta Kegiatan Promosi dan Diseminasi dari tahun sebelumnya;
 - c. Menambah Volume Kegiatan dan jumlah peserta kegiatan Pendampingan Permohonan KI;
 - d. Adanya Peningkatan Kualitas SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
 - e. Meningkatnya Jumlah Pemohon Pendaftaran Kekayaan Intelektual yang di Fasilitas Kantor Wilayah dari tahun sebelumnya.

• **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	2 Lokus	4 Lokus	200% ----- $\frac{4}{2} \times 100\%$

Tabel 3.139 Capaian Target dan Realisasi SK 3 dan IKK 2 Tahun 2023 Div. YankumHAM

Meningkatnya pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah dengan bertambahnya jumlah lokus yang melebihi dari target capaian Tahun Anggaran 2023.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	4 Lokus	400%	2 Lokus	4 Lokus	200%

Tabel 3.140 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 3 dan IKK 2 Div. YankumHAM

Realisasi “Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah” pada Tahun 2023 konsisten pada 4 lokus sehingga capaian kinerjanya menurun karena target pada Tahun 2023 lebih tinggi daripada Tahun 2022.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
1	1	2	2

Tabel 3.141 Rencana Strategis SK 3 dan IKK 2 Div. YankumHAM

Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah sebanyak 4 lokus telah melebihi target yang ditetapkan pada Tahun 2023 sebanyak 2 lokus.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan Standar Nasional mengingat kegiatan pengukuran “Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Indikator “Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah” yang melebihi target disebabkan oleh keberhasilan Sub Bidang Pelayanan KI dalam menjalankan kegiatan yang telah dirancang.

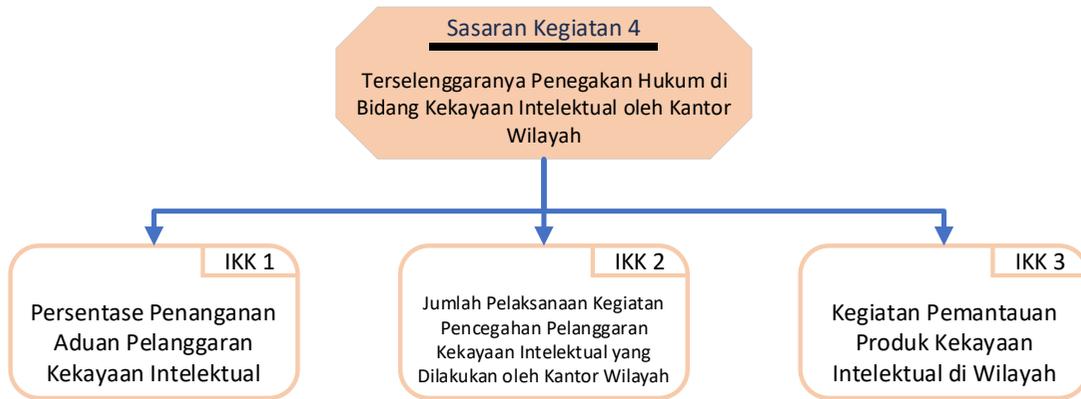
6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan yang dilakukan dalam menunjang keberhasilan IKK “Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah” adalah melaksanakan Mou dan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan melaksanakan kegiatan promosi dan diseminasi di kabupaten/kota sehingga menambah persentase *stakeholder* yang memperoleh pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya Kekayaan Intelektual.

Sasaran Kegiatan 4
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

- “Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual” memenuhi target dengan target 100%;
- “Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah” memenuhi target dengan target 2 Lokus; dan
- “Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah” memenuhi target dengan target 1 Laporan.



Gambar 3.15 Sasaran Kegiatan 4 dan Indikator Kinerja Kegiatan Divisi YankumHAM

• **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%	$\frac{100}{100} \times 100\%$

Tabel 3.142 Capaian Target dan Realisasi SK 4 dan IKK 1 Tahun 2023 Div. YankumHAM

Target penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual telah tercapai dengan persentase realisasi sebesar 100%.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.143 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 4 dan IKK 1 Div. YankumHAM

Realisasi “Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual” di Tahun 2023 konsisten pada persentase 100% dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2022.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
100%	100%	100%	100%

Tabel 3.144 Rencana Strategis SK 4 dan IKK 1 Div. YankumHAM

Jumlah realisasi penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual telah sesuai dengan target yang ditetapkan pada Tahun 2023 sebanyak 100%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan Standar Nasional mengingat kegiatan pengukuran “Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Indikator “Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual” yang dapat mencapai target disebabkan oleh keberhasilan Sub Bidang Pelayanan KI dalam menjalankan kegiatan yang telah dirancang.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan yang dilakukan dalam menunjang keberhasilan IKK “Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah” yaitu menjalin kolaborasi dan sinergisitas Kantor Wilayah dengan Aparat Penegak Hukum di Wilayah serta memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi bagi kedua belah pihak yang berperkara.

• **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	5 Lokus	250% ----- $\frac{5}{2} \times 100\%$

Tabel 3.145 Capaian Target dan Realisasi SK 4 dan IKK 2 Tahun 2023 Div. YankumHAM

Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah dengan bertambahnya jumlah lokus yang melebihi dari target capaian Tahun Anggaran 2023.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	4 Lokus	200%	2 Lokus	5 Lokus	250%

Tabel 3.146 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 4 dan IKK 2 Div. YankumHAM

Realisasi “Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah” mengalami peningkatan sebanyak 5 lokus pada Tahun 2023 yang menyebabkan capaian kerjanya mengalami peningkatan sebanyak 50% dari capaian kinerja pada Tahun 2022.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
1	2	2	2

Tabel 3.147 Rencana Strategis SK 4 dan IKK 2 Div. YankumHAM

Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah sebanyak 5 lokus telah melebihi target yang ditetapkan pada Tahun 2023 sebanyak 2 lokus.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan Standar Nasional mengingat kegiatan pengukuran “Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Indikator “Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah” yang melebihi target disebabkan oleh keberhasilan Sub Bidang Pelayanan KI dalam menjalankan kegiatan yang telah dirancang.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan yang dilakukan dalam menunjang keberhasilan IKK “Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah” adalah:

- Melakukan koordinasi dan Konsultasi dengan Stake Holder di Kabupaten/Kota;
- Melaksanakan Kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum di Daerah; dan
- Memberikan pelayanan Hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

• **Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	2 Laporan	3 Laporan	150% ----- $\frac{3}{2} \times 100\%$

Tabel 3.148 Capaian Target dan Realisasi SK 4 dan IKK 3 Tahun 2023 Div. YankumHAM

Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemantauan produk Kekayaan Intelektual di wilayah dengan bertambahnya jumlah laporan yang melebihi dari target capaian Tahun Anggaran 2023.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	3 Laporan	150%

Tabel 3.149 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 4 dan IKK 3 Div. YankumHAM Realisasi “Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah” pada Tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 3 laporan pada Tahun 2023 yang menyebabkan capaian kinerjanya mengalami peningkatan sebanyak 50% dari capaian kinerja pada Tahun 2022.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
2	2	2	2

Tabel 3.150 Rencana Strategis SK 4 dan IKK 3 Div. YankumHAM

Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan produk Kekayaan Intelektual di wilayah sebanyak 3 laporan telah melebihi target yang ditetapkan pada Tahun 2023 sebanyak 2 laporan.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional
 Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan Standar Nasional mengingat kegiatan pengukuran “Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
 Indikator “Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah” yang melebihi target disebabkan oleh keberhasilan Sub Bidang Pelayanan KI dalam menjalankan kegiatan yang telah dirancang.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
 Kegiatan yang dilakukan dalam menunjang keberhasilan IKK “Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah” adalah:

- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan *stakeholder* di Kabupaten/Kota;
- Melaksanakan kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum di daerah;
- Memberikan pelayanan Hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Sasaran Kegiatan 5
Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di Wilayah

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu “Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia” memenuhi target dengan target 80% dan “Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah” memenuhi target dengan target 1 Buku.



Gambar 3.16 Sasaran Kegiatan 5 dan Indikator Kinerja Kegiatan Divisi YankumHAM

• **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%	100%	125% ----- $\frac{100}{80} \times 100\%$

Tabel 3.151 Capaian Target dan Realisasi SK 5 dan IKK 1 Tahun 2023 Div. YankumHAM

Tercapainya “Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia” dengan realisasi yang melebihi dari target capaian Tahun Anggaran 2023.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%	75%	107%	80%	100%	125%

Tabel 3.152 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 5 dan IKK 1 Div. YankumHAM

Realisasi “Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia” pada Tahun

2023 mengalami peningkatan sebanyak 25% dibandingkan dengan Tahun 2022.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
70%	80%	80%	80%

Tabel 3.153 Rencana Strategis SK 5 dan IKK 1 Div. YankumHAM

Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia sebesar 100% telah melebihi target yang ditetapkan pada Tahun 2023 yaitu sebesar 80%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional
Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan Standar Nasional mengingat kegiatan pengukuran “Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Terdapat 3 rekomendasi hasil penelitian pada triwulan II, III, dan IV, dengan semua rekomendasi tersebut dibuat sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia dengan format penyempurnaan laporan analisis kebijakan.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan yang dilakukan dalam menunjang keberhasilan IKK “Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia” adalah sebagai berikut:

- a. Membuat perbandingan capaian kinerja yang memadai sesuai dengan target rekomendasi kajian;
- b. Membuat evaluasi dan Analisis pencapaian kinerja;
- c. Menyusun akuntabilitas keuangan secara jelas dengan memuat data capaian kinerja dan penyerapan anggaran;
- d. Melibatkan para stakeholder External dalam penyusunan kajian dan rekomendasi kajian baik Instansi Pemerintah Daerah maupun Akademisi;
- e. Memanfaatkan aplikasi SIPKUMHAM dalam penyusunan Analisis kebijakan permasalahan hukum dan HAM yang ada di Kalbar;
- f. Melaksanakan evaluasi dan monitoring IPK/IKM Provinsi Kalimantan Barat.

• **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	100% ----- $\frac{1}{1} \times 100\%$

Tabel 3.155 Capaian Target dan Realisasi SK 5 dan IKK 2 Tahun 2023 Div. YankumHAM

Meningkatnya pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah dengan bertambahnya jumlah lokus yang melebihi dari target capaian Tahun Anggaran 2023.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	100%	1 Buku	1 Buku	100%

Tabel 3.156 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 5 dan IKK 2 Div. YankumHAM

Realisasi “Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah” pada Tahun 2023 konsisten pada 1 buku dengan target capaian yang tidak mengalami peningkatan dari Tahun 2022 sehingga capaian kinerjanya dapat mencapai 100%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
1	1	1	1

Tabel 3.157 Rencana Strategis SK 5 dan IKK 2 Div. YankumHAM

Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah sebanyak 1 buku telah mencapai target yang ditetapkan pada Tahun 2023 sebanyak 1 buku.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan Standar Nasional mengingat kegiatan pengukuran “Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Sub Bidang Pemajuan HAM telah menetapkan jadwal serta judul penelitian yang akan disosialisasikan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

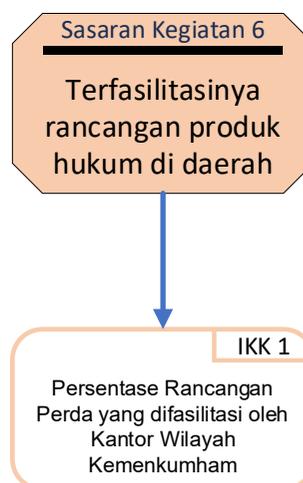
HAM Kalimantan Barat sehingga capaian target kinerja PK dapat diselesaikan dengan baik.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan yang dilakukan dalam menunjang keberhasilan IKK “Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah” adalah mematangkan tahapan persiapan pelaksanaan dan penyusunan buku laporan dengan membuat timeline untuk mengontrol waktu pelaksanaan.

Sasaran Kegiatan 6
Terasilitasinya rancangan produk hukum di daerah

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Persentase Rancangan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham” memenuhi target dengan target 80%.



Gambar 3.17 Sasaran Kegiatan 6 dan Indikator Kinerja Kegiatan Divisi YankumHAM

• **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Rancangan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase Rancangan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	100%	125% ----- $\frac{100\%}{80\%} \times 100\%$

Tabel 3.158 Capaian Target dan Realisasi SK 6 dan IKK 1 Tahun 2023 Div. YankumHAM

Telah dilakukan Pengharmonisan terhadap semua Permohonan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sepanjang Tahun 2023 yaitu sebanyak 75 Rancangan Peraturan Daerah dan 40 Rancangan Peraturan Kepala Daerah sehingga mendapatkan realisasi sebesar 100% dari target 80% dengan capaian sebesar 25%.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Rancangan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	100%	125%	80%	100%	125%

Tabel 3.159 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 6 dan IKK 1 Div. YankumHAM

Realisasi “Persentase Rancangan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham” pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 konsisten dengan persentase 100%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
80%	80%	80%	80%

Tabel 3.160 Rencana Strategis SK 6 dan IKK 1 Div. YankumHAM

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM, “Persentase Rancangan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham” sebesar 100% melebihi target yang ditetapkan sebesar 80%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan Standar Nasional mengingat kegiatan pengukuran “Persentase Rancangan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

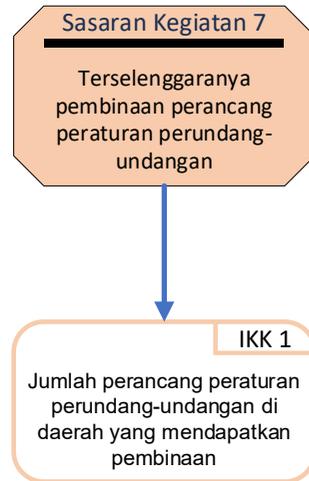
Meskipun terdapat peningkatan permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah dari tahun sebelumnya namun belum semua Pemerintah Daerah dan DPRD melakukan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerahnya ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Melakukan Sosialisasi terkait Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat dalam Pengharmonisasian.

Sasaran Kegiatan 7
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan” memenuhi target dengan target 20 orang.



Gambar 3.18 Sasaran Kegiatan 6 dan Indikator Kinerja Kegiatan Divisi YankumHAM

• **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	20 Orang	50 Orang	250% ----- $\frac{50}{20} \times 100\%$

Tabel 3.161 Capaian Target dan Realisasi SK 7 dan IKK 1 Tahun 2023 Div. YankumHAM

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat telah melakukan pembinaan terhadap seluruh Perancang Perundang-undangan pada kantor wilayah dan instansi di Kalimantan Barat. Pada tahun 2022 telah dilakukan pembinaan sebanyak 50 orang dengan target 20 orang sehingga mendapatkan realisasi sebesar 250% dari target.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	20 Orang	21 Orang	105%	20 Orang	50 Orang	250%

Tabel 3.162 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 7 dan IKK 1 Div. YankumHAM

Realisasi “Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan” mengalami peningkatan yang signifikan pada Tahun 2023 dengan persentase capaian kinerja sebesar 250%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
20	20	20	20

Tabel 3.163 Rencana Strategis SK 7 dan IKK 1 Div. YankumHAM

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM, “Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan” memiliki capaian sebanyak 50 orang melebihi target yang ditetapkan sebanyak 20 orang.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional
 Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan Standar Nasional mengingat kegiatan pengukuran “Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
 Keberhasilan peningkatan jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan tidak lepas dari kesuksesan Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum dan Daerah dalam menjalankan kegiatan yang menunjang keberhasilan. Selain itu pembinaan terhadap Perancang PUU juga dilakukan pada instansi di luar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
 Mengadakan Bimbingan Teknis dan Pendalaman Materi untuk seluruh Perancang PUU di seluruh Kalimantan Barat, baik secara langsung maupun daring.

Sasaran Kegiatan 8
Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah” memenuhi target dengan target 2 kegiatan.



Gambar 3.19 Sasaran Kegiatan 8 dan Indikator Kinerja Kegiatan Divisi YankumHAM

• **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100% ----- $\frac{2}{2} \times 100\%$

Tabel 3.164 Capaian Target dan Realisasi SK 8 dan IKK 1 Tahun 2023 Div. YankumHAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat telah melaksanakan kegiatan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik, Fasilitasi Penyusunan Prolegda, Analisis dan Evaluasi Hukum, dan peningkatan Pemahaman Penyusunan Naskah Akademik dan Prolegda. Pada tahun 2023 telah dilakukan sebanyak 2 kegiatan dengan target 2 kegiatan sehingga mendapatkan realisasi sebesar 100%.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%

Tabel 3.165 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 8 dan IKK 1 Div. YankumHAM Realisasi “Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah” konsisten sebanyak 2 kegiatan untuk Tahun 2022 dan 2023.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
2	2	2	2

Tabel 3.166 Rencana Strategis SK 8 dan IKK 1 Div. YankumHAM

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM, “Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah” memiliki capaian sebanyak 2 kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan sebanyak 2 kegiatan.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan Standar Nasional mengingat kegiatan pengukuran “Jumlah kegiatan perencanaan

pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator “Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah” tidak lepas dari kesuksesan Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum dan Daerah dalam menjalankan kegiatan yang menunjang keberhasilan.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Melakukan sosialisasi tentang tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat dalam Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah. Selain itu telah dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik, Fasilitasi Penyusunan Prolegda, Analisis dan Evaluasi Hukum, dan peningkatan Pemahaman Penyusunan Naskah Akademik dan Prolegda.

Sasaran Kegiatan 9
Meningkatnya Kesadaran Hukum Serta Terpenuhinya Akses Keadilan dan Informasi Hukum Masyarakat di Wilayah

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 5 (lima) indikator kinerja yaitu:

- “Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan!” memenuhi target dengan target 82%;
- “Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan” memenuhi target dengan target 80%;
- “Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum” memenuhi target dengan target 76,75 indeks;
- “Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah” memenuhi target dengan target 70%; dan
- “Persentase Website Anggota JDIHN Aktif yang Terintegrasi dengan Portal/Sistem Integrasi JDIHN” memenuhi target dengan target 20%.



Gambar 3.20 Sasaran Kegiatan 9 dan Indikator Kinerja Kegiatan Divisi YankumHAM

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	80%	92%	$\frac{92\%}{80\%} \times 100\%$

Tabel 3.167 Capaian Target dan Realisasi SK 9 dan IKK 1 Tahun 2023 Div. YankumHAM

Formulasi Perhitungan: Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dibagi seluruh permohonan bantuan hukum litigasi dikali 100%.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat telah melaksanakan pemberian bantuan hukum litigasi Tahun 2023 terhadap 5 Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi dan terverifikasi tahun 2022-2024. Diperoleh data per tanggal 06 Desember 2023, terdapat 105 Permohonan Bantuan Hukum Litigasi baik perkara pidana maupun perdata yang sudah diterima, sementara total permohonan bantuan hukum litigasi yang masuk sebanyak 114 berkas perkara. Sehingga diperoleh persentase realisasi permohonan bantuan hukum tahun 2023 adalah sebesar 92% dan sudah melampaui target yang ditentukan sebesar 82%.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	80%	76%	95%	82%	92%	115%

Tabel 3.168 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 9 dan IKK 1 Div. YankumHAM

Realisasi “Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan” pada Tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 16% dibandingkan dengan Tahun 2022.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
77%	81%	81%	81%

Tabel 3.169 Rencana Strategis SK 9 dan IKK 1 Div. YankumHAM

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM, realisasi “Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan” sebesar 92% melebihi target yang ditetapkan sebesar 81%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan Standar Nasional mengingat kegiatan pengukuran “Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Indikator “Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan” sudah melebihi target kinerja Tahun 2023. Namun masih terdapat permohonan bantuan hukum yang ditolak, dikarenakan berkas admistrasi yang tidak sesuai dengan aturan pencairan dana bantuan hukum.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Melaksanakan kegiatan asistensi dan pembinaan kepada Pemberi Bantuan Hukum terkait dengan tata cara pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, sehingga pemberian bantuan hukum dapat terlaksana sesuai dengan standar layanan pemberian bantuan hukum berdasarkan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.

• **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	80%	87%	109% ----- $\frac{87\%}{80\%} \times 100\%$

Tabel 3.170 Capaian Target dan Realisasi SK 9 dan IKK 2 Tahun 2023 Div. YankumHAM

Formulasi Perhitungan: Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum non litigasi dibagi seluruh permohonan bantuan hukum non litigasi dikali 100%.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat telah melakukan pemberian bantuan hukum Non Litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diperoleh data per tanggal 06 Desember 2023, terdapat 30 Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang mencakup Kegiatan Penyuluhan Hukum, Pemberdayaan Masyarakat, Mediasi, dan Drafting Dokumen Hukum. Sebanyak 26 permohonan bantuan hukum yang diajukan oleh pemberi bantuan hukum telah disetujui dan dilakukan proses pencairan dana bantuan hukum karena telah sesuai dan

memenuhi syarat secara administrasi, sehingga realisasi capaian bantuan hukum Non litigasi sebesar 87% dan sudah melampaui target yang ditentukan sebesar 80%.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	80%	76%	95%	80%	87%	109%

Tabel 3.171 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 9 dan IKK 2 Div. YankumHAM

Realisasi “Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan” pada Tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 11% dibandingkan dengan Tahun 2022.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
79%	80%	80%	80%

Tabel 3.172 Rencana Strategis SK 9 dan IKK 2 Div. YankumHAM

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM realisasi “Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan” pada Tahun 2023 sebesar 87% melebihi target yang ditetapkan sebesar 80%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan Standar Nasional mengingat kegiatan pengukuran “Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Indikator “Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan” yang melebihi target disebabkan oleh keberhasilan Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH dalam menjalankan kegiatan yang telah dirancang. Namun untuk beberapa berkas permohonan bantuan hukum masih terdapat kesalahan administrasi yang harus diperbaiki oleh pemberi bantuan hukum sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam hal proses pencairan dana bantuan hukum.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pengelola Bantuan Hukum Bersama dengan Panitia Pengawas Daerah terus Melakukan koordinasi terkait kelengkapan administrasi berkas permohonan bantuan hukum non litigasi yang diajukan.

• **Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum	76,75 Indeks	85,1 Indeks	111% ----- $\frac{85,1}{76,75} \times 100\%$

Tabel 3.173 Capaian Target dan Realisasi SK 9 dan IKK 3 Tahun 2023 Div. YankumHAM
 Formulasi perhitungan: Survey Kepuasan Penerima Bantuan hukum terhadap layanan bantuan hukum.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Bersama dengan Panitia Pengawas Daerah telah melaksanakan kegiatan Monitoring Evaluasi Pemberian Bantuan hukum ke Lembaga Bantuan Hukum Borneo Tanjung Pura Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Gema Bersatu Ketapang, LKBH Perempuan dan Keluarga Singakwang, dan LKKBH FH UPB Pontianak. Hasil yang dicapai menunjukkan indeks kepuasan layanan bantuan hukum telah mencapai target karena para penerima bantuan hukum rata-rata merasa puas atas pemberian bantuan hukum yang diterimanya dari Pemberi Bantuan Hukum. Adapun jumlah rata-rata penilaian terhadap layanan bantuan hukum adalah sebesar 340,37 yang diambil dari 4 Organisasi Bantuan Hukum. Dengan demikian indeks kepuasan layanan bantuan hukum tahun 2023 telah mencapai target sebesar 85,1 Indeks.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum	76,61 Indeks	62 Indeks	81%	76,75 Indeks	85,1 Indeks	111%

Tabel 3.174 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 9 dan IKK 3 Div. YankumHAM
 Realisasi “Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum” pada Tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 30% dibandingkan dengan Tahun 2022.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
76.61 Indeks	76.61 Indeks	76.61 Indeks	76.61 Indeks

Tabel 3.175 Rencana Strategis SK 9 dan IKK 3 Div. YankumHAM

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM realisasi “Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum” pada Tahun 2023 sebesar 85,1 indeks melebihi target yang ditetapkan sebesar 76,61 indeks.

- 4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional
 Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan Standar Nasional mengingat kegiatan pengukuran “Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- 5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
 Indikator “Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum” yang melebihi target disebabkan oleh keberhasilan Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH dalam menjalankan kegiatan yang telah dirancang. Namun terdapat kesulitan dalam mendapatkan informasi keberadaan domisili penerima bantuan hukum dalam melakukan monitoring evaluasi kepada penerima bantuan hukum kasus perdata, dikarenakan penerima bantuan hukum tidak memiliki nomor HP yang dapat dihubungi dan akses sinyal yang belum memadai di daerah penerima bantuan hukum.
- 6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
 Berkordinasi dengan Pemberi Bantuan Hukum dengan melihat data-data administrasi yang dilampirkan oleh penerima bantuan hukum pada saat melakukan permohonan bantuan hukum ke Pemberi Bantuan Hukum.

• **Indikator Kinerja Kegiatan 4 “Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	100%	143% ----- $\frac{100\%}{70\%} \times 100\%$

Tabel 3.176 Capaian Target dan Realisasi SK 9 dan IKK 4 Tahun 2023 Div. YankumHAM

Formulasi perhitungan: Presentase Jumlah desa/kelurahan yang sudah sesuai dengan kriteria sebagai terbentuk di masing-masing wilayah desa/kelurahan sadar hukum dibagi dengan usulan dari kantor wilayah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat telah mengusulkan 41 desa/kelurahan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa binaan sadar hukum oleh Bupati/Walikota masing-masing wilayah. Seluruh desa/kelurahan yang diusulkan telah deiberikan SK desa/kelurahan binaan, sehingga realisasi persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk tahun 2023 adalah sebesar 100%.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	100%	143%	70%	100%	143%

Tabel 3.177 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 9 dan IKK 4 Div. YankumHAM

Realisasi “Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah” di Tahun 2023 konsisten pada persentase 100%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
70%	70%	70%	70%

Tabel 3.178 Rencana Strategis SK 9 dan IKK 4 Div. YankumHAM

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM realisasi “Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah” pada Tahun 2023 100% melebihi target yang ditetapkan sebesar 70%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan Standar Nasional mengingat kegiatan pengukuran “Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Indikator “Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah” yang melebihi target disebabkan oleh keberhasilan Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH dalam menjalankan kegiatan yang telah dirancang. Namun terdapat kendala pada proses pengumpulan data dukung administrasi yang lama karena harus melengkapi 4 (empat) dimensi penilaian yakni Dimensi Akses Informasi Hukum, Dimensi Implementasi Hukum, Dimensi Akses Keadilan, dan Dimensi Demokrasi dan Regulasi.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Penyuluh hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat secara intens melakukan kordinasi dengan perangkat desa dalam hal pemenuhan data dukung administrasi pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

• **Indikator Kinerja Kegiatan 5 “Persentase Website Anggota JDIHN Aktif yang Terintegrasi dengan Portal/Sistem Integrasi JDIHN”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase Website Anggota JDIHN Aktif yang Terintegrasi dengan Portal/Sistem Integrasi JDIHN	20%	20%	100% ----- $\frac{20\%}{20\%} \times 100\%$

Tabel 3.179 Capaian Target dan Realisasi SK 9 dan IKK 5 Tahun 2023 Div. YankumHAM

Formulasi perhitungan: Jumlah website anggota JDIHN yang terintegrasi dibagi dengan jumlah anggota JDIHN kali 100%.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), JDIHN bertujuan untuk menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya dan menjamin ketersediaan dokumen hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah. Wilayah Kalimantan Barat memiliki 30 anggota JDIH yang telah terintegrasi dengan JDIHN Pusat, dari 30 anggota JDIH tersebut, terdapat 6 anggota JDIH yang aktif dan terintegrasi dengan portal JDIHN. Dengan demikian Persentase Website Anggota JDIHN Aktif Yang Terintegrasi Dengan Portal/Sistem Integrasi JDIHN adalah sebesar 20% yang artinya telah mencapai target kinerja tahun 2023.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Website Anggota JDIHN Aktif yang Terintegrasi dengan Portal/Sistem Integrasi JDIHN	20%	100%	500%	20%	20%	100%

Tabel 3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 9 dan IKK 5 Div. YankumHAM

Realisasi “Persentase Website Anggota JDIHN Aktif yang Terintegrasi dengan Portal/Sistem Integrasi JDIHN” di Tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan realisasi di Tahun 2022. Namun hal tersebut karena terdapat kesalahan penggunaan rumus pada Tahun 2022 sehingga realisasi yang ditampilkan kurang sesuai dengan data yang ada.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
20%	20%	20%	20%

Tabel 3.181 Rencana Strategis SK 9 dan IKK 1 Div. YankumHAM

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM realisasi “Persentase Website Anggota JDIHN Aktif yang Terintegrasi dengan

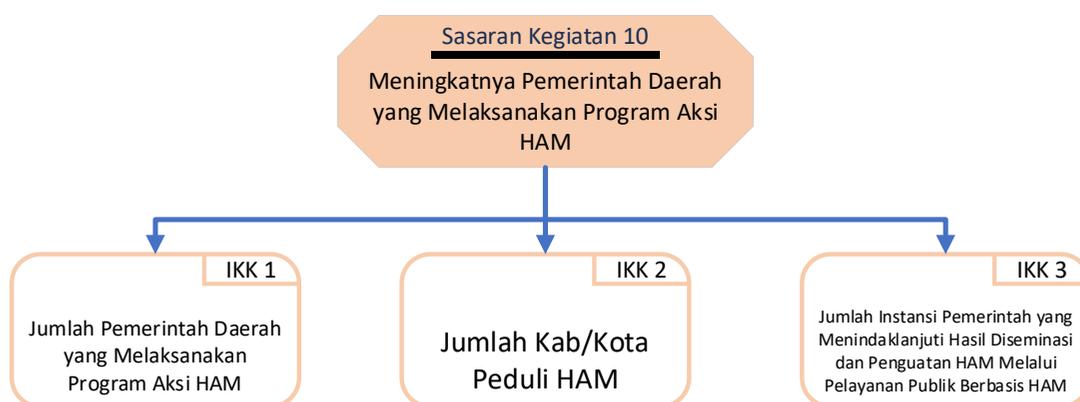
Portal/Sistem Integrasi JDIHN” pada Tahun 2023 sebesar 20% sehingga mencapai target yang ditetapkan sebesar 20%.

- 4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional
Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan Standar Nasional mengingat kegiatan pengukuran “Persentase Website Anggota JDIHN Aktif yang Terintegrasi dengan Portal/Sistem Integrasi JDIHN” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- 5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Indikator “Persentase Website Anggota JDIHN Aktif yang Terintegrasi dengan Portal/Sistem Integrasi JDIHN” yang melebihi target disebabkan oleh keberhasilan Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH dalam menjalankan kegiatan yang telah dirancang. Namun terdapat kendala yaitu anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum di wilayah masih minim informasi terkait tindak lanjut pengelolaan website JDIH-nya. Hal ini terlihat dari tingkat keaktifan masing-masing anggota JDIH yang masih belum optimal dalam melakukan pengembangan dan sinkronisasi data dengan JDIHN di tingkat pusat.
- 6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
Mengadakan Bimtek/Sosialisasi Pengelolaan Pengembangan JDIH di Wilayah.

Sasaran Kegiatan 10
Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

- “Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM” memenuhi target dengan target 3 instansi;
- “Jumlah Kab/Kota Peduli HAM” memenuhi target dengan target 1 instansi; dan
- “Jumlah Instansi Pemerintah Yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi Dan Penguatan HAM Melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM” memenuhi target dengan target 1 instansi.



Gambar 3.21 Sasaran Kegiatan 10 dan Indikator Kinerja Kegiatan Divisi YankumHAM

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM	2 Instansi	13 Instansi	650% ----- $\frac{13}{2} \times 100\%$

Tabel 3.182 Capaian Target dan Realisasi SK 10 dan IKK 1 Tahun 2023 Div. Yankum

Formulasi Perhitungan: Jumlah institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM.

Dalam mendorong implementasi RANHAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersinergi mendorong Kabupaten/Kota mengimplementasi penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM dalam pelaksanaan RANHAM. Untuk memaksimalkan pelaporan Aksi HAM, maka diperlukan kegiatan pemantauan Pelaksanaan Pelaporan Aksi HAM B04, B08 dan B12 di tahun 2023 dengan maksud menguatkan mekanisme dan koordinasi di antara lembaga/institusi pelaksanaan RANHAM agar pelaporan Aksi HAM dapat dilaksanakan dengan maksimal sesuai petunjuk teknis. Berdasarkan hasil Capaian Aksi HAM di tahun 2023 dari 14 Instansi Pemerintah Daerah terdapat 13 Instansi Pemerintah Daerah di Wilayah Kalimantan Barat yang melaksanakan program Aksi HAM dan 1 Instansi Pemerintah Daerah tidak melaksanakan.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM	2 Instansi	2 Instansi	100%	2 Instansi	13 Instansi	650%

Tabel 3.183 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 10 dan IKK 1 Div. YankumHAM

Realisasi “Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM” di Tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan dari realisasi pada Tahun 2022.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
5	8	10	13

Tabel 3.184 Rencana Strategis SK 10 dan IKK 1 Div. YankumHAM

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM realisasi “Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM” pada Tahun 2023 sebanyak 13 instansi sehingga mencapai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 10 instansi.

- 4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional
 Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan Standar Nasional mengingat kegiatan pengukuran “Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- 5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
 Indikator “Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM” yang dapat mencapai target disebabkan oleh keberhasilan Sub Bidang Pemajuan HAM dalam menjalankan kegiatan yang telah dirancang. Namun terdapat kendala yang menyertai pencapaian tersebut diantaranya:
 - e. Lemahnya koordinasi antar SKPD dengan Kota Singkawang terkait pengumpulan data pelaporan Aksi HAM Daerah;
 - f. Lambatnya pelaporan Aksi HAM Daerah Kab/Kota yang selalu menginput data pada kesempatan terakhir menjelang portal ditutup;
 - g. Terjadi mutasi operator Aksi HAM.
- 6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
 Kegiatan yang dilakukan dalam menunjang keberhasilan IKK “Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM” yaitu:
 - a. Meningkatkan koordinasi tentang pemahaman terkait Pedoman Laporan Aksi HAM lebih cepat dan akurat kepada Kabupaten/Kota;
 - b. Perlunya sinergitas antar Kementerian/Lembaga di daerah untuk terus aktif membangun komunikasi dalam pelaporan data dukung capaian Aksi HAM.

• **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Jumlah Kab/Kota Peduli HAM”**

- 1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	2 Instansi	4 Instansi	200% ----- $\frac{4}{2} \times 100\%$

Tabel 3.185 Capaian Target dan Realisasi SK 10 dan IKK 2 Tahun 2023 Div. Yankum
 Formulasi Perhitungan: Jumlah kabupaten/ kota yang peduli HAM.

Kab/Kota Peduli HAM dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kriteria penilaian daerah Kabupaten/Kota peduli Hak Asasi Manusia guna mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia yang arahnya tertuang dalam Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM. Berdasarkan hasil

Kabupaten/Kota Peduli HAM pada tahun 2022 dari 14 Instansi Pemerintah Daerah terdapat 12 Instansi Pemerintah di Wilayah Kalimantan Barat yang melaksanakan program KKPHAM dan sebanyak 2 Instansi Pemerintah Daerah tidak melaksanakan. Pada tahun 2023 dari 14 Instansi Pemerintah terdapat 13 Instansi Pemerintah di Wilayah Kalimantan Barat yang melaksanakan program KKPHAM dan sebanyak 1 Instansi Pemerintah Daerah tidak melaksanakan. Namun hanya terdapat 4 Instansi Pemerintah yang mendapatkan predikat Kab/Kota Peduli HAM.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	1 Instansi	2 Instansi	200%	2 Instansi	4 Instansi	200%

Tabel 3.186 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 10 dan IKK 2 Div. YankumHAM

Realisasi “Jumlah Kab/Kota Peduli HAM” mengalami peningkatan sebanyak 4 instansi pada Tahun 2023 namun capaian kinerjanya konstan pada persentase 200% karena perbedaan target indikator kinerja pada Tahun 2023 dengan Tahun 2022.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
3	5	8	10

Tabel 3.187 Rencana Strategis SK 10 dan IKK 2 Div. YankumHAM

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM realisasi “Jumlah Kab/Kota Peduli HAM” pada Tahun 2023 sebanyak 4 instansi sehingga tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 8 instansi.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional
 Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan Standar Nasional mengingat kegiatan pengukuran “Jumlah Kab/Kota Peduli HAM” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Indikator “Jumlah Kab/Kota Peduli HAM” yang melebihi target pada Perjanjian Kinerja disebabkan oleh keberhasilan Sub Bidang Pemajuan HAM dalam menjalankan kegiatan yang telah dirancang. Namun terdapat kendala yang menyertai pencapaian tersebut diantaranya:

- a. Kab/Kota yang tidak melaksanakan KKPHAM tahun 2023 adalah Kabupaten Kayong Utara dimana data indikator banyak yang tidak terdapat pada pemerintah Kab/Kota tersebut pasca Covid 19 karena beberapa anggaran diprioritaskan untuk penanganan Covid 19;
- b. Lemahnya koordinasi antar Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait pengumpulan data dukung Kabupaten/Kota Peduli HAM;
- c. Lambatnya pengiriman data Kab/Kota yang akan diperiksa, diverifikasi dan diupload oleh Kanwil Kemenkumham;

d. Terjadi mutasi operator KKP HAM pada Kab/Kota.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan yang dilakukan dalam menunjang keberhasilan IKK “Jumlah Kab/Kota Peduli HAM” adalah:

- a. Memotivasi dan mengembangkan sinergitas satuan kerja pemerintah daerah dan instansi Kabupaten/Kota dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM;
- b. Memberikan penilaian terhadap struktur, proses dan hasil capaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

• **Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM Melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM Melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM	1 Instansi	4 Instansi	400% ----- $\frac{4}{1} \times 100\%$

Tabel 3.188 Capaian Target dan Realisasi SK 10 dan IKK 3 Tahun 2023 Div. Yankum

Pada tahun 2023, terdapat 4 (empat) Unit Pelayanan Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat yang mendapatkan Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM 2023 yang terdiri dari:

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat;
2. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas;
3. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Ketapang;
4. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singkawang.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM Melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM	2 Instansi	28 Instansi	1400%	1 Instansi	4 Instansi	400%

Tabel 3.189 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 10 dan IKK 3 Div. YankumHAM

Realisasi “Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM Melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM” pada Tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan karena terdapat perbedaan

kriteria dalam menentukan instansi yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
2	3	3	3

Tabel 3.190 Rencana Strategis SK 10 dan IKK 3 Div. YankumHAM

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM realisasi “Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM Melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM” pada Tahun 2023 sebanyak 4 instansi sehingga melebihi target yang ditetapkan yaitu sebanyak 3 Instansi.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan Standar Nasional mengingat kegiatan pengukuran “Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM Melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Indikator “Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM Melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM” yang melebihi target disebabkan oleh keberhasilan Sub Bidang Pemajuan HAM dalam menjalankan kegiatan yang telah dirancang. Namun terdapat beberapa catatan untuk meningkatkan nilai indikator yaitu:

- a. Jika memiliki anggaran yang memadai, maka Unit Kerja dapat memenuhi sarana prasarana (sarpras) sesuai indikator P2HAM;
- b. Pemenuhan sarpras Indikator P2HAM dinilai berdasarkan substansi dari pemenuhan kriteria bukan berdasarkan tampilan fisik;
- c. Untuk Unit Kerja Pemasarakatan seperti Lapas ataupun Rutan untuk memenuhi kriteria P2HAM (Fasilitas WBP) masih memerlukan anggaran yang cukup besar dalam tahap pembangunan mengingat jumlah WBP yang *over capacity*;
- d. Secara Umum terdapat Kriteria P2HAM terkait sarpras yang memerlukan anggaran dalam Pembangunan tersebut sehingga perlu adanya penganggaran berbasiskan kriteria P2HAM;
- e. Operator P2HAM yang telah ditunjuk belum memahami teknis pengumpulan data indikator P2HAM.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

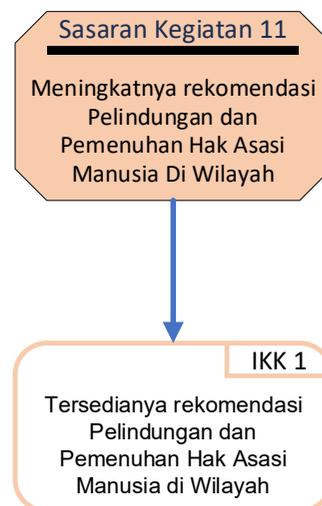
Kegiatan yang dilakukan dalam menunjang keberhasilan IKK “Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM Melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM” adalah:

- a. Berkoordinasi serta menginventarisir kekurangan data/permasalahan dengan seluruh Unit Kerja yang belum memperoleh Berita Acara Hasil

- Evaluasi (BAHE) agar tetap dapat memenuhi Substansi kriteria P2HAM dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia;
- b. Mengadakan Bimbingan Teknis bagi para operator unit kerja secara *offline* maupun *online* untuk memaksimalkan pengumpulan data secara efektif dan efisien;
 - c. Berkordinasi secara aktif baik secara *offline* maupun *online* melalui *WhatsApp Group* dalam Tahap Pembangunan dan Tahap Evaluasi.

Sasaran Kegiatan 11
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah” memenuhi target dengan target 3 rekomendasi.



Gambar 3.22 Sasaran Kegiatan 11 dan Indikator Kinerja Kegiatan Divisi YankumHAM

• **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100% ----- $\frac{3}{3} \times 100\%$

Tabel 3.191 Capaian Target dan Realisasi SK 11 dan IKK 1 Tahun 2023 Div. Yankum

Formulasi Perhitungan: Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah.

Penanganan terkait adanya dugaan pelanggaran HAM pada Tahun 2023 dengan melakukan upaya sebagai berikut:

- a. 3 Rekomendasi yang telah diterbitkan;
- b. 1 kasus diserahkan kepada MPDN Kabupaten Sintang;

- c. 1 kasus dalam Pengajuan ulang Permohonan Eksekusi di pengadilan Sanggau;
- d. 6 kasus selesai dalam mediasi dengan mengembalikan Keputusan kepada para pihak;
- e. 4 kasus sedang dalam tahap telaah; dan
- f. 2 Laporan aduan yang tidak bisa dilanjutkan karena kekurangan berkas.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekomendasi	6 Rekomendasi	200%	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100%

Tabel 3.192 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 11 dan IKK 1 Div. YankumHAM

Realisasi “Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah” mengalami penurunan yaitu 3 Rekomendasi pada Tahun 2023. Hal tersebut disebabkan terdapat perbedaan dalam hasil upaya penyelesaian adanya dugaan pelanggaran HAM dimana pada Tahun 2023 upaya penyelesaian selesai pada saat mediasi dengan mengembalikan keputusan kepada para pihak. Sehingga rekomendasi yang diterbitkan pada Tahun 2023 berkurang dari tahun sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2021	2022	2023	2024
5	8	10	13

Tabel 3.193 Rencana Strategis SK 11 dan IKK 1 Div. YankumHAM

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM realisasi “Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah” pada Tahun 2023 sebanyak 3 rekomendasi sehingga tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 10 rekomendasi.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional
 Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan Standar Nasional mengingat kegiatan pengukuran “Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Indikator “Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah” yang mencapai target disebabkan oleh keberhasilan Sub Bidang Pemajuan HAM dalam menjalankan kegiatan yang telah dirancang. Namun terdapat beberapa catatan untuk meningkatkan indikator tersebut yaitu:

- a. Bahwa dalam proses mediasi dalam pelaksanaannya pihak terlapor tidak memenuhi undangan mediasi;
- b. Bahwa dalam memperoleh data terkait instansi pemerintah khususnya terkait pertanahan sangat sulit padahal kasus aduan terbanyak terkait pertanahan;
- c. Anggaran yang terbatas dengan permohonan aduan masyarakat yang semakin meningkat;

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi capaian IKK “Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah” adalah:

- a. Bersinergi dengan Tim JFT Analisis Hukum untuk mempercepat proses telaah kasus;
- b. Meningkatkan koordinasi dan bersinergi dengan instansi terkait dengan pengaduan dan kasus yang diterima.

➤ Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi adalah kemampuan untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan dengan membandingkan rencana penggunaan suatu sumber daya dengan penggunaan yang sebenarnya atau yang terealisasi. Dalam hal ini, semakin sedikit sumber daya yang digunakan dalam mencapai hasil yang direncanakan, maka akan dinilai semakin efisien. Dalam Laporan Kinerja ini akan dijelaskan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

1. Anggaran

Pagu alokasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Tahun 2023 sebesar Rp. 258.580.526.000 dengan realisasi sebesar Rp 254.873.042.653 dan capaian penyerapan anggaran sebesar 98,57%. Nilai Efisiensi Anggaran terhadap kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Tahun 2023 menggunakan data pada Aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan. Nilai Kinerja Kementerian Hukum dan HAM TA 2022 per tgl 31 Desember 2023 sebesar 86,25%, angka tersebut merupakan penggabungan nilai SMART (60%) dan nilai IKPA (40%).

2. Sumber Daya Manusia

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat merupakan salah satu perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dengan tugas dan fungsi yang heterogen dan memiliki kekuatan sumber daya manusia sebanyak 1.712 orang yang tersebar di 27 satuan kerja. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur negara merupakan upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat untuk menjawab tantangan masa kini yang dihadapi oleh organisasi seperti tingginya jumlah pegawai, tingginya jumlah pegawai generasi milenial, era disrupsi dan perkembangan era industri 4.0. Tantangan dan keterdesakan lingkungan kerja yang sukses

memanfaatkan teknologi, membuktikan bahwa strategi pengembangan Sumber Daya Manusia tidak bisa lagi hanya mengandalkan sistem konvensional. Beberapa kebijakan yang dilakukan dalam rangka efisiensi SDM adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi pemenuhan kebutuhan SDM dari internal melalui pengembangan karir dan kompetensi;
- b. Pengendalian Pertumbuhan Pegawai;
- c. Penyederhanaan Birokrasi.

3. Sarana dan Prasarana

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat telah melakukan serangkaian transformasi dalam rangka penerapan e-government dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yaitu:

- a. Portal Kanwil Kalbar yang merupakan aplikasi berbasis android untuk memberikan kemudahan masyarakat mengakses website Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat yang memiliki fitur pembacaan otomatis berita sebagai layanan berbasis HAM;
- b. Portal Data Keimigrasian (PORDAKIM) untuk mempermudah akses data-data terkait keimigrasian di jajaran Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat yang datanya bersumber dari UPT Imigrasi;
- c. Sistem Laporan Online Notaris Kalimantan Barat (SILANOK) merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk monitoring laporan bulanan notaris di wilayah kerja Kalimantan Barat secara online;
- d. Kanal Layanan Aduan Masyarakat melalui Aplikasi ARWANA (Auto Reply Whatsapp Pelayanan dan Aduan). ARWANA menghadirkan pelayanan informasi yang Mudah, Cepat dan Akurat. Masyarakat juga dapat berkonsultasi dengan contact person yang ahli dibidangnya;
- e. E-Buku Tamu untuk mempermudah pencatatan data tamu yang datang di Kanwil Kemenkumham Kalbar serta melakukan blast wa survei IPK/IKM secara otomatis ke WA tamu.

B. Realisasi Anggaran

Ditampilkan Tabel Realisasi Anggaran Belanja Perjenis Belanja dan Tabel Realisasi Anggaran Belanja Total. Sebagian besar satuan kerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat telah mencapai target serapan pada Triwulan IV yaitu 100% dengan deviasi minimum yang diperkenankan sebesar 5% dari target serapan. Penyerapan anggaran pada semester Tahun 2023 yang hampir mencapai 100%, dinilai optimal jika dilihat dari capaian kinerja yang berhasil dicapai. Dinilai dari kualitas kegiatan dan sebagian besar program kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan telah diciptakan serta dikembangkan aplikasi layanan publik untuk mempermudah dan mempercepat pemberian layanan kepada masyarakat tanpa harus datang langsung ke Kantor Wilayah maupun Satuan Kerja. Sehingga dapat dikatakan pelaksanaan program kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat berjalan dengan cukup efisien.

TABEL REALISASI ANGGARAN BELANJA PERJENIS BELANJA (PENYERAPAN TERBESAR - TERKECIL) 31 DESEMBER 2023

KANWIL - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT

NO	KODE SATKER	SATKER	BELANJA PELAYANAN				BELANJA BARANG				BELANJA MODAL				JUAL BELANJA			
			PAJAK	BEALAMAN	SISA ANGGARAN	E	PAJAK	REALISASI	SISA ANGGARAN	E	PAJAK	REALISASI	SISA ANGGARAN	E	PAJAK	REALISASI	SISA ANGGARAN	E
1	44884	LAPAS PONTIANAK	5.784.000.000	5.804.270.444	39.176.444	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	44885	KANWIL (DITJEN H)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	44887	KANWIL (DITJEN PP)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	44889	KANWIL (DITJEN AH)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	44890	KANWIL KELAS II SINGKAWANG	4.700.000.000	4.700.000.000	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	44891	BAPAS PONTIANAK	3.710.000.000	3.710.000.000	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	44892	KANWIL (KOLITMANC HARI)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	44893	KANWIL KELAS II SETAPANG	2.460.000.000	2.460.000.000	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	44894	KANWIL (DITJEN HARI)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	44895	UPP PONTIANAK	4.110.000.000	4.110.000.000	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	44896	LAPAS SINGKAWANG	4.410.000.000	4.410.000.000	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	44897	KANWIL (DITJEN)	11.477.000.000	11.477.000.000	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	44898	KANWIL KELAS II SANGAU	1.700.000.000	1.700.000.000	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	44899	LAPAS SINGKAWANG	4.534.000.000	4.534.000.000	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	44900	BUPABASA PONTIANAK	1.710.000.000	1.710.000.000	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	44901	KANWIL (OPM)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	44902	BUPABASA SANGAU	700.000.000	700.000.000	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	44903	KANWIL (DITJEN HINGGAM)	6.040.000.000	6.040.000.000	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	44904	SUTAN LAMAS	2.070.000.000	2.070.000.000	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	44905	KANWIL KELAS II SANGAU	1.700.000.000	1.700.000.000	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	44906	KANWIL (DITJEN PEMAYAKHOAN)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	44907	KANWIL (DITJEN HINGGAM)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	44908	BAPAS SANGAU	1.410.000.000	1.410.000.000	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	44909	SUTAN SANGAU	1.000.000.000	1.000.000.000	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	44910	SUTAN BENGKONG	1.000.000.000	1.000.000.000	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	44911	LAPAS KETAPAN	1.000.000.000	1.000.000.000	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	44912	KANWIL KELAS II PUTUSIRAU	1.000.000.000	1.000.000.000	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	44913	KANWIL KELAS II BUKITDONG	1.000.000.000	1.000.000.000	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	44914	SUTAN PUTUSIRAU	1.000.000.000	1.000.000.000	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	44915	UPK SANGAU BAWA	1.000.000.000	1.000.000.000	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	44916	KANWIL KELAS II PONTIANAK	1.000.000.000	1.000.000.000	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	44917	BUPABASA SINGKAWANG	1.000.000.000	1.000.000.000	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	44918	BUPABASA PONTIANAK	1.000.000.000	1.000.000.000	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	44919	SUTAN MEMPANAH	1.000.000.000	1.000.000.000	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	44920	BAPAS SINGAWANG	1.000.000.000	1.000.000.000	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	44921	SUTAN LANGSAK	1.000.000.000	1.000.000.000	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRAND TOTAL			99.820.000.000	99.820.000.000	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



INDIKATOR / CATATAN: 100,00% (100,00%)

Tabel 3.194 Realisasi Anggaran Belanja Per Jenis Belanja

TABEL REALISASI ANGGARAN BELANJA TOTAL (PENYERAPAN TERBESAR - TERKECIL)
31 DESEMBER 2023

KANWIL : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT

NO	KODE SATKER	SATKER	TOTAL BELANJA			
			PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	406602	LAPAS PONTIANAK	22.823.110.000	22.846.065.116	22.955.116	100,10%
2	408836	KANWIL (DITJEN KI)	1.284.263.000	1.283.997.246	265.754	99,98%
3	408837	KANWIL (DITJEN PP)	375.000.000	374.852.490	147.510	99,96%
4	408833	KANWIL (DITJEN AHU)	2.426.682.000	2.425.610.731	1.071.269	99,96%
5	408190	KANIM KELAS II SINGKAWANG	8.016.927.000	8.004.230.474	12.696.526	99,84%
6	409139	BAPAS PONTIANAK	6.826.294.000	6.812.135.138	14.158.862	99,79%
7	408840	KANWIL (BALITBANG HAM)	143.613.000	143.311.411	301.589	99,79%
8	418936	KANIM KELAS III KETAPANG	8.034.224.000	8.010.625.304	23.598.696	99,71%
9	408838	KANWIL (DITJEN HAM)	242.882.000	242.079.900	802.100	99,67%
10	418336	LPP PONTIANAK	7.670.125.000	7.643.366.149	26.758.851	99,65%
11	406658	LAPAS SINTANG	9.551.316.000	9.501.633.507	49.682.493	99,48%
12	408830	KANWIL (SETJEN)	25.523.494.000	25.389.298.089	134.195.911	99,47%
13	409145	KANIM KELAS II SANGGAU	8.442.357.000	8.391.587.867	50.769.133	99,40%
14	406627	LAPAS SINGKAWANG	11.279.155.000	11.200.605.716	78.549.284	99,30%
15	632637	RUPBASAN PONTIANAK	2.597.411.000	2.576.502.242	20.908.758	99,20%
16	408839	KANWIL (BPHN)	888.681.000	881.241.299	7.439.701	99,16%
17	653403	RUPBASAN SANGGAU	1.633.747.000	1.619.842.966	13.904.034	99,15%
18	562873	RUTAN PONTIANAK	16.748.951.000	16.596.353.584	152.597.416	99,09%
19	406642	RUTAN SAMBAS	6.754.180.000	6.678.362.604	75.817.396	98,88%
20	662967	KANIM KELAS II SAMBAS	9.433.543.000	9.325.919.376	107.623.624	98,86%
21	408834	KANWIL (DITJEN PEMASYARAKATAN)	674.252.000	666.369.499	7.882.501	98,83%
22	408835	KANWIL (DITJEN IMIGRASI)	2.701.679.000	2.666.208.456	35.470.544	98,69%
23	632031	BAPAS SAMBAS	2.278.579.000	2.248.095.217	30.483.783	98,66%
24	406611	RUTAN SANGGAU	6.964.591.000	6.850.169.508	114.421.492	98,36%
25	497789	RUTAN BENGKAYANG	5.458.389.000	5.365.300.892	93.088.108	98,29%
26	406664	LAPAS KETAPANG	17.392.982.000	17.080.233.624	312.748.376	98,20%
27	686574	KANIM KELAS III PUTUSIBAU	5.693.554.000	5.575.914.577	117.639.423	97,93%
28	539101	KANIM KELAS II ENTIKONG	8.755.179.000	8.573.865.984	181.313.016	97,93%
29	526823	RUTAN PUTUSIBAU	4.372.074.000	4.269.507.484	102.566.516	97,65%
30	406673	LPKA SUNGAI RAYA	5.624.733.000	5.490.401.731	134.331.269	97,61%
31	408171	KANIM KELAS I PONTIANAK	15.131.563.000	14.762.483.636	369.079.364	97,56%
32	653395	RUPBASAN SINGKAWANG	2.371.941.000	2.305.797.762	66.143.238	97,21%
33	664650	RUDENIM PONTIANAK	8.576.588.000	8.316.806.692	259.781.308	96,97%
34	406633	RUTAN MEMPAWAH	9.593.124.000	9.215.440.869	377.683.131	96,06%
35	622441	BAPAS SINTANG	2.918.080.000	2.739.671.550	178.408.450	93,89%
36	497773	RUTAN LANDAK	9.377.263.000	8.799.153.963	578.109.037	93,83%
TOTAL			258.580.526.000	254.873.042.653	3.707.483.347	98,57%

TANGGAL / JAM CETAK OMSIPAN : 03.01.2024 / 08.30 WIB	
FILTER : JAN-DES 2023	
INDIKATOR WARNA PENYERAPAN ANGGARAN (%)	
	> 97 %
	80 S.D 96,99%
	< 80 %

Tabel 3.195 Tabel Realisasi Anggaran Total

C. Capaian Kinerja Anggaran

1. Capaian Kinerja Anggaran pada Aplikasi SMART DJA

Data capaian kinerja anggaran pada aplikasi SMART DJA bersumber dari website aplikasi <https://smart.kemenkeu.go.id/>. Pengisian data pada aplikasi SMART DJA dilakukan setiap bulan. Satuan kerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat selalu dimonitoring untuk melakukan pengisian Realisasi Volume RO pada bulan berjalan dengan batas akhir pada tanggal 05 bulan berikutnya. Untuk perhitungan pada aplikasi SMART DJA

menggunakan dasar aturan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

No.	Nama Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	SEKJEN KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR	67,7	97,39	99,61	85,89	-16,14	9,65
2	DITJEN AHU KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR	77,11	99,96	91,65	94,1	-6,3	34,25
3	DITJEN PAS KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR	86,38	98,83	99,79	100	1,17	52,92
4	DITJEN IM KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR	56,41	98,69	99,84	46,42	-8,14	29,64
5	DITJEN KI KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR	84,19	99,98	91,66	100	0,02	50,05
6	DITJEN PP KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR	85,72	99,96	99,99	100	0,04	50,1
7	DITJEN HAM KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR	85,88	99,67	99,87	100	0,33	50,83
8	BPHN KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR	86,19	99,16	99,86	100	0,84	52,09
9	BALITBANGHAM KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR	85,83	99,79	99,98	100	0,21	78,91

Tabel 3.196 Capaian Kinerja Anggaran SMART DJA

2. Capaian Kinerja Anggaran pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Ditampilkan data IKPA pada Satuan kerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat per tanggal 31 Desember 2023. Sumber data diperoleh dari Subbag Pengelola Keuangan dan BMN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. Kolom Nilai Akhir menunjukkan data IKPA setiap satuan kerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. Untuk perhitungan nilai akhir menggunakan rumus:

$$\text{Nilai IKPA} = \frac{\text{Rerata Kualitas Perencanaan Anggaran} + \text{Rerata Kualitas Pelaksanaan Anggaran} + \text{Rerata Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran}}{3}$$

No	Uraian Satker	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Akhir
		Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	
1	DIVISI ADMINISTRASI	100	89,17	100,00	100,00	100	95,55	100	100	98,47
2	DIVISI PEMASYARAKATAN	100	77,87	93,44	0	0	93,61	100	100	94,79
3	DIVISI KEIMIGRASIAN	100	84,21	90,88	0	0	0	100	100	95,14
4	DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	100	100	99,59	100	100	0	100	100	99,91
5	DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	100	100	99,26	0	0	0	100	100	99,79
6	DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	100	63,53	100	0	0	95,82	100	100	94,92
7	DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DITJEN HAK ASASI MANUSIA	100	79,33	87,24	0	0	95,56	100	100	93,67
8	DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	100	78,50	99,4	0	0	88,25	100	100	95,69
9	DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM	100	76,63	100	0	0	84,60	100	100	95,15
RATA-RATA NILAI IKPA		100	83,25	96,65	100,00	100,00	61,49	100,00	100	96,39

Tabel 3.197 Capaian Kinerja Anggaran IKPA

D. Capaian Kinerja Lainnya

1. Capaian Kinerja E-Performance Kementerian Hukum dan HAM

Data yang ditampilkan bersumber dari website aplikasi <https://e-performance.kemenkumham.go.id/>. Pada tabel, ditampilkan monitoring pengisian data pada aplikasi setiap bulan. Satuan kerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat wajib menginputkan capaian Perjanjian Kinerja (PK) pada bulan berjalan dengan batas akhir pada tanggal 05 bulan berikutnya. Aplikasi yang digunakan sangat membantu dalam mengontrol capaian PK setiap bulannya sehingga Pimpinan dapat membuat kebijakan dengan tepat sesuai dengan dinamika yang terjadi.

No.	Nama Satuan Kerja	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	SEKJEN KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	DITJEN AHU KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	DITJEN PAS KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	DITJEN IM KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	DITJEN KI KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	DITJEN PP KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	DITJEN HAM KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	BPHN KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	BALITBANGHAM KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
JUMLAH		9											

Tabel 3.198 Monitoring e-Performance

2. Capaian Kinerja Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM

Data yang ditampilkan bersumber dari website aplikasi <https://kinerja.kemenkumham.go.id/>. Tabel yang ditampilkan terbagi menjadi 4 (empat) sesuai dengan jumlah divisi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. Nilai capaian Target Kinerja ditampilkan pada kolom % Total Capaian dengan rumus:

$$\text{Nilai Capaian Target Kinerja} = \frac{\text{Jumlah persentase capaian target kinerja}}{\text{jumlah target kinerja}} \times 100$$

a. Divisi Administrasi

NO	TARGET	% CAPAIAN PER TARGET	% TOTAL CAPAIAN
1	Meningkatnya nilai SAKIP Kantor Wilayah	100	96,81
2	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM	98,33	
3	Seluruh revisi anggaran Belanja Modal Satuan Kerja harus mendapat clearance dari Kepala Kantor Wilayah melalui divisi administrasi	100	

NO	TARGET	% CAPAIAN PER TARGET	% TOTAL CAPAIAN
4	Peningkatan jumlah aset berupa Tanah dan Bangunan yang tercatat dalam SIMAK BMN dan Memiliki Sertifikat	90	
5	Inventarisasi Kebutuhan Revitalisasi gedung dan bangunan dilingkungan Kantor Wilayah	90	
6	Optimalisasi Pemanfaatan aplikasi khusus unit utama di Wilayah	100	
7	Penyajian informasi kinerja dan pemberitaan positif yang cepat, tepat, akurat dan akuntabel	100	
8	Optimalisasi implementasi Corporate University dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM di Bidang hukum dan HAM	99	
9	Tata Kelola digitalisasi Kearsipan di lingkungan Kantor Wilayah	94	
10	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pencapaian Target Kinerja	100	

Tabel 3.199 Capaian e-Tarja Div. Administrasi

b. Divisi Pemasyarakatan

NO	TARGET	% CAPAIAN PER TARGET	% TOTAL CAPAIAN
1	Percepatan pelaksanaan Back to Basic Penyelenggaraan Pemasyarakatan Di Bidang Pelayanan Tahanan	100	99
2	Percepatan pelaksanaan Back to Basic Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Pemenuhan Hak Tahanan di Lapas dan Rutan	100	
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan di bidang pengelolaan basan baran	100	
4	Penyelenggaraan layanan rehabilitasi pemasyarakatan	100	
5	Terwujudnya pengembangan SDP dalam rangka transformasi layanan pemasyarakatan melalui pertukaran data SPPT TI	100	
6	Piloting Penerapan Keadilan Restoratif bagi pelaku dewasa pada 10 wilayah Piloting	100	
7	Peningkatan kualitas pelayanan pembinaan narapidana	93	
8	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	98	
9	Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan	100	

Tabel 3.200 Capaian e-Tarja Div. PAS

c. Divisi Keimigrasian

NO	TARGET	% CAPAIAN PER TARGET	% TOTAL CAPAIAN
1	Implementasi Pengembangan layanan paspor secara kesisteman	100	98
2	Peningkatan profesionalisme SDM dalam melakukan pendataan pengungsi luar negeri, pencari suaka dan Final Rejected di Wilayah Indonesia	96,25	
3	Pengawasan penjamin virtual orang asing dan kegiatannya	98,75	

Tabel 3.201 Capaian e-Tarja Div. Keimigrasian

d. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

NO	TARGET	% CAPAIAN PER TARGET	% TOTAL CAPAIAN
1	Peningkatan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam memfasilitasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	98,75	99,78
2	Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum	99,16	
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemberi Bantuan Hukum	100	
4	Monitoring dan Evaluasi Hasil Survei IPK-IKM serta Indeks integritas Organisasi dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah	100	
5	Memastikan pelayanan di bidang administrasi hukum umum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	100	
6	Penerapan PMPJ dan Pengawasan Audit Kepatuhan Terhadap Notaris	100	
7	Pembaharuan Data Notaris & Identifikasi Status Notaris	100	
8	Pengumpulan data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi	100	
9	Pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas berdasarkan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia	100	
10	Mendorong pertumbuhan permohonan merek One Village One Brand dan IG di wilayah melalui kerjasama Pemerintah Daerah/stakeholder terkait/MPIG dalam bentuk Mobile IP Clinic	99,63	
11	Terlaksananya kegiatan-kegiatan layanan KI yang diinisiasi melalui kerjasama yang telah ada atau membentuk MoU/PKS baru dalam rangka mendukung tahun Hak Merek dan peningkatan KIK	100	
12	Persiapan Pencanangan Kawasan Karya Cipta 2024 Dengan Aksi Inventarisasi Komunitas Seni, Pekerja Seni, Konten Kreator, Penulis Buku	100	
13	Menyelenggarakan kegiatan konsultasi teknis terkait pemanfaatan informasi paten bagi kalangan Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang	100	
14	Penegakan perlindungan kekayaan intelektual di wilayah: Sertifikasi Pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/Kota dan tradisional	100	
15	Mendorong Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi Hak Asasi Manusia	100	
16	Mendorong Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM	98,75	
17	Meningkatkan Koordinasi dengan Stakeholders dalam rangka Mendorong Penyelesaian Dugaan pelanggaran HAM	100	

Tabel 3.202 Capaian e-Tarja Div. YankumHAM

3. Capaian Kinerja E-Monev Bappenas

Data yang ditampilkan bersumber dari website aplikasi <https://e-monev.bappenas.go.id/2023/>. Tabel yang ditampilkan terbagi menjadi 9 (sembilan) sesuai dengan jumlah DIPA satuan kerja pada Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. Nilai capaian kinerja yang ditampilkan berupa progres anggaran pada kolom **Anggaran** dan progres pelaksanaan anggaran pada kolom **Progres**. Data capaian kinerja yang ditampilkan sampai dengan bulan Desember 2023.

NO	SATUAN KERJA	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
		ANGGARAN	PROGRES PELAKSANAAN	ANGGARAN	PROGRES PELAKSANAAN	ANGGARAN	PROGRES PELAKSANAAN	ANGGARAN	PROGRES PELAKSANAAN
1	SEKJEN KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR	16,88	13,81	49,27	40,12	86,05	61,54	98,89	99,23
2	DITJEN AHU KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR	24,68	1	56,91	45,91	82,5	66,45	96,7	99,99
3	DITJEN PAS KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR	26,73	42,33	54,59	64,33	83,34	88	98,11	99
4	DITJEN IM KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR	24,51	13,83	48,4	36,58	75,92	72	98,82	100
5	DITJEN KI KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR	25,56	18,57	60,39	61,57	88,69	82,57	99,98	100
6	DITJEN PP KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR	32,84	43,43	46,74	54,71	81,56	82,29	97,77	99,99
7	DITJEN HAM KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR	26,85	27,25	53,73	47,33	83,16	88,42	92,21	96,75
8	BPHN KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR	23,46	30,45	4841	50,15	74,64	80,05	76,07	84,2
9	BALITBANGHAM KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR	27,54	17,25	68,71	79	95,23	98,25	99,67	99,5

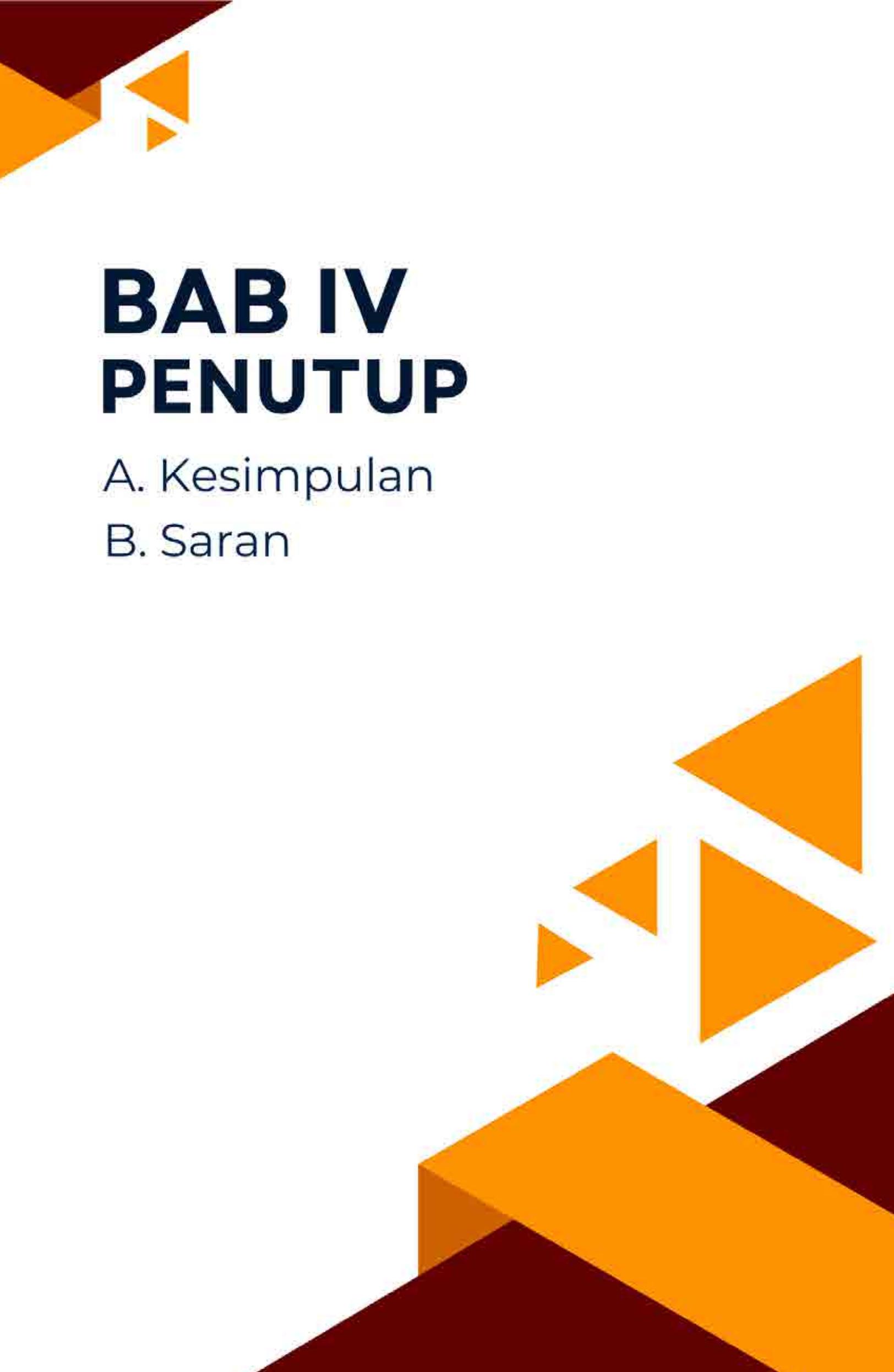
Tabel 3.203 Capaian Kinerja e-Monev Bappenas

**“Bekerjalah dengan jujur
serta pikiran yang bersih
& positif, hanya untuk
pengabdian kepada
tuhan, Bangsa dan
Negara”**

YASONA H. LAOLY

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI





BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan, tidaklah semata-mata hanya ditujukan untuk menggambarkan ketercapaian Target Kinerja organisasi di akhir tahun. Akan tetapi, ada hal yang jauh lebih penting dari hal tersebut, dimana penetapan ukuran kinerja dijadikan sebagai acuan manajemen dalam mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai kinerja yang paling maksimal. Sehingga, baik ukuran maupun kinerja yang ditetapkan diupayakan ditetapkan secara lebih progresif dan menantang dalam pencapaian sasaran strategis organisasi sehingga visi dan misi organisasi dapat terwujud.

Heterogenitas tugas dan fungsi yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, sebaran 27 satuan kerja di seluruh Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Barat, serta jumlah Sumber Daya Manusia yang besar merupakan tantangan dalam pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat. Walaupun demikian, hal tersebut tidak menjadi masalah dan bahkan menjadi pendorong bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengembangkan pola kendali yang efektif. Salah satu pola kendali yang dikembangkan adalah pengendalian secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi e-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memungkinkan pimpinan dapat melakukan monitoring capaian kinerja setiap satuan kerja.

Evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik secara umum menunjukkan target pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 semuanya telah tercapai. Dari 22 (dua puluh dua) Sasaran Kegiatan, seluruh Indikator Kinerja Kegiatan sebanyak 60 (enam puluh) telah tercapai dengan hasil lebih dari 100%.

B. Saran

Untuk perbaikan di masa yang akan datang perlu dilakukan tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain:

1. Melakukan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Kegiatan sehingga kinerja organisasi dapat lebih terukur dan meningkat setiap tahunnya;
2. Meningkatkan pemantauan dan pemanfaatan aplikasi e-performance terutama pada proses berlangsungnya pencapaian kinerja;
3. Meningkatkan koordinasi antara seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat serta melakukan koordinasi yang intensif dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat dan stakeholder lainnya, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan;
4. Melakukan upaya pemberdayaan, pembinaan dan pengelolaan SDM secara efektif dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat Tahun 2023 ini disusun dan disajikan. Semoga ke depan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat akan semakin baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya Kementerian Hukum dan HAM RI dan bagi bangsa dan negara.

Bos

Mempekerjakan bawahannya

Mengandalkan kekuasaannya

Menimbulkan ketakutan

Mengatakan "Aku"

Menunjukkan siapa yang bersalah

Tahu bagaimana sesuatu dikerjakan

Menuntut rasa hormat

Berkata "pergi"

Pemimpin

Mengilhami bawahannya

Mengandalkan kemauan yang baik

Memancarkan kasih dan merangkul

Mengatakan "Kita"

Menunjukkan apa yang salah

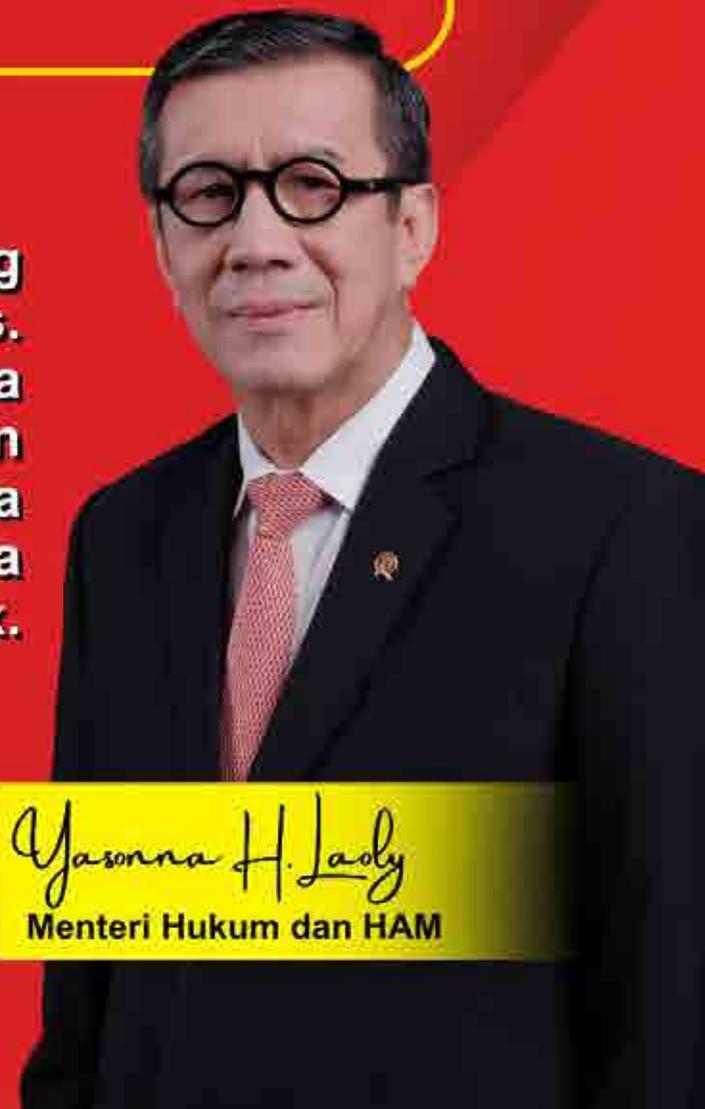
Tahu bagaimana mengerjakannya

Membangkitkan rasa hormat

Berkata "Mari kita pergi"



Maka jadilah seorang pemimpin, bukan sekedar bos. Jika itu terjadi maka saudara akan dapat menjadi pemimpin yang dapat meng-inspired. Jika sudah ter-inspired, maka seluruh jajaran akan bergerak.



Yasonna H. Lody

Menteri Hukum dan HAM



LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kantor
Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Kalimantan Barat



Kemenkumham Semakin **PASTI**





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pria Wibawa
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat

Pria Wibawa
NIP. 196507281988031 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	87,0
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	92,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	94%
		2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	94%
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 18.497.770.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 18.497.770.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat

Pria Wibawa

NIP. 19650728 1988031 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pria Wibawa

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat

Pria Wibawa
NIP. 19650728 198803 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pria Wibawa

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Reynhard Silitonga

Jabatan : Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat

Pria Wibawa
NIP. 19650728 198803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN BARAT DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80 (Indeks)
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	50,0 %
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	80,0 %
		3. Persentase menurunnya residivis	1,0 %
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90,0 %
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	80,0 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83 (Nilai Indeks)
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara,	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56 (Nilai Indeks)
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5 (Nilai Indeks)
		3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	60 (Nilai Indeks)
		4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	74 (Nilai Indeks)
		5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	80 (Nilai Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	6. Indeks Pelayanan Tahanan	80 (Nilai Indeks)
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	80 (Nilai Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemsarakatan yang berkualitas di wilayah	1. Indeks penyelenggaraan pemsarakatan di wilayah	82 (Indeks)
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	2. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		4. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
4.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%
5.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%
6.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%
7.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
8.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 67.613.368.000
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Pemasarakatan	Rp. 78.046.450.000

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasarakatan

Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat

Pria Wibawa
NIP. 19650728 198803 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pria Wibawa

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat

Pria Wibawa

NIP. 19650728 198803 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pria Wibawa
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Pit. Direktur Jenderal Imigrasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Pit. Direktur Jenderal Imigrasi

Widodo Ekatjahjana
NIP. 19710501 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat

Pria Wibawa
NIP. 19650728 198803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT
DENGAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)

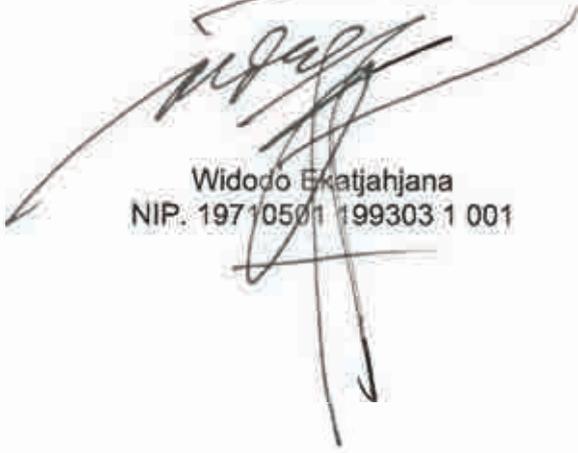
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 18.900.379.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 18.900.379.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Pit. Direktur Jenderal Imigrasi



Widodo Ekadjahjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat



Pri Wibawa
NIP. 196507281988031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pria Wibawa

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat

Pria Wibawa
NIP. 19650728 198803 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pria Wibawa

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Cahyo Rahadian Muzhar

Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Cahyo Rahadian Muzhar
NIP. 19690918 199403 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat

Pria Wibawa
NIP. 19650728 198803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	2. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ektradisi yang telah ditindaklanjuti	88%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	88%
2.	Terwujudnya Otoritas Pusat yang Efektif dan Tepat Sasaran	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ektradisi yang telah ditindaklanjuti	88%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5 %
2.	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD	1. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp2.426.682.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Kanwil)	Rp2.426.682.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum


Cahyo Rahadian Muzhar
NIP. 19690918 199403 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat


Pria Wibawa
NIP. 19650728 198803 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pria Wibawa

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat

Pria Wibawa
NIP. 19650728 198803 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pria Wibawa

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP. 19651128 199103 1002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat

Pria Wibawa
NIP. 19650728 198803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN BARAT DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,34 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah kementerian hukum dan HAM	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	150 Layanan
		2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus
2	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	2 Laporan

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.284.263.000,-
1.	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 1.284.263.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Razilu
NIP. 19651128 199103 1002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat



Pria Wibawa
NIP. 19650728 198803 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pria Wibawa

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat

Pria Wibawa
NIP. 19650728 198803 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pria Wibawa

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Iwan Kurniawan

Jabatan : Pit. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Pit. Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan HAM

Iwan Kurniawan
NIP. 19640619 198811 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat

Pria Wibawa
NIP. 19650728 198803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTORWILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN BARAT DENGAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HUKUM DAN HAM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	20%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan pemanfaatan rekomendasi hasil analisis kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	1. Persentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	80%
		2. Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	81 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	1. Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%
		2. Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 143.613.000,-
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 143.613.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan HAM



Iwan Kurniawan
NIP. 19840619 198811 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat



Pria Wibawa
NIP. 19650728 198803 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pria Wibawa

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat

Pria Wibawa
NIP. 19650728 198803 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pria Wibawa

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dhahana Putra

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Dhahana Putra
NIP. 19690909 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat


Pria Wibawa
NIP. 19650728 198803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN BARAT DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,2 (Indeks)

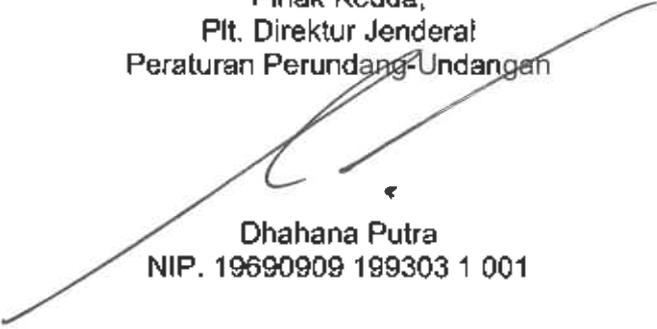
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%
		2. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	200 Orang
		3. Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%
2.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	20 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 375,000,000 ,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 375,000,000 ,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan



Dhahana Putra
NIP. 19690909 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat



Pria Wibawa
NIP. 19650728 198803 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pria Wibawa

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat

Pria Wibawa

NIP. 19650728 198803 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pria Wibawa

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana

Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

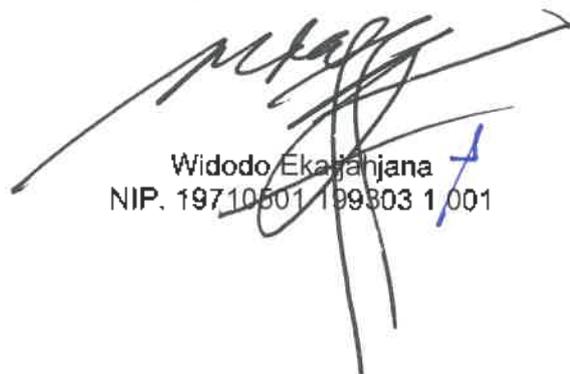
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat



Pria Wibawa
NIP. 196507281988031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN BARAT DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,2 (Indeks)
2.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (Indeks)
		2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82,0%
		4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80,0%
		5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (Indeks)

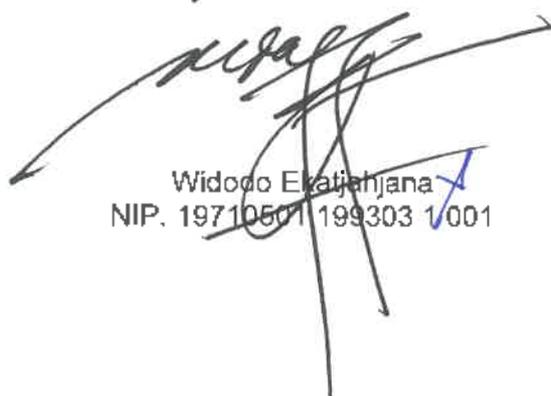
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	1. Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	21%
		2. Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	15%
2.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (Indeks)
		2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.75 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terseleenggaranya Fasilitas Perencanaan Serta Pemantauan dan Peninjauan / Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
2.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (Indeks)
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 147.311.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp. 147.311.000,-
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 770.240.000,-
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 770.240.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Widodo Erastjahjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat



Pria Wibawa
NIP. 196507281988031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pria Wibawa

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat

Pria Wibawa
NIP. 19650728 198803 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pria Wibawa
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Muallimin Abdi
Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Muallimin Abdi
NIP. 19621121 198203 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat

Pria Wibawa
NIP. 19650728 198803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN BARAT DENGAN DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	75,0%
		2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Provinsi/kabupaten/Kota Daerah memenuhi HAM.	45,0%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM	25%
		2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%
		3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	3 Instansi Pemerintah
		2. Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Instansi Pemerintah
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah
2.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi

Kegiatan	Anggaran
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 242,882,000,-
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp. 242,882,000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia



Muallimin Abdi
NIP. 19621121 198203 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat



Pria Wibawa
NIP. 196507281988031 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pria Wibawa

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat

Pria Wibawa

NIP. 19650728 1988031 001

Kemenkumham Semakin **PASTI**

